

**TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING
PADA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SE-KELOMPOK KERJA
KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

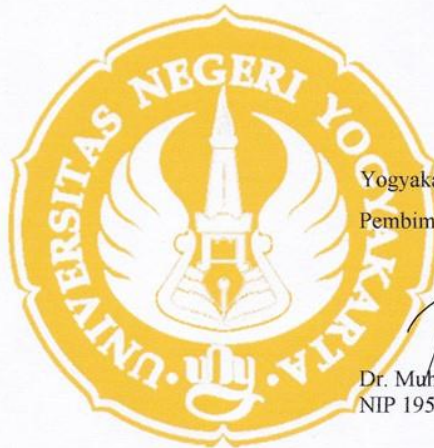


Oleh
Fajar Ilham
NIM 12104244015

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
JURUSAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2016**


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KELOMPOK KERJA KABUPATEN BANTUL” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 4 Agustus 2016

Pembimbing


Dr. Muh. Farozin, M.Pd.
NIP 19541123 198003 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Ilham

NIM : 12104244015

Program Studi : Bimbingan dan Konseling

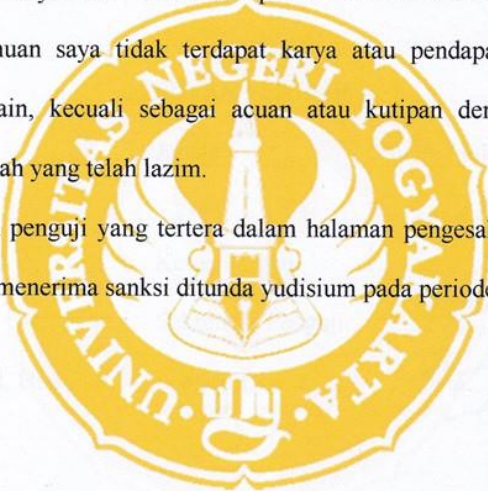
Jurusan : Psikologi Pendidikan dan Bimbingan

Fakultas : Ilmu Pendidikan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.

Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.



Yogyakarta, 19 September 2016

Yang menyatakan,

Fajar Ilham
NIM 12104244015


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KELOMPOK KERJA KABUPATEN BANTUL” yang disusun oleh Fajar Ilham, NIM 12104244015 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 Agustus 2016 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI			
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Muh. Farozin, M. Pd.	Ketua Penguji		5/9/2016
Sugiyatno, M. Pd.	Sekretaris Penguji		5/9/2016
Dr. Dwi Siswoyo, M. Hum.	Penguji Utama		5/9/2016

Yogyakarta, 21 SEP 2016
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,




Haryanto, M. Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

MOTTO

“.....boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 216)

“Berperilaku baiklah kepada semua orang karena itu sebagian dari proses untuk menjadi pribadi yang bertanggungjawab”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa Allah S.W.T
2. Alm. Mamah (Aan Hasanah) dan Bapakku (Warsono)
3. Almamater Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP UNY
4. Agama, Nusa dan Bangsa

**TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN
KONSELING PADA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SE-KELOMPOK KERJA
KABUPATEN BANTUL**

Oleh
Fajar Ilham
NIM 12104244015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode penelitian survei. Subyek penelitian adalah 52 guru bimbingan dan konseling yang diambil dengan teknik populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen tes benar salah dengan pembenaran. Uji validitas instrumen tes dilaksanakan dengan uji validitas konstruk dan uji reliabilitas dilaksanakan dengan rumus *Alpha Cronbach*. Uji pemilihan item digunakan parameter indeks tingkat kesulitan dan indeks daya beda. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kode etik profesi bimbingan dan konseling terkategori tinggi dengan persentase 55,77% yang berarti sebanyak 29 guru BK memiliki pemahaman yang tinggi (2) aspek dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling terkategori tinggi dengan persentase 50% yang berarti sebanyak 26 guru BK memiliki pemahaman yang tinggi; aspek kualifikasi guru bimbingan dan konseling, kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling terkategori tinggi dengan persentase 57,7% yang berarti sebanyak 30 guru BK memiliki pemahaman yang tinggi; aspek pelaksanaan pelayanan BK terkategori tinggi dengan persentase 63,5% yang berarti sebanyak 33 guru BK memiliki pemahaman yang tinggi; aspek pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK terkategori tinggi dengan persentase 48,08% yang berarti sebanyak 25 guru BK memiliki pemahaman yang tinggi; aspek tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK terkategori tinggi dengan persentase 55,77% yang berarti sebanyak 29 guru BK memiliki pemahaman yang tinggi.

Kata kunci: *kode etik, profesi, bimbingan dan konseling*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Pada Guru BK di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul”. Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini bisa terselesaikan tidak lepas dari kontribusi semua pihak yang memberikan do’a, bimbingan, bantuan dan arahan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di Program Studi Bimbingan dan Konseling UNY.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin melakukan penelitian.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian.
4. Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan persetujuan untuk judul penelitian dan melakukan penelitian.
5. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Muh. Farozin, M.Pd yang selalu sabar dan memberikan arahan dalam membimbing, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
6. Orang tua tercinta yang telah memberikan do’a dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakakku tercinta (Heru Sasongko dan Mufti Akbar) yang selalu memberikan motivasi.
8. Kepala sekolah di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul.

9. Guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul.
10. Semua pihak yang terkait telah membantu dalam penyusunan proposal ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis guna memperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Bimbingan dan Konseling.

Yogyakarta, 19 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Perumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	14
1. Pengertian Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	14
2. Tujuan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	16
3. Pentingnya Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	19
4. Perkembangan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	21
5. Rumusan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	23
6. Implementasi Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling	57

B. Guru Bimbingan dan Konseling.....	58
1. Pengertian Guru Bimbingan dan Konseling	58
2. Tugas Guru Bimbingan dan Konseling	60
3. Kualifikasi Akademik Guru Bimbingan dan Konseling	62
4. Kepribadian Guru Bimbingan dan Konseling	65
5. Sikap Profesional Guru Bimbingan dan Konseling	69
C. Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan & Konseling Di SMP Negeri	72
D. Penelitian yang Relevan	74
E. Pertanyaan Penelitian	76
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	77
B. Subyek Penelitian	79
C. Variabel Penelitian	80
D. Teknik Pengumpulan Data	80
E. Instrumen Penelitian	83
F. Teknik Analisis Data	109
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	112
1. Deskripsi Lokasi, Waktu dan Subyek Penelitian	112
2. Deskripsi Hasil Data Penelitian Kuantitatif Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	112
3. Deskripsi Hasil Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	124
B. Pembahasan	193
C. Keterbatasan Penelitian	197
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	198
B. Saran	199
DAFTAR PUSTAKA	200
LAMPIRAN	203

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1. Subyek Penelitian	79
Tabel 2. Penghitungan Skor Jawaban	82
Tabel 3. Deskriptor Instrumen Penelitian	87
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen dengan Software SPSS 17.0	96
Tabel 5. Hasil Penghitungan Indeks Tingkat Kesulitan (ITK) dengan <i>Microsoft Excel 2013</i>	96
Tabel 6. Hasil Penghitungan Indeks Daya Beda (IDB) dengan <i>Microsoft Excel 2013</i>	99
Tabel 7. Analisis Butir Soal ITK dan IDB	102
Tabel 8. Rangkuman Uji Instrumen Tes Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	106
Tabel 9. Hasil Perhitungan Pemahaman Kode Etik Profesi BK	113
Tabel 10. Skor Kategori Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi BK	113
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi BK	114
Tabel 12. Hasil Perhitungan Pemahaman Dasar Kode Etik Profesi BK	115
Tabel 13. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Dasar Kode Etik Profesi BK	115
Tabel 14. Hasil Perhitungan Pemahaman Kualifikasi Guru BK; Kompetensi Guru BK; dan Kegiatan Profesional BK	117
Tabel 15. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Kualifikasi Guru BK; Kompetensi Guru BK; dan Kegiatan Profesional BK.....	117
Tabel 16. Hasil Perhitungan Pemahaman Pelaksanaan Pelayanan BK	119
Tabel 17. Distribusi Fekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Pelaksanaan Pelayanan BK	119
Tabel 18. Hasil Perhitungan Pemahaman Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Profesi BK	121
Tabel 19. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Profesi BK	121

Tabel 20.	Hasil Perhitungan Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi BK	123
Tabel 21.	Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi BK	123
Tabel 22.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 2	125
Tabel 23.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 4	126
Tabel 24.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 9	127
Tabel 25.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 13	128
Tabel 26.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 14	130
Tabel 27.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 17	131
Tabel 28.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 19	132
Tabel 29.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 22	133
Tabel 30.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 24	134
Tabel 31.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 25	135
Tabel 32.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 27	136
Tabel 33.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 29	137
Tabel 34.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 33	138
Tabel 35.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 36	139
Tabel 36.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 37	140
Tabel 37.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 38	141
Tabel 38.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 42	142
Tabel 39.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 44	143
Tabel 40.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 47	144
Tabel 41.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 50	145
Tabel 42.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 54	145
Tabel 43.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 57	147
Tabel 44.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 58	148
Tabel 45.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 61	149
Tabel 46.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 64	150

Tabel 47.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 66	151
Tabel 48.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 68	152
Tabel 49.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 73	153
Tabel 50.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 74	154
Tabel 51.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 78	155
Tabel 52.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 82	156
Tabel 53.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 84	157
Tabel 54.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 86	158
Tabel 55.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 89	159
Tabel 56.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 90	160
Tabel 57.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 93	161
Tabel 58.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 96	162
Tabel 59.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 98	163
Tabel 60.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 101	164
Tabel 61.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 103	164
Tabel 62.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 105	166
Tabel 63.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 108	167
Tabel 64.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 111	168
Tabel 65.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 115	169
Tabel 66.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 117	170
Tabel 67.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 122	171
Tabel 68.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 123	172
Tabel 69.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 126	173
Tabel 70.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 129	174
Tabel 71.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 136	175
Tabel 72.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 139	176
Tabel 73.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 141	178
Tabel 74.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 142	179

Tabel 75.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 144	180
Tabel 76.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 147	181
Tabel 77.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 148	182
Tabel 78.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 154	183
Tabel 79.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 158	184
Tabel 80.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 159	185
Tabel 81.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 160	186
Tabel 82.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 162	187
Tabel 83.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 165	188
Tabel 84.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 166	189
Tabel 85.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 169	190
Tabel 86.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 173	191
Tabel 87.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 176	192
Tabel 88.	Hasil Analisis Alasan Salah dari Keseluruhan Butir Soal	193

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	114
Gambar 2. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada Aspek Dasar Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	116
Gambar 3. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada Aspek Kualifikasi Guru BK; Kompetensi Guru BK; dan Kegiatan Profesional BK	118
Gambar 4. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada Aspek Pelaksanaan Pelayanan BK	120
Gambar 5. Kategorisasi Tingkat Pada Aspek Pemahaman Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Profesi BK.....	122
Gambar 6. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi BK	124

DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	209
Lampiran 2. Instrumen Penelitian	224
Lampiran 3. Analisis SPSS 17.0 Uji Reliabilitas	257
Lampiran 4. Tabulasi Data Penelitian Kuantitatif	258
Lampiran 5. Alasan Salah dari Setiap Butir Soal Pernyataan	274
Lampiran 6. Surat-surat Penelitian	316

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan profesi bimbingan dan konseling dirintis sekitar permulaan abad ke-20 di Amerika (Bimo Walgito, 2004: 13). Adapun perintis bimbingan dan konseling yaitu Frank Parsons, Jesse B. Davis, dan Clifford Beers (Gladding, 2012: 9). Frank Parsons, pendiri bimbingan, mendirikan *Boston Vocational Bureau* untuk membantu remaja dalam menentukan keputusan karier; menulis buku "*Choosing a Vocation*", Jesse B. Davis mendirikan program bimbingan sistematis pertama di sekolah umum (Grand Rapids, Michigan), sedangkan Clifford Beers, memperjuangkan perlakuan yang lebih baik bagi penderita sakit mental; mempublikasikan buku yang berpengaruh yaitu "*A Mind That Found Itself*" (*Pikiran yang Menemukan Dirinya Sendiri*) (Gladding, 2012: 31).

Frank Parsons, Jesse B. Davis, dan Clifford Beers sangat berpengaruh dalam perkembangan bimbingan dan konseling karena memunculkan ide-ide dari berbagai tokoh seperti Sigmund Freud dengan teori *psikoanalitik*, Carl Rogers dengan teori konseling *client-centered*, Donald Super dengan teori perkembangan karir sehingga membuat profesi bimbingan dan konseling semakin luas cakupannya yang tidak hanya berfokus pada perkembangan teori, tapi berpengaruh dalam pendirian organisasi profesi sebagai wadah untuk mengorganisir tokoh-tokoh yang ingin berkontribusi dalam profesi bimbingan dan konseling.

Bimbingan dan konseling merupakan profesi. Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu seperti memiliki kerangka ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit; menguasai kerangka ilmu dengan mengikuti pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama; para anggotanya, baik perorangan maupun kelompok, lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi; menampilkan pelayanan yang khusus atas didasarkan teknik-teknik dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik; terus menerus berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mempelajari berbagai literatur dalam bidang pekerjaan tersebut; standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat (eksplisit) melalui kode etik yang benar-benar diterapkan dan setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu (McCully, 1963; Tolbert, 1972; dan Nugent, 1981 dalam Prayitno dan Erman, 2004: 337-338). Selain itu menurut Myers & Sweeney dalam Gladding (2012: 4) menyebutkan sebuah profesi dibedakan dengan dimilikinya pengetahuan tertentu, program pelatihan yang diakui, organisasi sejawat yang profesional, adanya kode etik, pengakuan legal, dan standar-standar kepakaran lainnya.

Bimbingan dan konseling dapat dikatakan profesi karena telah memenuhi ciri-ciri atau persyaratan tersebut. Namun, terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi karena masih tergolong profesi yang sedang berkembang dan bahkan perlu diperjuangkan seperti kurangnya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi konselor di Indonesia membuat

beberapa guru bimbingan dan konseling yang ingin menempuh pendidikan profesi konselor terhambat karena tempat tinggal berada diluar daerah lembaga yang menyelenggarakan sehingga merasa kesulitan untuk menempuh program studi tersebut. Data yang diperoleh dari salah satu dosen BK di FIP UNY dalam mata kuliah Profesi Bimbingan dan Konseling memaparkan bahwa baru terdapat tiga lembaga pendidikan yang sampai tahun 2015 membuka pendidikan profesi konselor di Indoensia, yaitu UNP (Universitas Negeri Padang), UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), dan UNNES (Universitas Negeri Semarang).

Kurangnya lembaga penyelenggara pendidikan profesi konselor disebabkan karena ada persyaratan yang perlu dipenuhi dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut, seperti adanya pengelolaan sumber daya manusia (SDM) bidang bimbingan dan konseling yang memadai, sarana-prasarana dan SDM dengan keahlian pendukung sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program, dan mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN, 2007: 16). Adapun data observasi peneliti dilakukan di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta yang terdapat program studi bidang bimbingan dan konseling bahwa di perguruan tinggi negeri tersebut masih kurang sumber daya manusia dalam hal ketenagakerjaan mengajar atau tidak seimbang rasio antara dosen dengan jumlah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling sehingga memungkinkan dapat mempengaruhi izin persyaratan lembaga tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan profesi konselor.

Setiap jabatan atau profesi ada kode etik. Ondi Saondi dan Aris Suherman (2010: 95-96) memaparkan bahwa syarat suatu profesi salah satunya menentukan baku standarnya sendiri atau dalam hal ini yaitu kode etik. Kode etik mengatur tingkah laku suatu masyarakat khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif, ketika dibuat dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri (K. Bertens, 2002: 279-282).

Kode etik bimbingan dan konseling yang pertama dibuat oleh *American Counseling Association (ACA)* oleh Donald Super dan disetujui pada tahun 1961 berdasarkan kode etik *American Psychological Association* yang asli (Allen, 1986 dalam Gladding, 2012: 69). Kode etik bimbingan dan konseling yang pertama dibuat saat Konvensi yang diselenggarakan di Malang pada tahun 1975 oleh Organisasi Profesi bimbingan dinamakan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) (sekarang, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, atau ABKIN) yang mengikat anggota pada mutu standar dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi profesi (Tim Dosen PPB FIP UNY, 2000: 4). Setiap kali diadakannya konvensi Organisasi Profesi, kode etik sebaiknya dikembangkan dan dikaji kembali agar dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat-saat tertentu sehingga para anggota profesi dapat

menjalankan tugas dan perannya tanpa melanggar kode etik yang telah ditetapkan secara tertulis dalam kode etik profesi tersebut.

Konselor merupakan seorang pendidik. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 6 bahwa pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selain itu, dalam Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menjelaskan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan formal dan non-formal adalah sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan berpendidikan profesi konselor.

Berdasarkan paparan di atas mengenai konselor adalah pendidik semakin memperkuat eksistensi dan posisi konselor di Indonesia karena sudah tercantum secara yuridis dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan. Namun kenyataannya di salah satu sekolah menengah di Kota Yogyakarta masih ditemukan guru bimbingan dan konseling yang bukan lulusan sarjana pendidikan (S-1) bidang bimbingan dan konseling tetapi lulusan sekolah non S-1 bidang bimbingan dan konseling. Alasan guru yang bersangkutan menjadi guru bimbingan dan konseling karena sebelumnya di sekolah tersebut kekurangan guru bimbingan dan konseling. Selain itu, guru tersebut pernah mengikuti pendidikan pelatihan guru bimbingan dan konseling selama satu tahun sehingga oleh sekolah yang bersangkutan diangkat menjadi guru

bimbingan dan konseling. Data didapatkan dari hasil observasi dan wawancara pada tanggal 11 Juli 2013.

Kejadian diatas bertentangan dengan Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah pada pasal 1 ayat 4 dan 5 yang menjelaskan bahwa standar kualifikasi akademik seorang guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Ada kekhawatiran ketika guru bimbingan dan konseling bukan lulusan sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling yaitu akan mempengaruhi kompetensi konselor.

Kompetensi konselor sebagaimana tercantum dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menjelaskan ada empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi sosial menjelaskan bahwa konselor berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling yang didalamnya harus menaati kode etik profesi bimbingan dan konseling. Selain itu, dalam kompetensi sosial menjelaskan bahwa konselor memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional yang didalamnya konselor menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor.

Kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL) UNY tahun 2015 yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan, di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di kabupaten Sleman menemukan seorang guru bimbingan dan

konseling yang tidak bisa menjaga rahasia akan permasalahan pada diri konseli. Guru bimbingan dan konseling yang bersangkutan menyebarkan kepada guru mata pelajaran lain yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan pada diri konseli. Hal tersebut dipaparkan oleh salah seorang mahasiswa yang berinisial ADP pada tanggal 30 November 2015.

Berdasarkan paparan diatas bahwa guru bimbingan dan konseling melakukan pelanggaran kode etik profesi dan tidak dapat menjaga rahasia mengenai permasalahan pada diri konseli. Siswa pun menjadi ragu ketika ingin menceritakan permasalahannya kepada guru bimbingan dan konseling, padahal dalam Bimo Walgito (2004: 9) tidak semuanya manusia yang mampu mengatasi persoalan bila tidak dibantu orang lain. Selain itu, dalam pelaksanaan pemberian layanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat menjaga asas kerahasiaan sebagaimana telah diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling, seperti yang telah dicantumkan di Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 4 ayat 1.

Adapun kemungkinan penyebab guru bimbingan dan konseling belum dapat menerapkan asas kerahasiaan yang sebagaimana tercantum penjelasannya dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu belum mengetahui dan memahami isi kode etik profesi bimbingan dan konseling, padahal dalam (K. Bertens, 2002: 282) mengemukakan bahwa agar pelaksanaan kode etik berhasil dengan baik perlu diawasi terus menerus ketika seorang profesional sedang bertugas, misalkan bila ada teman sejawat yang melanggar kode etik sebaiknya

dilaporkan kepada pihak yang berhak untuk memberikan sanksi sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam kode etik profesi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap 2 (dua) guru bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama negeri yang terletak di Kecamatan Jetis, Bantul pada tanggal 28 November 2015 yaitu guru bimbingan dan konseling tersebut baru mempunyai buku pedoman kode etik profesi bimbingan dan konseling dari ABKIN yang diterbitkan tahun 2005, namun belum memahami secara detail isi dari kode etik profesi bimbingan dan konseling.

Hasil wawancara lain terhadap 3 (tiga) guru di sekolah menengah pertama negeri yang terletak di Kecamatan Imogiri, Bantul yaitu guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugasnya mengalami kebingungan dalam memahami kode etik profesi karena ada dua versi kode etik yang ditemukan, yaitu versi dari organisasi profesi ABKIN dan IKI (Ikatan Konselor Indonesia). Selain itu, guru bimbingan dan konseling menanyakan mengenai apa perbedaan antara kedua kode etik profesi tersebut.

Wawancara dan observasi lain yang dilakukan oleh peneliti terhadap empat guru bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama yang terletak di Kecamatan Sewon, Bantul pada tanggal 28 November 2015 yaitu hasilnya guru bimbingan dan konseling tersebut baru mendapatkan isi kode etik profesi bimbingan dan konseling dari internet sehingga belum mempunyai buku pedoman kode etik profesi bimbingan dan konseling yang relevan, baik yang diterbitkan tahun 2005 maupun versi terbaru.

Adapun penyebab belum mempunyai buku pedoman kode etik bimbingan dan konseling yang diutarakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling di sekolah tersebut yaitu belum diterbitkannya secara resmi buku pedoman kode etik profesi terbaru dari ABKIN sehingga baru mengetahui dan memahami kode etik profesi bimbingan dan konseling dari internet, padahal dalam (Nisa Emirina Royan, 2014: 12-13) kemungkinan keakuratan sumber informasi dari buku lebih baik untuk digunakan daripada internet karena banyak sumber yang jelas seperti memuat daftar terbitan, siapa pengarangnya, dan penerbitnya jelas. Berbeda dengan internet yang memuat informasi di website, blog, dan forum-forum yang tidak resmi karena banyak yang tidak mencantumkan sumber informasi dan bukan hasil penelitian atau hasil karya seseorang sehingga informasi masih dipertanyakan keabsahannya.

Kode etik penting dalam mengatur tingkah laku anggota profesi ketika sedang menjalankan tugas menjadi seorang profesional, dapat mempengaruhi tingkah laku profesi tersebut terhadap kepercayaan siswa. Ketika konselor melanggar salah satu aturan dalam kode etik, misalnya tidak dapat menjaga rahasia akan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli (menceritakan masalahnya kepada guru mata pelajaran lain) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka pada saat itu juga siswa akan luntur kepercayaan kepada guru bimbingan dan konseling tersebut sehingga tidak mau melakukan konseling lagi.

Mungin Eddy Wibowo (2005: 53-54) mengemukakan bahwa kode etik salah satu syarat penting bagi eksistensi profesi konseling atau sebagai jati diri

profesi konseling. Kode etik penting mengingat bahwa penerapannya dengan patuh dan taat asas, penegakkannya merupakan tolok ukur kualitas pencapaian visi dan misi profesi. Dalam menjalankan tugas, konselor dituntut untuk menunjukkan kinerja dengan penguasaan kompetensi profesional, sosial, personal, emosional, dan spiritual. Kode etik menjadi penting sebagai pedoman kerja bagi konselor dalam menjalankan tugas profesi.

Di SMP Negeri se-kabupaten Bantul, belum ada penelitian yang membahas tentang tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling, padahal bagi guru bimbingan dan konseling kode etik penting untuk pedoman atau acuan norma mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh konselor sehingga ketika guru bimbingan dan konseling dapat memahami isi kode etik profesi bimbingan dan konseling bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan, baik dari siswa, sekolah, masyarakat, maupun pihak-pihak tertentu yang ada kaitannya dengan guru bimbingan dan konseling tersebut.

Perlu usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan survei ke beberapa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten bantul untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja kabupaten Bantul.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Ditemukannya guru bimbingan dan konseling yang melakukan pelanggaran kode etik profesi yaitu menyebarkan permasalahan konseli yang bersifat rahasia dengan menyebarkan informasi tersebut kepada guru mata pelajaran lain.
2. Beberapa guru bimbingan dan konseling belum memahami secara detail isi dari kode etik profesi bimbingan dan konseling.
3. Beberapa guru bimbingan dan konseling baru mendapatkan isi kode etik profesi bimbingan dan konseling dari internet sehingga belum mempunyai buku pedoman kode etik profesi bimbingan dan konseling yang resmi diterbitkan dari ABKIN.
4. Beberapa guru bimbingan dan konseling mengalami kebingungan dalam memahami kode etik profesi karena ada dua versi kode etik yang ditemukan, yaitu versi dari organisasi profesi ABKIN dan IKI (Ikatan Konselor Indonesia).
5. Belum ada penelitian yang membahas tentang tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memfokuskan pada tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang didapat yaitu

1. Seberapa besar tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul ?
2. Seberapa besar tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling tiap aspek pada guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang

1. Tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul.
2. Tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling setiap aspek pada guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan bimbingan dan konseling, khususnya pada pengembangan kode etik profesi bimbingan dan konseling.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia

- 1) Sebagai acuan dalam mengembangkan kode etik profesi bimbingan dan konseling.

b. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling

- 1) Sebagai pemahaman dalam mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling.
- 2) Sebagai bahan evaluasi diri dalam hal profesionalitas.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

1. Pengertian Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Menurut Nurfuadi (2012: 147), kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode yang berarti tulisan (berupa kata-kata, tanda) dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud tertentu; sedangkan etik, dapat berarti aturan tata susila; sikap atau akhlak. Dengan demikian, kode etik secara kebahasaan berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan menyangkut tata susila dan akhlak yang dituangkan dalam sebuah tulisan.

Menurut K. Bertens (2005), kode etik merupakan aturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus dalam masyarakat yang diharapkan menjadi pedoman oleh kelompok tersebut. Kode etik pertama dan tertua sudah ada pada profesi dokter yang bernama Sumpah Hipokrates. Kode etik tersebut merupakan awal dari munculnya berbagai macam-macam kode etik profesi.

Penjelasan lain mengenai kode etik Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1974 pasal 28 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Soetjipto & Raflis (2011: 29), menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan

Penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya Kode Etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip –prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri.

Penjelasan mengenai kode etik profesi dalam Ondi Saondi dan Aris Suherman (2010: 96), yaitu pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Profesi termasuk dalam sebuah kelompok yang memiliki tugas, tujuan, dan fungsi tertentu. Berbagai macam profesi memerlukan tata aturan agar dapat berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompok tersebut. Menjadi seorang profesional perlu memperhatikan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang tidak seharusnya dikerjakan ketika sedang menjalani sebuah profesi. Dengan memperhatikan tingkah laku, sikap, dan perbuatan ketika sedang bertugas sesuai dengan yang tercantum dalam kode etik, maka kepercayaan masyarakat akan suatu profesi menjadi kuat, karena setiap konseli mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.

Pengertian kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam ABKIN (2010: 3), menyatakan bahwa kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia, yaitu ABKIN. Kode etik profesi tersebut wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi bimbingan dan konseling merupakan pedoman dan landasan moral yang berisi aturan bagi anggota profesi bimbingan dan konseling mencakup

tingkah laku, sikap, akhlak, dan perbuatan yang wajib dipatuhi dan diamalkan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling dengan harapan dapat bertanggungjawab dalam menjalani tugasnya sebagai seorang profesional.

2. Tujuan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Tujuan adanya kode etik profesi adalah untuk anggota dan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum, menurut R. Hermawan S (1979) dalam Soetjipto & Rafli Kosasi (2011: 31-32) tujuan kode etik profesi yaitu :

a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar.

b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan

seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan profesinya.

Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.

c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

d. Untuk meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Sedangkan penjelasan lain mengenai tujuan kode etik profesi menurut

Ondi Saondi dan Aris Suherman (2010: 99) antara lain :

a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
- f. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
- h. Menentukan baku standarnya sendiri

Menurut ABKIN (2010: 2-3), kode etik profesi bimbingan dan konseling indonesia memiliki lima tujuan, yaitu :

- a. Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.
- b. Membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional.
- c. Mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)
- d. Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenal diri anggota profesi.
- e. Melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi bimbingan dan konseling; membantu menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota profesi bimbingan dan konseling dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional; memberikan panduan perilaku yang

berkarakter dan profesional bagi anggota profesi dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling; meningkatkan mutu organisasi profesi sesuai dengan misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia; dan melindungi anggota profesi dan sasaran layanan atau konseli dengan meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

3. Pentingnya Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Menurut Van Hoose dan Kottler (1985) dalam Gladding (2012: 68), tiga alasan mengenai pentingnya keberadaan kode etik, diantaranya :

- a. Kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri alih-alih dikendalikan oleh undang-undang.
- b. Kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi.
- c. Kode etik melindungi praktisi dari publik, terutama untuk pengaduan mal-praktik. Jika konselor bertindak sesuai batas-batas etik, tingkah lakunya akan dinilai telah mematuhi standar umum.

Penjelasan lain mengenai pentingnya keberadaan kode etik profesi menurut K. Bertens (2002) dapat memperkuat kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap suatu profesi. Sehingga ketika masyarakat menggunakan jasa profesi tersebut, keamanan dan kerahasiaannya akan terjamin dan tidak menimbulkan kecurigaan karena sudah tercantum dalam kode etik mengenai aturan yang menyangkut hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang profesi

Pentingnya kode etik profesi bimbingan dan konseling bagi seorang konselor dalam menjalankan tugasnya menurut Mungin Eddy Wibowo (2005: 53), yaitu :

- a. Memberikan pedoman etis/moral berperilaku waktu mengambil keputusan bertindak menjalankan tugas profesi konseling.
- b. Memberikan perlindungan kepada konseli (individu pengguna).
- c. Mengatur tingkah laku pada waktu menjalankan tugas dan mengatur hubungan konselor dengan konseli, rekan sejawat dan tenaga-tenaga profesional yang lain, atasan, lembaga tempat bekerja.
- d. Memberikan dasar untuk melakukan penilaian atas kegiatan profesional yang dilakukannya.
- e. Menjaga nama baik profesi terhadap masyarakat (*public trust*) dengan mengusahakan standar mutu pelayanan dengan kecakapan tinggi dan menghindari perilaku tidak layak atau tidak patut/pantas.
- f. Memberikan pedoman berbuat bagi konselor jika menghadapi dilema etis.
- g. Menunjukkan kepada konselor standar etika yang mencerminkan pengharapan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah dapat melindungi dan memperkuat kepercayaan publik (*public trust*) dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling; mengatur hubungan konselor dengan konseli, teman sejawat, lembaga tempat bekerja, pimpinan, dan profesi lain yang ada hubungannya dengan profesi bimbingan dan konseling; dan mengontrol anggota profesi

bimbingan dan konseling ketika bertingkah laku tidak sesuai dengan etika yang diharapkan oleh masyarakat.

4. Perkembangan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Perkembangan kode etik profesi bimbingan dan konseling diawali di negara Amerika Serikat. Menurut Gladding (2012: 69), perkembangan kode etik profesi bimbingan dan konseling awalnya dibuat oleh ACA (*American Counseling Association*) berdasarkan kode etik *American Psychological Association* yang disetujui oleh Donald Super pada tahun 1961 dan telah direvisi sebanyak lima kali (1974, 1981, 1988, 1995, dan 2005). *Code of Ethics* ACA mencakup 8 bagian judul topik, diantaranya :

- a. Hubungan konseling, termasuk tanggung jawab konselor profesional kepada konseli dan kesejahteraannya.
- b. Kepercayaan, komunikasi, dan privasi dalam konseling, termasuk pengecualian untuk hak privasi dan merekam.
- c. Tanggung jawab profesional, seperti kompetensi profesional, periklanan dan permohonan, kualifikasi, dan tanggung jawab publik.
- d. Hubungan dengan tenaga profesional lainnya, termasuk rekan kerja, atasan, dan pegawai.
- e. Evaluasi, penilaian, dan interpretasi.
- f. Hubungan dengan pengajaran, pelatihan, dan pengawasan, termasuk ekspektasi dan tanggung jawab pendidik konselor dan muridnya, serta program pendidikan konselor.

- g. Penelitian dan publikasi serta menguraikan tanggung jawab penelitian, hak-hak peserta penelitian, dan pelaporan hasil penelitian, termasuk publikasi.
- h. Cara-cara memutuskan hal-hal yang menyangkut etik, termasuk bagaimana mengatasi konflik antara etik dan hukum, dugaan pelanggaran, dan kerja sama dengan komite etik

Di Indonesia, perkembangan awal rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu ketika diadakannya Konvensi Nasional Bimbingan Pertama di Malang pada tahun 1975 yang menghasilkan keputusan penting, seperti terbentuknya organisasi profesi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI, sekarang ABKIN-Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) (Prayitno: 2004).

Penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling di Indonesia dalam ABKIN (2009: 3) bab 4 pasal 6 ayat 2 tercantum bahwa naskah kode etik ditetapkan dalam pertemuan organisasi tertinggi yaitu kongres. Semenjak pergantian nama organisasi profesi IPBI menjadi ABKIN, rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yang peneliti temukan terdapat dua versi yaitu tahun 2005 dan tahun 2010. Berbagai kode etik yang berhubungan dengan profesi bimbingan dan konseling mulai bermunculan, seperti kode etik konselor yang disusun oleh divisi organisasi profesi ABKIN yaitu IKI (Ikatan Konselor Indonesia).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kode etik profesi bimbingan dan konseling pada awalnya di negara Amerika Serikat oleh organisasi profesi ACA (*American Counseling Association*) yang

disetujui oleh Donald Super pada tahun 1961 berdasarkan kode etik *American Psychological Association*. Di Indonesia, rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling pertama ditetapkan pada tahun 1975 saat Konvensi Nasional Bimbingan Pertama di Malang bersamaan terbentuknya organisasi profesi IPBI (Ikatan Profesi Bimbingan Indonesia, yang sekarang ABKIN-Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia). Penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling dilakukan dalam pertemuan tertinggi organisasi profesi ABKIN yaitu dalam pertemuan kongres.

5. Rumusan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Guru bimbingan dan konseling merupakan pendidik. Di Indonesia, guru mempunyai rumusan kode etik yang ditetapkan dalam kongres organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan tujuan sebagai pedoman perilaku guru Indonesia dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Adapun isi kode etik guru Indonesia menurut Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Guru Indonesia mencakup: kewajiban guru terhadap peserta didik, kewajiban guru terhadap orang tua, kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap teman sejawat, kewajiban guru terhadap profesi, dan kewajiban guru terhadap pemerintah.

Rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling ditetapkan dalam pertemuan kongres organisasi profesi ABKIN. Ada dua versi yang peneliti temukan mengenai rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling dari ABKIN. Pertama, kode etik bimbingan dan konseling tahun 2005. Kedua, kode

etik profesi bimbingan dan konseling tahun 2010. Kode etik tahun 2005 menurut ABKIN (2005) menjelaskan mengenai :

a. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling

Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling di Indonesia yaitu Pancasila dan tuntutan profesi. Pancasila sebagai dasar karena profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha layanan membantu warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Sedangkan tuntutan profesi sebagai dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling karena mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan konseli sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia

b. Kualifikasi dan kegiatan profesional konselor

Konselor perlu memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling sebagai modal utama untuk bekerja. Konselor dapat bekerja ketika ada pengakuan keahlian dan kewenangan dari organisasi profesi bimbingan dan konseling.

Konselor sebagai seorang profesional memiliki kewenangan melakukan :

1) Penyimpanan dan penggunaan informasi

Data hasil wawancara, observasi, tes, perekaman, dan surat-menyerat. Penyimpanan informasi bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan bagi kepentingan konseli. Penggunaan informasi digunakan untuk keperluan penelitian atau pendidikan calon konselor, sepanjang identitas konseli dirahasiakan.

2) Testing

Tes dilakukan hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasil data konseli. Penggunaan tes wajib mengikuti pedoman dan petunjuk yang berlaku bagi tes tersebut.

3) Riset

Konselor dalam melakukan penelitian perlu menghindari hal-hal yang dapat merugikan subyek. Ketika melaporkan hasil riset, konseli sebagai subyek identitasnya harus dijaga kerahasiaannya.

c. Proses hubungan dan konsultasi layanan

Konselor memiliki berbagai hubungan dan konsultasi dengan berbagai pihak ketika melakukan pelayanan bimbingan dan konseling, diantaranya :

1) Hubungan dalam pemberian pada pelayanan

Konselor wajib menangani konseli selama ada kesempatan. Konseli sepenuhnya berhak untuk mengakhiri hubungan dan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai hasil yang diharapkan. Konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila konseli tidak memperoleh manfaat.

2) Hubungan dengan klien

Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan konseli; menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadinya; tidak membedakan konseli atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial; dan memberikan pelayanan sampai tuntas.

3) Konsultasi dengan rekan sejawat

Ketika dalam memberikan pelayanan ragu-ragu kepada konseli, konselor wajib berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawatnya. Konselor

wajib mendapat izin terlebih dahulu kepada konseli sebelum melakukan konsultasi.

4) Alih tangan kasus

Konselor wajib mengakhiri hubungan konseling dengan konseli bila tidak dapat memberikan bantuan kepada konseli. Konselor menyarankan kepada konseli untuk berkonsultasi kepada orang atau badan yang mempunyai keahlian yang relevan namun atas persetujuan konseli.

5) Hubungan kelembagaan

Prinsip umum ketika konselor bekerja dalam suatu lembaga perlu memperhatikan penyimpanan serta penyebaran informasi konseli sehingga wajib ada pengertian dan kesepakatan antara konselor dengan pihak lembaga tempat konselor bekerja. Keterkaitan kelembagaan dengan konselor yaitu adanya peraturan-peraturan di lembaga tempat konselor bekerja sehingga wajib konselor untuk bertanggung jawab dalam mematuhi dan mengetahui program-program di lembaga tersebut. Konselor dapat mengundurkan diri jika tidak cocok dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lembaga tempat bekerja.

d. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain

Konselor dapat melakukan praktik mandiri ketika memperoleh izin praktik dari organisasi profesi ABKIN. Ketika mendapatkan izin praktik mandiri, konselor tetap mentaati kode etik profesi dan berhak mendapat dukungan serta perlindungan dari rekan seprofesi. Laporan kepada pihak lain (misal: badan di luar profesinya) dan wajib memberikan keterangan informasi konseli, konselor

perlu sebijaksana mungkin menyampaikan informasi agar pihak konseli tetap dilindungi dan tidak dirugikan.

e. Ketaatan pada profesi

Konselor wajib melaksanakan hak dan kewajiban tugasnya terhadap konseli dan profesi yang sepenuhnya untuk kepentingan dan kebahagiaan konseli. Tidak menyalahgunakan profesinya sebagai konselor untuk mencari keuntungan pribadi atau yang dapat merugikan konseli (misalkan menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yang tidak wajar). Konselor yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ABKIN.

Isi kode etik tahun 2010 merupakan hasil penyempurnaan dari kode etik bimbingan dan konseling tahun 2005. Kedua rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling tersebut mencakup lima bab.

Adapun rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling tahun 2010 menurut ABKIN (2010), antara lain:

a. Dasar Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Pembahasan pertama kode etik profesi bimbingan dan konseling mencakup definisi, prinsip, dan tujuan organisasi profesi Asosiasi Bimbingan dan Konseling; pengertian kode etik profesi bimbingan dan konseling; dan landasan legal kode etik profesi bimbingan dan konseling.

1) Pengantar

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) adalah organisasi profesi beranggotakan pendidik (guru, dosen) bimbingan dan konseling minimal lulusan **Program Studi Sarjana (S1) Bimbingan dan**

Konseling, dan tamatan Pendidikan Profesi Konselor (PPK). Prinsip-prinsip dasar profesionalitas pelayanan bimbingan dan konseling antara lain:

- a) Setiap individu dipandang atas dasar kemuliaan harkat dan martabat kemanusiaannya.
- b) Setiap individu memiliki hak dihargai, diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan kesempatan memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu secara profesional.
- c) Profesi bimbingan dan konseling menyelenggarakan layanan bagi individu dari berbagai latar belakang beragam dalam budaya; etnis, agama dan keyakinan; usia; status sosial dan ekonomi; individu dengan kebutuhan khusus; individu yang mengalami kendala bahasa; dan identitas gender.
- d) Setiap individu berhak mendapatkan informasi yang mendukung pemenuhan atas kebutuhan dalam mengembangkan diri.
- e) Setiap individu mempunyai hak untuk memahami makna dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depan.
- f) Setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan dirinya sesuai dengan hak-hak pribadinya, aturan hukum, kebijakan, dan standar etika pelayanan.

Kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia memiliki lima tujuan, yaitu:

- a) Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling.
- b) Membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional.
- c) Mendukung misi organisasi profesi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
- d) Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenai diri anggota asosiasi.
- e) Melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli.

2) Pengertian

Etika organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling adalah pedoman nilai dan moral yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas, atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli.

Kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling indonesia yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sehingga wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi profesi tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

3) Landasan legal

Landasan legal kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia adalah:

- a) Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- c) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* (pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tentang Standar pendidikan dan Tenaga Kependidikan).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 tentang *Guru*.
- e) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- f) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*.
- g) *Dasar Standarisasi Profesi Konseling* (DSPK) yang disusun dan diberlakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mulai Tahun 2003/2004.
- h) *Panduan Pengembangan Diri* yang disusun dan diberlakukan oleh Pusat Kurikulum Badan Pengembangan dan Penelitian Pendidikan sejak tahun 2006.

b. Kualifikasi, Kompetensi, dan Kegiatan

Pembahasan kedua kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu mengenai kualifikasi konselor, kompetensi konselor, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling.

1) Kualifikasi

Kualifikasi konselor adalah anggota ABKIN yang minimal Sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling, dan tamatan Pendidikan Profesi Konselor (PPK).

2) Kompetensi

- a) Memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani
 - (1) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan kepentingan konseli dalam situasi umum.
 - (2) Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, dalam ragam budaya Indonesia pada situasi kehidupan global yang adil dan beradab.
- b) Menguasai landasan teoritik keilmuan pendidikan dan bimbingan dan konseling
 - (1) Menguasai teori dan praksis pendidikan.
 - (2) Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling.
 - (3) Menguasai esensi dan praktik operasional pelayanan bimbingan dan konseling pada *setting* pendidikan dalam berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan, serta *setting* non-pendidikan.
- c) Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap konseli

- (1) Merancang program bimbingan dan konseling, khususnya untuk sasaran layanan atau konseli pada satuan pendidikan, atau unit kerja/organisasi atau lembaga tempat konselor bertugas.
 - (2) Menguasai konsep, praksis dan praktik asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.
 - (3) Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling, melalui penerapan pendekatan dan teknik konseling secara eklektik-komperhensif.
 - (4) Menilai proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling.
- d) Mengembangkan pribadi dan profesionalitas diri secara berkelanjutan
- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - (2) Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian berkarakter serta kinerja profesional.
 - (3) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.
 - (4) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja.
 - (5) Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling.
 - (6) Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi.
 - (7) Mengembangkan diri untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang profesi melalui

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, ikut seminar lokakarya dalam bidang Bimbingan dan Konseling.

3) Kegiatan profesional

a) Praktik pelayanan secara umum

(1) Dinamika Pelayanan

- (a) Konselor wajib menangani konseli sesuai dengan kesepakatan.
- (b) Jika dirasa perlu, konseli berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, walaupun proses konseling belum mencapai hasil konkrit.
- (c) Konselor tidak melanjutkan hubungan bila konseli tidak memperoleh manfaat dari layanan yang sedang/ sudah dilaksanakan.
- (d) Konselor membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan yang telah dilaksanakan dengan sepenuhnya menerapkan asas kerahasiaan untuk kepentingan layanan lebih lanjut

(2) Hubungan konselor dengan konseli

- (a) Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan konseli.
- (b) Konselor wajib menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi konselor.

- (c) Konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial tertentu terhadap konseli.
- (d) Konselor tidak diperkenankan memaksa untuk melaksanakan pelayanan terhadap seseorang tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.
- (e) Konselor wajib memberikan pelayanan kepada siapapun yang memerlukannya, terlebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang menghendaknya.
- (f) Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sebagaimana diperlukan oleh konseli.
- (g) Konselor wajib menjelaskan kepada konseli tujuan konseling, sifat hubungan yang sedang dibina, dan tanggung jawab konselor serta konseli dalam hubungan profesional konseling.
- (h) Konselor wajib memperhatikan kondisi konseli ketika kegiatan layanan berlangsung.

b) Praktik pada unit kelembagaan

Konselor berpraktik pada unit kelembagaan tertentu, seperti satuan pendidikan, lembaga kedinasan (negeri/swasta), lingkungan kerja (perusahaan/industri), atau lembaga sosial kemasyarakatan:

- (1) Konselor memahami visi, misi, tujuan, pola kerja dan nilai-nilai yang berlaku di lembaga tempat bekerja, dengan ketentuan:
 - (a) Apabila visi, misi, tujuan, pola kerja dan nilai-nilai lembaga sesuai dengan visi dan misi serta nilai-nilai konseling yang berkarakter dan memandirikan, konselor dianggap layak untuk bekerja di lembaga yang dimaksud.
 - (b) Apabila visi, misi, tujuan, pola kerja dan nilai-nilai yang ada di lembaga tersebut tidak sesuai dengan visi, misi serta nilai-nilai pelayanan konseling, konselor dianggap tidak layak bekerja di lembaga tersebut.
- (2) Konselor ikut serta dalam menjunjung dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, pola kerja nilai-nilai yang berlaku di lembaga yang dimaksud melalui pelayanan bimbingan dan konseling.
- (3) Konselor memberikan pelayanan kepada seluruh sasaran layanan atau konseli yang menjadi tanggung jawabnya di lembaga tempat bekerja dan konseli-konseli yang secara langsung meminta konselor memberikan pelayanan, dengan menerapkan segenap kaidah, kode etik profesional pelayanan konseling.

c) Praktik pada unit keluarga

Dalam status sebagai konselor keluarga pada unit keluarga tertentu:

- (1) Konselor mengenal dan menghormati kondisi kehidupan keluarga tempat konselor bekerja.
- (2) Konselor memberikan pelayanan kepada seluruh anggota keluarga ke arah kehidupan berkarakter dan mandiri, sejahtera dan bahagia dengan menerapkan segenap kaidah praktik dan kode etik profesional dalam pelayanan konseling.

d) Praktik mandiri

Dalam status sebagai konselor mandiri (privat):

- (1) Konselor terlebih dahulu wajib memperoleh izin praktik dari organisasi profesi bimbingan dan konseling, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- (2) Konselor menyelenggarakan layanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan menerapkan segenap kaidah praktik dan kode etik profesional pelayanan konseling.

e) Dukungan sejawat profesional konselor

- (1) Berkenaan dengan status konselor yang bekerja pada unit kelembagaan lainnya serta konselor mandiri, semua konselor saling menghormati dan mendukung teman sejawat.
- (2) Jika dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, sejawat konselor dengan senang hati dan sekuat tenaga secara profesional

membantu rekan yang bekerja pada unit kelembagaan, keluarga dan praktik mandiri yang membutuhkan bantuan.

f) Informasi dan riset

(1) Penyimpanan dan penggunaan informasi

(a) Catatan tentang diri konseli seperti hasil wawancara, testing, surat-menyurat, rekaman dan data lain yaitu informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan konseli.

(b) Penggunaan data/informasi tersebut pada poin (a) dimungkinkan untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor sepanjang identitas pemiliknya dirahasiakan.

(c) Penyampaian informasi tentang konseli kepada keluarganya atau anggota profesi yang sama atau profesi lain membutuhkan persetujuan konseli yang bersangkutan dan kepentingannya tidak dirugikan.

(d) Informasi profesional hanya boleh disampaikan kepada orang yang mampu dan berwenang menafsirkan dan menggunakannya.

(2) Aplikasi Instrumentasi

(a) Suatu jenis instrument (tes dan non-tes) hanya diaplikasikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya.

- (b) Aplikasi instrumentasi dilakukan apabila diperlukan data yang lebih luas tentang kondisi diri atau karakteristik kepribadian konseli untuk kepentingan pelayanan.
- (c) Konselor memberikan hasil instrumentasi kepada konseli dan orang tua untuk kepentingan pelayanan.
- (d) Penggunaan instrument wajib mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi instrument yang dimaksud.
- (e) Data hasil aplikasi instrumentasi wajib diintegrasikan ke dalam himpunan data dan/atau dengan informasi dari sumber lain untuk konseli yang sama.
- (f) Hasil aplikasi instrumentasi hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh ada hubungannya dengan usaha bantuan terhadap konseli dan tidak menimbulkan kerugian baginya.

(3) Riset

- (a) Dalam melakukan riset terhadap manusia, wajib dihindari hal yang merugikan subjek yang diteliti.
- (b) Dalam melaporkan hasil riset, identitas subjek penelitian wajib dijaga kerahasiannya.

c. Pelaksanaan Layanan

Pembahasan ketiga kode etik profesi yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

1) Penghargaan dan keterbukaan

a) Penghargaan terhadap sasaran layanan

- (1) Konselor menghargai konseli sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Konselor menyadari dan menghargai konseli dengan hak-hak pribadi dan kondisi multikultural dirinya.
- (3) Konselor memahami permasalahan yang dialami konseli dan memposisikan sebagai subjek yang perlu dibantu dan dicarikan solusi atas masalah-masalahnya dengan sebaik-baiknya, bukan menjadikan kesalahan yang diperbuat konseli menjadi objek layanan.
- (4) Konselor memahami dan memposisikan konseli sebagai subjek yang berpotensi untuk mampu mencapai solusi atas permasalahan yang dialaminya dan mengembangkan dirinya.

b) Kebenaran dan keterbukaan

- (1) Dalam menyelenggarakan layanan konseling, konselor membahas dan menangani konseli secara objektif atas dasar kebenaran dengan prinsip konselor tidak pernah memihak, kecuali pada kebenaran.
- (2) Dalam pembahasan dan pencarian solusi atas permasalahan konseli, konselor mendorong konseli untuk obyektif dan terbuka sehingga segala sesuatunya dapat dibahas dan dilayani secara mendalam, tuntas dan tepat.

- (3) Dalam menangani permasalahan konseli, konselor bertindak secara objektif, konkrit dan menghindari kerancuan peran dan sesuatu yang tidak jelas.

2) Kerahasiaan dan berbagi informasi

a) Kerahasiaan

- (1) Konselor menghargai, menyadari dan menempatkan informasi dari dan mengenai diri konseli, baik dari yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kondisi aktualnya pada posisi yang sangat penting dan harus dirahasiakan sepenuhnya.
- (2) Konselor berbagi informasi tentang diri dan kondisi sasaran layanan hanya seizin sasaran layanan sesuai dengan asas kerahasiaan, atau pertimbangan etika profesi hukum dan atau hukum.

b) Berbagi informasi dengan pihak lain

(1) Dengan pegawai lembaga

Konselor memastikan keamanan atas kerahasiaan informasi dan data-data konseli yang dikelola oleh pegawai lembaga, termasuk tenaga pembantu dan tenaga sukarela.

(2) Dengan team konselor

- (a) Jika pelayanan terhadap konseli melibatkan konselor lain (dalam satu tim) dengan peranannya masing-masing, maka konseli terlebih dulu diberi tahu mengenai

hal tersebut dan informasi serta data apa saja tentang dirinya yang akan dibagi kepada konselor lain.

- (b) Alih tangan kasus kepada konselor lain atau ahli lain harus seizin konseli, dan konseli diberitahu informasi apa saja tentang dirinya yang disampaikan kepada konselor lain atau ahli lain.
- (c) Dalam diskusi profesional antar konselor, nama konseli yang dibahas masalahnya tidak dikemukakan kepada peserta diskusi.
- (d) Dalam konferensi kasus, konselor dengan sungguh-sungguh meminta kepada peserta konferensi dan memastikan bahwa para peserta itu memang benar-benar akan merahasiakan nama konseli dan permasalahan yang dibahas, tidak akan disampaikan kepada siapapun.

(3) Dengan pihak sebagai atasan konselor

Konselor melaporkan kepada atasan tentang pelaksanaan program konseling secara garis besar tanpa menyebutkan nama-nama konseli dalam laporan tersebut.

(4) Dalam memindahkan informasi

Informasi data yang bersifat rahasia yang terekam dalam komputer, melalui surat elektronik, mesin fax, telepon dan perlengkapan teknologi komputer lainnya, dipindahkan oleh konselor dengan memperhatikan serta memastikan keamanan pemindahan informasi/data-data rahasia tersebut.

c) Rekaman data konseling

(1) Kerahasiaan rekaman

Proses perekaman dan tempat penyimpanan hasilnya hanya ditangani oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk rekaman tersebut.

(2) Izin untuk merekam

Konselor meminta izin dari konseli untuk merekam proses konseling dalam bentuk elektronik maupun bentuk lain.

(3) Izin untuk pengamatan

Konselor meminta izin kepada konseli untuk mengamati sesi layanan langsung, sesi konseling dalam latihan, termasuk meninjau hasil transkrip dan laporan pelaksanaan pelayanan.

(4) Rekaman bagi konseli

Konselor hanya memberikan salinan rekaman dan/atau laporan layanan kepada konseli yang memang memerlukan. Konselor membatasi pemberian salinan rekaman atau sebagian salinan hanya jika isi rekaman tersebut tidak mengganggu atau menyakiti perasaan konseli. Dalam situasi konseling yang melibatkan banyak konseli, maka konselor hanya memberikan salinan rekaman data yang menyangkut konseli yang memintanya dan tidak menyertakan salinan data konseli lain.

(5) Bantuan dengan rekaman Data

Konselor memberikan bantuan kepada konseli dengan cara memberikan konsultasi dalam memaknai rekaman dan memanfaatkan secara proaktif data yang ada.

(6) Membuka atau memindahkan Rekaman

Konselor meminta persetujuan tertulis dari konseli untuk membuka atau memindahkan rekaman data kepada pihak ketiga yang memiliki wewenang.

(7) Penyimpanan dan pemutihan rekaman setelah konseling berakhir

Konselor memelihara dan menjaga kerahasiaan dengan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menindak lanjuti proses konseling.

d) Penelitian

(1) Persetujuan institusi atau lembaga

Konselor harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan dari lembaga tempat konselor bekerja bila akan menggunakan informasi-informasi mengenai konseli sebagai bagian dari penelitian

(2) Informasi rahasia yang diperlukan dalam penelitian

Konselor menjaga kerahasiaan setiap rekaman data konseli dengan sebaik-baiknya jika penelitian yang dilakukan melibatkan pihak lain.

3) Setting layanan

a) Suasana dan sarana fisik

- (1) Konselor menyelenggarakan pelayanan kepada konseli di tempat (seperti ruangan dan kelengkapannya) yang dijamin keamanannya, serta dalam suasana (seperti kondisi udara, cahaya, tata ruang) yang nyaman, sejuk dan memberikan semangat serta terhindar dari kebisingan.
- (2) Pelayanan konseling dapat diselenggarakan di luar ruangan dengan catatan kondisi fisik dan suasananya harus sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas.
- (3) Tempat penyelenggaraan layanan dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti tempat berbaring untuk relaksasi, persediaan air (untuk cuci tangan dan cuci muka, serta untuk minum), serta perlengkapan *hardware* untuk penayangan media, dan lain-lain.

b) Kondisi sosial-psikologis

- (1) Pelayanan konseling dilaksanakan di tempat “tertutup”, artinya tidak dilihat oleh pihak ketiga yang dapat mencemari asas kerahasiaan.
- (2) Tempat penyelenggaraan konseling dipilih dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga konseli merasa dihargai/dihormati; pilihan tempat penyelenggaraan layanan merupakan kesepakatan antara konseli dan konselor.

- (3) Jarak dan posisi duduk antara konselor dan konseli, terutama pada layanan konseling perorangan, tidak melanggar nilai-nilai dan norma berlaku.

4) Pendekatan dan teknik

Adapun sepuluh pendekatan dan teknik konseling yang dapat menjadi acuan bagi konselor dalam menyelenggarakan layanan konseling, diantaranya :

- a) Konseling Psikoanalisis Klasik (Freud)
- b) Konseling Ego (Adler, Jung, Fromm)
- c) Konseling Psikologi Individual (Adler)
- d) Konseling Analisa Transaksional (Berne)
- e) Konseling Self (Rogers)
- f) Konseling Gestalt (Perls)
- g) Konseling Behavioral (Skinner)
- h) Konseling Realitas (Glasser)
- i) Konseling Rasional-Emotif (Ellis)
- j) Konseling Pancawaskita (Prayitno)

Kesepuluh pendekatan dan teknik tersebut perlu dipahami dan dicermati oleh konselor untuk terlaksananya pelayanan konseling secara eklektik-komprehensif.

(1) Ke-eklektik-an

- (a) Konselor menyelenggarakan pelayanan terhadap konseli secara sistematis-komprehensif melalui langkah-langkah pengantaran (*introduction*), penjagaan (*investigation*),

penafsiran (*interpretation*), pembinaan (*intervation*), pengontrolan/penilaian (*inspection*), dengan menggunakan secara cermat unsur-unsur yang ada di dalam pendekatan dan teknik konseling.

- (b) Penggunaan unsur-unsur yang ada dalam pendekatan dan teknik konseling dipilih oleh konselor secara elektik sesuai kebutuhan, permasalahan dan kondisi konseli.

(2) Kekinian dan kemandirian

- (a) Pelayanan konseling terfokus pada konsdisi kekinian dan kemandirian konseli.
- (b) Apabli konseli mengungkapkan hal-hal yang berdimensi waktu yang lalu dan/atau yang akan datang, dan/atau terkait dengan pihak ketiga, maka hal-hal tersebut dianalisis dan dibahas dengan kaitannya dengan dimensi kekinian dan kemandirian konseli.
- (c) Apabila konselor menggunakan teknik diagnosis tertentu, maka hasil diagnosis tersebut digunakan dalam rangka pembinaan termasuk didalamnya upaya (*remedial*) berkenaan kekinian dan kemandirian konseli.

(3) Data instrumen

- (a) Penggunaan instrumen oleh konselor yang dapat menghasilkan data dalam dimensi waktu lalu, masa kini, dan masa yang akan datang diorientasikan pada kondisi kekinian dan kemandirian konseli.

- (b) Konseli berhak untuk mengetahui hasil instrumen yang digunakan konselor demi pemahaman konseli tentang kondisi kekinian dan kemandiriannya. Dalam hal ini konselor perlu menjelaskan secara objektif dan tepat.
- (c) Konselor hanya menggunakan instrumen yang memiliki hak untuk menggunakannya telah terlatih dalam pengadmisnistrasian, pengolahan dan penafsiran data, serta penggunaan data hasil instrument itu secara keseluruhan dalam pelayanan konseling.

(4) Penilaian hasil layanan

- (a) Penilaian hasil layanan konseling, khususnya layanan konseling perorangan, meliputi penguasaan dan kondisi konseli yang difokuskan pada:
 - (i) Acuan **(A)** yang digunakan konseli terkait dengan pengentasan masalah dan pengembangan dirinya pasca pelayanan.
 - (ii) Kompetensi **(K)** yang dimiliki konseli berkenaan dengan penanganan masalahnya dalam rangka pengembangan dirinya.
 - (iii) Upaya **(U)** yang dilaksanakan konseli pasca pelayanan dalam penanganann dan pengembangan diri.
 - (iv) Kondisi afektif/perasaan **(K)** konseli pasca pelayanan konseling terhadap suasana dan materi pelayanan yang

sudah berlangsung serta upaya yang hendak dilaksanakan konseli.

- (v) Kesungguhan (**K**) konseli dalam kaitannya dengan upayanya untuk implementasi hasil layanan konseling.
- (b) Penilaian terhadap hasil layanan konseling dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - (i) Untuk setiap kali layanan konseling, khususnya buat konseling individu, diselenggarakan penilaian segera (**LAISEG**) menjelang diakhirinya pelayanan.
 - (ii) Untuk konseli-konseli yang menjadi tanggung jawab konselor dalam kurun waktu tertentu, konselor menyelenggarakan penilaian jangka pendek (**LAIJAPEN**) dan penilaian jangka panjang (**LAIJAPANG**) sesuai dengan tahapan program pelayanan yang disusun.
- (c) Untuk pelayanan dengan format klasikal / kelompok dilakukan penilaian dengan meminta peserta layanan merefleksikan (secara lisan dan/atau tertulis) diri mereka masing-masing berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah mereka ikuti melalui ekspresi tentang bagaimana mereka:
 - (i) Berpikir (**B**) atau memikirkan tentang hal-hal yang telah dibahas dalam pelayanan.

- (ii) Merasa (**M**) atau merasakan berkenaan dengan hal-hal yang telah dibahas dalam pelayanan.
- (iii) Bersikap (**B**) atau menyikapi hal-hal yang telah dibahas atau suasana yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan.
- (iv) Bertindak (**B**) atau akan melakukan sesuatu berkenaan dengan hal-hal yang telah dibahas dalam pelayanan.
- (v) Bertanggung jawab (**B**) apabila hal-hal yang dibicarakan dalam pelayanan terkait dengan diri mereka sendiri.

5) Tanggung jawab

a) Tanggung jawab kepada konseli

- (1) Konselor menjunjung tinggi dan memelihara hak-hak konseli sehingga terwujud dengan cara yang baik seiring dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi konselor.
- (2) Konselor secara penuh membantu konseli dalam mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mendorongnya untuk mencapai solusi atas permasalahannya dan mencapai perkembangan diri secara optimal.
- (3) Konselor mendorong konseli untuk mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mengambil

keputusan sendiri, dan mandiri dalam menjalankan kehidupan secara efektif dan sukses.

- (4) Konselor mengerahkan segenap kemampuan profesionalnya yang terbaik demi keberhasilan konseli.

b) Tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya

Konselor telah memenuhi kewajiban yang diletakkan kepadanya oleh orang tua/keluarga konseli, pimpinan satuan pendidikan (sekolah/madrasah, dll), pemerintah, yayasan, masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab konselor terlebih menjadi tuntutan bagi konselor yang bekerja pada unit kelembagaan tertentu.

- (1) Konselor memberikan informasi kepada pimpinan lembaga dan pihak-pihak terkait tentang peranan konselor terutama tentang pelayanan terhadap konseli yang menjadi tanggung jawab konselor di lembaga yang dimaksud dan peranan konseling demi suksesnya lembaga.
- (2) Konselor mendorong konseli yang ada di lembaga yang dimaksud serta pihak-pihak yang terkait agar melalui pelayanan konseling mereka dapat ikut serta menyukseskan lembaga.
- (3) Konselor merupakan kepanjangan tangan dari keseluruhan tugas kelembagaan melalui kerjasama

konselor dengan seluruh perangkat kelembagaan untuk suksesnya visi misi lembaga secara menyeluruh.

- (4) Konselor menerima masukan, pendapat atau kritikan dari pimpinan lembaga sebagai dasar untuk mengembangkan, memperbaiki dan melaksanakan dengan sekses program bimbingan dan konseling lembaga yang dimaksud.

c) Tanggung Jawab kepada Ilmu dan Profesi

- (1) Konselor menyadari bahwa ilmu dan kemampuan yang telah dipelajarinya mengandung nilai luhur yang wajib dijunjung tinggi dan diimplementasikan dengan cara terbaik, sehingga nilai-nilai luhur itu tidak tercerai berai.
- (2) Konselor tidak menyalah gunakan kedudukan sebagai konselor untuk kepentingan diluar tujuan dan kemanfaatan ilmu profesi konseling.
- (3) Dalam kaitannya dengan asosiasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, konselor secara konsisten tunduk dan menjalankan aturan kode etik profesi, sepanjang asosiasi profesi tersebut terarah dan menjalankan kaidah keilmuan dan profesi bimbingan dan konseling dengan benar.

d) Tanggung Jawab kepada Diri Sendiri

- (1) Konselor menyadari bahwa kualitas konseling yang dilakukan berdampak pada pribadi konselor sendiri,

terutama dalam pandangan pihak lain tentang kemampuan dan kualitas keprofesian konselor.

- (2) Konselor berusaha terus-menerus untuk mengembangkan kompetensi keprofesionalannya dengan menjaga kualitas diri dan profesinya.

e) Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa

- (1) Konselor, dalam menjalankan pelayanan konseling merasakan bahwa hal itu merupakan ibadah.
- (2) Konselor menyadari bahwa apa yang dilaksanakan dalam pelayanan konseling wajib terlaksana dijalankan yang benar, hanya untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, serta terhindar dari kesalahan yang disadari dan disengaja.

d. Pelanggaran dan Sanksi

Pembahasan keempat tentang kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu mengenai bentuk pelanggaran dan sanksi anggota profesi bimbingan dan konseling yang melakukan tindakan pelanggaran/merugikan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.

1) Bentuk Pelanggaran

a) Pelanggaran Umum

- (1) Melanggar nilai dan norma yang mencemarkan nama baik profesi Bimbingan dan Konseling dan organisasinya, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia

- (2) Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik profesi Bimbingan dan Konseling.

b) Pelanggaran terhadap konseli

- (1) Menyebarkan/membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli.
- (2) Melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis) terhadap konseli, dan merugikan konseli.
- (3) Melakukan tindak kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap konseli.
- (4) Kesalahan dalam melakukan praktik profesional (pendekatan, prosedur, teknik, instrumentasi, evaluasi dan tindak lanjut).
- (5) Tidak memberikan pelayanan atau mengabaikan permintaan konseli untuk mendapatkan pelayanan.
- (6) Melakukan *referral* kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan masalah konseli dan merugikan konseli.

c) Pelanggaran terkait dengan Lembaga Kerja

- (1) Melakukan kesalahan terhadap lembaga berkenaan dengan tanggung jawabnya sebagai konselor yang bekerja dilembaga yang dimaksudkan.
- (2) Melakukan kesalahan pidana terhadap lembaga yang dimaksud yang dikenai sanksi/hukum yang mencemarkan nama baik profesi Bimbingan dan Konseling.

d) Pelanggaran terhadap Rekan Sejawat

- (1) Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik antar sejawat konselor, seperti penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan.
- (2) Berebut konseli untuk dilayani antar sesama konselor.

e) Pelanggaran terhadap Organisasi Profesi

- (1) Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
- (2) Mencemarkan nama baik profesi dan organisasi profesinya.

2) Sanksi Pelanggaran

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling maka kepada konselor diberikan sanksi sebagai berikut:

- a) Teguran secara lisan dan tertulis.
- b) Peringatan keras secara tertulis.
- c) Pencabutan keanggotaan ABKIN.
- d) Pencabulan lisensi izin praktik mandiri.
- e) Apabila terkait dengan permasalahan hukum/kriminal maka permasalahan tersebut diserahkan pada pihak yang berwenang.

3) Mekanisme Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi terhadap konselor yang dianggap melanggar Kode Etik dilakukan sebagai berikut:

- a) Diperolehnya pengaduan dan atau informasi tentang adanya pelanggaran dari konseli dan atau pihak lain.

- b) Pengaduan/informasi disampaikan kepada Dewan Kode Etik, untuk diverifikasi.
- c) Konselor yang bersangkutan dipanggil untuk verifikasi pengaduan/informasi yang disampaikan oleh konseli dan atau pihak lain. Dalam hal ini konselor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- d) Apabila ternyata memang ada pelanggaran dan pelanggaran itu dianggap masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik daerah yang kemudian dikuatkan oleh Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB-ABKIN).
- e) Apabila pelanggaran dilakukan oleh konselor cukup berat, Dewan Kode Etik Daerah melimpahkan penyelesaiannya kepada Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB-ABKIN).

e. Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai asosiasi profesi membentuk Dewan Kode Etik Profesi Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dewan Kode Etik Profesi tersebut adalah:

- 1) Menjaga tegaknya Kode Etik profesi Bimbingan dan Konseling sebagai profesi yang bermartabat.
- 2) Mengadakan verifikasi tentang kebenaran pelanggaran terhadap Kode Etik oleh konselor yang dilaporkan oleh pihak tertentu.

- 3) Menerima dan mempertimbangkan pembelaan dari konselor yang diadukan melanggar Kode Etik.
- 4) Mempertimbangkan dan menjatuhkan sanksi kepada konselor yang nyata-nyata melanggar Kode Etik sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.
- 5) Bertindak sebagai sanksi di pengadilan berkenaan dengan perkara berkenaan dengan permasalahan hukum yang menyangkut anggota ABKIN dan ABKIN sebagai lembaga.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling ada dua versi, yaitu kode etik pada tahun 2005 dan tahun 2010. Kode etik tersebut ada kaitannya dengan rumusan kode etik profesi guru dalam hal profesi bimbingan dan konseling yang bekerja di satuan pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan adanya persamaan mentaati kode etik profesi bimbingan dan konseling maupun kode etik guru sebagai pedoman dalam bekerja. Konselor sebagai pendidik wajib mentaati kode etik profesi guru yang menjelaskan hubungan-hubungan yang mencakup kewajiban guru terhadap: orang tua, masyarakat; teman sejawat, profesi, dan pemerintah. Sebagai anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling perlu memahami dan menerapkan kode etik profesi bimbingan dan konseling mencakup 5 aspek yang terdiri dari (1) dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling (2) kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling, (3) pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, (4) pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling.

konseling, (5) tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling.

6. Implementasi Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling

Penerapan kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling sebagai tujuan terkait dengan asas kerahasiaan yang tercantum dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 4 butir a (2014: 3). Dalam lampiran Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa kerahasiaan yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik/konseli, sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling.

Menurut Mungin (2005: 114), kerahasiaan merupakan persoalan pokok yang paling penting dalam konseling kelompok. Konselor perlu menekankan kepada semua peserta konseli mengenai pentingnya pemeliharaan kerahasiaan. Ketika konseling kelompok berlangsung, kegiatan tersebut merupakan rahasia bersama sebagai kelompok.

Penjelasan lain mengenai implementasi kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dalam ABKIN (2007: 162), yaitu konselor perlu memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional dengan menyelenggarakan layanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional. Adapun komponen layanan bimbingan dan konseling dalam Permendikbud No. 111 (2014: 4), yaitu layanan dasar,

layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem yang mencakup bidang layanan pribadi, belajar, sosial, dan karier.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu berhubungan dengan asas kerahasiaan sebagaimana tercantum penjelasannya dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling.

B. Guru Bimbingan dan Konseling

1. Pengertian Guru Bimbingan dan Konseling

Guru adalah pendidik. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 6 tentang Standar Pendidikan Nasional (2003: 2), yang mendefinisikan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, paming belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. UU tersebut memperkuat posisi konselor sebagai guru bimbingan dan konseling di satuan pendidikan.

Penjelasan lain mengenai pengertian Menurut UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penjelasan tersebut memperjelas tugas /peran seorang guru di satuan pendidikan.

Pengertian lain mengenai guru bimbingan dan konseling dijelaskan dalam Permendikbud No. 111 tahun 2014 pasal 1 ayat 4 dan 5 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (2014: 3), bahwa guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling. Satuan pendidikan bagi guru bimbingan dan konseling yaitu Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri adalah pendidik yang berperan dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik, memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling berprofesi di satuan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP.

2. Tugas Guru Bimbingan dan Konseling

Menurut Nurfuadi (2012: 125), tugas seorang guru dikelompokkan menjadi tiga jenis tugas, yaitu:

a. Tugas guru dalam bidang profesi

Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Dan hal ini tidak semua orang dapat melakukannya. Dalam konteks ini tugas guru meliputi mendidik, mengajar, dan melatih.

b. Tugas kemanusiaan

Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orangtua kedua. Guru harus menanamkan nilai kemanusiannya kepada anak didik. Dengan begitu peserta didik akan mempunyai sifat kesetiakawanan sosial.

c. Tugas dalam bidang kemasyarakatan

Guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila.

Penjelasan mengenai tugas guru dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang guru, menyatakan bahwa tugas utama guru sebagai pendidik profesional yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Penjelasan lain mengenai tugas utama guru bimbingan dan konseling dalam surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84 Tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, menyatakan bahwa tugas pokoknya yaitu menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis

hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

Pendapat lain mengenai tugas guru bimbingan dan konseling dalam ABKIN (2007: 32), menyatakan bahwa konteks tugas konselor dalam sekolah menengah yaitu memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya dalam rangka menumbuhkan kemandirian dalam mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun tentang pemilihan, penyiapan diri serta kemampuan mempertahankan karier, dengan bekerja sama secara isi-mengisi dengan guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan dengan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

Pembahasan mengenai tugas guru bimbingan dan konseling dalam Departemen Pendidikan Nasional (2009: 11-12), menyatakan bahwa tugas guru bimbingan yaitu membantu peserta didik dalam:

- a. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat.
- b. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.
- c. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah/madrasah secara mandiri.

- d. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas guru bimbingan dan konseling adalah merencanakan program layanan bimbingan dan konseling, melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, analisis hasil pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan tindak lanjut pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik dalam rangka membantu, menumbuhkan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan kehidupan peserta didik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier, sehingga dapat mengaktualisasikan potensi dan mengambil keputusannya dalam dirinya secara mandiri.

3. Kualifikasi Guru Bimbingan dan Konseling

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 bab 5 pasal 8 dan 9 menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menjelaskan bahwa ada dua kualifikasi akademik guru. Pertama, kualifikasi akademik guru melalui

pendidikan formal. Kedua, kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

a. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal mencakup kualifikasi akademik guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP) yaitu guru pada SMP, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non-kependidikan. Penjelasan lain mengenai standar kualifikasi akademik guru bimbingan dan konseling atau konselor tercantum dalam Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Konselor. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal adalah:

- a. Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling
- b. Berpendidikan profesi konselor

Kualifikasi guru bimbingan dan konseling diperkuat dalam Permendikbud No.111 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4 yang menyebutkan bahwa guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling.

Menurut Tohirin (2012: 113), guru bimbingan dan konseling dapat dibedakan menjadi dua; yaitu guru bimbingan dan konseling profesional dan non-profesional. Guru bimbingan dan konseling profesional adalah guru yang diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan profesi sesuai klasifikasi keilmuannya dan latar belakangnya Diploma II, III, Sarjana Strata Satu (S-1), S-2, dan S3. Sedangkan guru BK non-profesional yaitu guru yang diangkat tidak berdasarkan keilmuan atau latar belakang pendidikan profesi, seperti guru wali kelas, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah yang bukan berlatar belakang dari bimbingan dan konseling.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi guru bimbingan dan konseling dapat dibedakan dua, guru bimbingan dan konseling profesional dan guru bimbingan dan konseling non-profesional. Guru profesional yang memiliki ijazah dan berlatar belakang profesi sesuai klasifikasi keilmuannya, (D-II, D-III, S-1, S-2, S-3, dan berpendidikan profesi konselor). Sedangkan guru bimbingan dan konseling non-profesional yaitu guru bimbingan dan konseling yang tidak memiliki ijazah keilmuan di bidang bimbingan dan konseling dan diperoleh melalui pendidikan formal dari program studi yang terakreditasi dan uji kelayakan dan kesetaraan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

4. Kepribadian Guru Bimbingan dan Konseling

Kualitas kepribadian penting bagi guru bimbingan dan konseling ketika penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut Syamsu Yusuf dan A. Juntika (2006: 37), kualitas pribadi guru bimbingan dan konseling/konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam konseling. Cavanagh (1982) dalam Syamsu Yusuf dan A. Juntika (2006) mengemukakan 11 karakteristik kualitas pribadi konselor, antara lain:

a. Pemahaman diri

Pentingnya pemahaman diri bagi konselor karena ketika konselor dapat memahami dirinya apa yang perlu dilakukan, mengapa melakukan hal itu, dan masalah apa yang harus dia selesaikan, konselor akan mampu mengajarkan cara memahami diri itu kepada orang lain, khususnya konseli.

b. Kompeten

Konselor perlu memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna. Dalam hal ini, konselor berperan mengajar kompetensi-kompetensi tersebut kepada konseli.

c. Memiliki kesehatan psikologis yang baik

Konselor penting memahami kesehatan psikologisnya karena mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan keterampilannya. Dengan memiliki kesehatan psikologis yang baik, konselor dapat menyadari kelemahan atau keterbatasan kemampuan dirinya dan dapat membangun proses konseling lebih positif.

d. Dapat dipercaya

Dapat dipercaya ada kaitannya dengan kerahasiaan. Pentingnya konselor memiliki kepribadian dapat dipercaya karena ketika sedang melakukan konseling, konseli perlu jaminan mengenai permasalahannya untuk tidak dibicarakan kepada orang lain, kecuali izin dari yang bersangkutan.

e. Jujur

Konselor perlu bersikap terbuka, autentik, dan asli (*genuine*). Jujur penting karena memungkinkan konselor dapat memberikan umpan balik secara objektif kepada konseli

f. Kuat

Kekuatan atau kemampuan konselor sangat penting dalam konseling, sebab dengan hal itu konseli akan merasa aman karena konseli memandang konselor sebagai orang yang tabah dalam menghadapi

masalah, dapat mendorong konseli untuk mengatasi masalahnya, dan dapat menanggulangi kebutuhan dan masalah pribadi.

g. Hangat

Kepribadian hangat yang dimaksud adalah ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang. Konseli yang datang meminta bantuan konselor, pada umumnya yang kurang mengalami kehangatan dalam hidupnya, sehingga dia memerlukan orang yang bisa memberikan suasana hangat pada dirinya.

h. Responsif

Melalui respon yang aktif, konselor dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan konseli. Konselor dapat mengajukan pertanyaan yang tepat, memberikan umpan balik yang bermanfaat, dan berdiskusi dengan konseli tentang cara mengambil keputusan yang tepat.

i. Sabar

Kepribadian sabar bagi konselor dalam proses konseling dapat membantu mengembangkan dirinya secara alami. Dengan sabar, konselor akan lebih memperhatikan diri konseli dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

j. Sensitif

Konselor yang sensitif akan mampu mengungkap atau menganalisis apa masalah sebenarnya yang dihadapi konseli. Konselor yang sensitif akan peka terhadap masalah yang tidak disadari oleh diri konseli dan mengetahui sifat-sifat yang mudah tersinggung dirinya.

k. Memiliki kesadaran holistik

Konselor memahami konseli secara utuh dan tidak hanya satu dimensi saja. Dimensi yang dimaksud adalah dimensi fisik, intelektual, emosi, sosial, seksual, dan moral-spiritual.

Penjelasan lain mengenai kepribadian konselor menurut Foster (1996) dan Guy (1997) dalam Gladding (2009: 40), antara lain:

- a. Keingin-tahuan dan kepedulian:
- b. Kemampuan mendengarkan
- c. Suka berbincang
- d. Empati dan pengertian
- e. Menahan emosi
- f. Introspeksi
- g. Kapasitas menyangkal diri
- h. Toleransi keakraban
- i. Mampu berkuasa
- j. Mampu tertawa

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan dan konseling perlu memiliki kualitas kepribadian yang positif seperti memiliki pemahaman diri, berkompeten, mempunyai kesehatan psikologis yang baik, dapat dipercaya, jujur, kuat, hangat, responsif, sabar, sensitif, memiliki kesadaran holistik, mampu mendengarkan dengan baik, keingin-tahuan, introspeksi, dan mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan pribadi.

5. Sikap Profesional Guru Bimbingan dan Konseling

Guru bimbingan dan konseling sebaiknya mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan bertindak laku terhadap profesinya. Hal tersebut dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat dalam menilai pengamalan sikap profesionalnya. Menurut Soetjipto dan Rafli Kosasi (2011), sasaran sikap profesional guru, antara lain:

- a. Sikap terhadap Peraturan Perundang-Undangan
- b. Sikap terhadap Organisasi profesi
- c. Sikap terhadap Teman sejawat
- d. Sikap terhadap Anak didik
- e. Sikap terhadap Tempat Kerja
- f. Sikap terhadap Pemimpin
- g. Sikap terhadap Pekerjaan

Adapun penjelasannya secara rinci mengenai sikap profesional guru bimbingan dan konseling , yaitu:

a. Sikap Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Konselor adalah salah satu pendidik, unsur aparatur negara dan abdi negara. Maksudnya konselor perlu mengetahui berbagai peraturan yang berkaitan dengan pendidikan, dan juga berkaitan dengan profesinya. Konselor juga harus melaksanakan berbagai kebijakan/ peraturan yang dituang dalam UU atau PP atau Permen. Konselor perlu memperhatikan kode etik profesi untuk dijadikan acuan dalam mendarmbaktikan profesi.

b. Sikap Terhadap Organisasi Profesi

Konselor secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi BK sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Adanya organisasi profesi ABKIN, HSBKI, MGBK, IMABKIN sebagai suatu wadah/ sarana perjuangan dan pengabdian dalam peningkatan mutu profesi bimbingan dan konseling. Antara anggota dengan organisasi profesi, perlu hubungan timbal balik dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Pengurus dan anggota pun secara bersama membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu organisasi profesi. Peningkatan mutu organisasi profesi dapat dilakukan berbagai cara, baik diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama tentang studi lanjut, diklat, seminar, workshop, dan studi banding.

c. Sikap Terhadap Teman Sejawat

Sikap terhadap teman sejawat yaitu perlunya saling menghormati, saling membantu, saling mengingatkan, saling menegur, saling mendorong sesama konselor. Menciptakan dan memelihara kekeluargaan, kesetiakawanan, hubungan sesama konselor akan menumbuhkan perasaan yang harmonis dan perasaan saudara antara sesama anggota profesi.

d. Sikap Terhadap Konseli

Guru bimbingan dan konseling perlu menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan konseli, mengutamakan kepentingan konseli, tidak bersikap diskriminasi dalam pemberian layanan dan melayani

secara baik kepada semua konseli akan menciptakan hubungan yang bersifat membantu secara profesional.

e. Sikap Terhadap Tempat Kerja

Suasana yang baik dan nyaman akan memudahkan guru bimbingan dan konseling dalam pengembangan dirinya secara maksimal. Perlunya mensyukuri dan menggunakan/memanfaatkan serta merawat fasilitas kerja yang ada akan menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis dalam bekerja secara profesional. Guru bimbingan dan konseling perlu menciptakan suasana yang kondusif, hangat, akrab dan kekeluargaan dalam lingkungan kerja merupakan sikap profesional guru bimbingan terhadap tempat kerja.

f. Sikap Terhadap Pimpinan

Guru bimbingan dan konseling harus siap menerima arahan, teguran dan atau pembinaan dari pimpinan. Menerima sanksi mendidik atas dasar fakta yang dapat dibuktikan merupakan bentuk komitmen guru bimbingan dan konseling apabila tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Memberikan masukan yang konstruktif secara santun untuk kepentingan pengembangan diperlukan bagi guru bimbingan dan konseling terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan oleh pimpinan.

g. Sikap Terhadap Pekerjaan

Guru bimbingan dan konseling perlu tanggung jawab atas hasil kerja yang menuntut pertanggungjawaban. Menjaga nama baik dan bangga terhadap profesinya sebagai sikap menyenangkan dengan sepenuh hati akan

jenis profesinya. Selain itu, guru bimbingan dan konseling perlu meningkatkan mutu produktifitas hasil kerjanya untuk bahan evaluasi diri kinerja terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap profesional guru bimbingan dan konseling mencakup sikap terhadap perundangan-undangan, sikap terhadap organisasi profesi bimbingan dan konseling, sikap terhadap teman sejawat, sikap terhadap konseli, sikap terhadap tempat kerja, sikap terhadap pimpinan, dan sikap terhadap pekerjaan.

C. Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling Di SMP Negeri

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menguasai makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Kemampuan tersebut dinyatakan dalam menguraikan isi pokok suatu bacaan, kemudian bacaan tersebut diterapkan ke bentuk yang lain (W.S. Winkel, 2007).

Kode etik profesi bimbingan dan konseling merupakan pedoman dan landasan moral yang berisi aturan bagi anggota profesi bimbingan dan konseling mencakup tingkah laku, sikap, akhlak, dan perbuatan yang wajib dipatuhi dan diamalkan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling dengan harapan dapat bertanggungjawab dalam menjalani tugasnya sebagai seorang profesional.

Kode etik profesi bimbingan dan konseling ada 5 bab yang dibahas dan telah disepakati oleh anggota profesi, yang terdiri dari: (1) dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling (2) kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan profesional

bimbingan dan konseling, (3) pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, (4) pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling, (5) tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling

Kualifikasi guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri dapat dibedakan dua, guru bimbingan dan konseling profesional dan guru bimbingan dan konseling non-profesional. Guru profesional yang memiliki ijazah dan berlatar belakang profesi sesuai klasifikasi keilmuannya, (D-II, D-III, S-1, S-2, S-3, dan berpendidikan profesi konselor). Sedangkan guru bimbingan dan konseling non-profesional yaitu guru bimbingan dan konseling yang tidak memiliki ijazah keilmuan di bidang bimbingan dan konseling dan diperoleh melalui pendidikan formal dari program studi yang terakreditasi dan uji kelayakan dan kesetaraan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya

Pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri merupakan kemampuan dalam menguasai makna pedoman yang berisi aturan bagi guru berprofesi di bidang bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling mencakup aspek (1) dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling (2) kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, (3) pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, (4) pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling, (5) tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling.

Pentingnya guru bimbingan dan konseling dalam memahami kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah mengontrol anggota profesi bimbingan dan konseling dalam bertindak laku agar sesuai dengan etika yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam kenyataannya di lapangan beberapa guru bimbingan dan konseling belum mempunyai buku kode etik profesi bimbingan dan konseling dan ada guru yang tidak bisa menjaga rahasia permasalahan siswa sehingga dipertanyakan pemahaman mengenai kode etik profesi bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, perlunya mengetahui tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk evaluasi diri dalam hal profesionalitas bagi guru bimbingan dan konseling ketika menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling.

D. Penelitian yang Relevan

Kode etik profesi bimbingan dan konseling sebelumnya sudah ada penelitiannya dengan judul pelaksanaan kode etik konselor di SMA/SMK seKota Malang. Sumber acuannya berasal dari kode etik konselor yang dirumuskan oleh IKI (Ikatan Konselor Indonesia). Yuanita Puspitasari, mahasiswa prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Malang melakukan penelitiannya pada tahun 2010 di daerah SeKota Malang, Jawa Timur dengan tujuan untuk: (1) mengetahui gambaran pelaksanaan kode etik konselor di SMA/SMK se Kota Malang, (2) mengetahui adanya perbedaan pelaksanaan kode etik konselor berdasarkan jenis kelamin, masa kerja dalam jabatan, dan kualifikasi pendidikan. Sampel penelitian adalah 20 konselor SMA negeri/swasta dan 20 konselor SMK negeri/swasta yang dipilih berdasarkan jenis

kelamin, masa kerja dalam jabatan, dan kualifikasi pendidikan. Pengumpulan data menggunakan angket/kuisisioner pelaksanaan kode etik dengan skala sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) 55% konselor berada pada taraf tinggi, 45% konselor berada pada taraf cukup, 0% konselor berada pada taraf rendah dalam pelaksanaan kode etik, 2) Pada aspek kualifikasi dan kegiatan profesional konselor 42,5% konselor berada pada taraf tinggi, 57,5% cukup, dan 0% rendah; pada aspek hubungan kelembagaan dan laporan kepada pihak lain 20% konselor berada pada taraf tinggi, 80% cukup, dan 0% rendah; pada aspek ketaatan kepada profesi 95% konselor berada pada taraf tinggi, 5% cukup, dan 0% rendah, 3) Berdasarkan hasil analisis uji t yang telah dilakukan, tidak ada pengaruh perbedaan jenis kelamin, masa kerja dan kualifikasi pendidikan dalam pelaksanaan kode etik konselor.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwa pelaksanaan kode etik konselor di daerah se-kota Malang yaitu cenderung berada pada taraf tinggi. Guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanannya dapat dikatakan sudah sesuai tata aturan dalam kode etik tersebut. Namun, dalam penelitian ini belum membahas lebih lanjut mengenai pemahaman konselor mengenai kode etik profesi bimbingan dan konseling yang ditetapkan oleh ABKIN, sehingga perlunya melakukan penelitian mengenai tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling dengan rujukan kode etik profesi bimbingan dan konseling dari induk organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu ABKIN agar dapat mengetahui dan memahami lebih dalam seberapa besar tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling.

E. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan teori di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimana pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling dalam aspek (1) dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling (2) kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling, (3) pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, (4) pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling, (5) tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2015), penelitian kuantitatif deskriptif merupakan bentuk penelitian untuk mendapatkan informasi data yang luas dari suatu populasi atau sampel tertentu mengenai fenomena-fenomena kegiatan pendidikan, pembelajaran, implementasi kurikulum, jenjang, dan satuan pendidikan yang terjadi saat ini dengan analisis data yang bersifat statistik. Penelitian ini menggunakan variabel tunggal (satu variabel) karena mendeskripsikan suatu fenomena pada profesi pendidikan dalam hal pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling. Menurut Zainal Arifin (2012: 54), penelitian deskriptif dapat menggunakan variabel tunggal atau lebih. Nana Sudjana dan Ibrahim (2004: 65) mengemukakan pendapat yang sama bahwa variabel yang diteliti bisa tunggal atau satu sehingga penelitian ini tidak dilakukan sampai pengujian hipotesis. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif deskriptif ini cukup dengan pertanyaan penelitian.

Metode survei merupakan bagian dari penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Zainal Arifin (2012: 41), pola-pola penelitian deskriptif diantaranya: survei, studi kasus, *casual-comparative*, korelasi, dan pengembangan. Morissan, dkk (2012: 166) menjelaskan bahwa penelitian survei bisa dibagi ke dalam dua kategori, yaitu survei deskriptif dan survei analitis. Survei deskriptif berupaya menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap untuk menjelaskan apa

yang ada saat ini. Penelitian ini sesuai dengan variabel yang digunakan oleh peneliti dalam mengungkap kondisi pemahaman kode etik profesi bimbingan saat ini.

Penelitian survei memiliki beberapa kelebihan. Menurut Wimmer dan Dominick dalam Morissan, dkk (2012: 167) kelebihan dari jenis penelitian survei yaitu:

1. Survei dapat digunakan untuk meneliti suatu masalah atau pertanyaan penelitian dalam situasi yang sebenarnya.
2. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan survei relatif tidak mahal jika dibandingkan dengan jumlah informasi yang diperoleh.
3. Kuantitas data dalam jumlah besar dapat diperoleh dengan relatif mudah dari berbagai kelompok masyarakat.
4. Survei tidak dibatasi oleh batasan geografis artinya dapat dilakukan dimana saja.
5. Survei dapat menggunakan berbagai sumber data pendukung atau data sekunder yang sudah tersedia.

Jenis penelitian survei ini yaitu *school survey*. Menurut Van Dalen dalam Suharsimi Arikunto (2010: 153) menjelaskan bahwa *school survey* bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendidikan. Masalah yang diungkap berhubungan dengan pemahaman sikap dan tingkah laku yang menunjang dalam proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui metode survey untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman guru

bimbingan dan konseling dalam memahami kode etik profesi bimbingan dan konseling yang menunjang proses belajar mengajar di sekolah.

B. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah populasi guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja di Kabupaten Bantul yang terdiri dari 52 guru bimbingan dan konseling tersebar di 17 SMP. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 173), populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian.

Adapun data jumlah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja di kabupaten bantul secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1. Subyek Penelitian

No.	Kecamatan	Sekolah	Jumlah Guru BK
1	Srandakan	SMP Negeri 1 Srandakan	3
2	Sewon	SMP Negeri 1 Sewon	2
3	Sedayu	SMP Negeri 1 Sedayu	3
4	Sanden	SMP Negeri 1 Sanden	3
5	Pundong	SMP Negeri 1 Pundong	3
6	Pleret	SMP Negeri 1 Pleret	4
7	Piyungan	SMP Negeri 1 Piyungan	3
8	Pandak	SMP Negeri 1 Pandak	3
9	Pajangan	SMP Negeri 1 Pajangan	1
10	Kretek	SMP Negeri 1 Kretek	3
11	Kasihan	SMP Negeri 1 Kasihan	2
12	Jetis	SMP Negeri 1 Jetis	3
13	Imogiri	SMP Negeri 1 Imogiri	4
14	Dlingo	SMP Negeri 1 Dlingo	4
15	Bantul	SMP Negeri 1 Bantul	5
16	Bambanglipuro	SMP Negeri 1 Bambanglipuro	3
17	Banguntapan	SMP Negeri 1 Banguntapan	3
Jumlah			52

C. Variabel Penelitian

Menurut Zainal Arifin (2012: 185) variabel merupakan suatu faktor yang jika diukur akan menghasilkan skor yang bervariasi. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena apabila metode pengumpulan datanya kurang tepat ketika sedang mengumpulkan data penelitian maka hasil penelitiannya pun tidak akurat. Teknik pengumpulan data yaitu cara dalam menghimpun data variabel yang akan diteliti dengan berbagai metode wawancara, tes, dan kuesioner (Suharsimi Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode *tes*.

1. Tes

Tes adalah merupakan cara untuk menaksir besarnya tingkat kemampuan manusia secara tidak langsung melalui respons seseorang terhadap sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau salah sehingga hasil tes tersebut bisa digunakan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan (Djemari Mardapi, 2008). Djemari Mardapi (2008) juga menjelaskan bahwa tujuan tes yaitu untuk mengetahui dan mengukur tingkat kemampuan testee. Menurut S. Margono (2005), ada dua jenis tes yang sering dipergunakan sebagai alat pengukur, yaitu tes lisan dan tes tertulis. Tes lisan merupakan sejumlah pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada testee. Sedangkan tes tertulis

merupakan tes yang diajukan kepada testee dalam bentuk tulisan dalam mengungkapkan aspek tertentu.

Tes objektif adalah suatu tes berupa pertanyaan atau pernyataan yang disusun dalam bentuk jawaban alternatif berupa jawaban benar-salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, dan jawaban singkat menghasilkan skor yang tetap, tidak tergantung oleh siapa pun yang memberi skor (S. Margono, 2005). Menurut Djemari Mardapi (2008: 71), tes benar-salah adalah bentuk tes yang terdiri sejumlah pernyataan yang bernilai benar (B) dan salah (S). Tes ini terdiri dari dua macam yaitu tes benar-salah dengan pembetulan dan tes benar salah tanpa pembetulan. Tes pembetulan yaitu testee diminta untuk membetulkan jawaban yang ia jawab salah, sedangkan tes tanpa pembetulan testee tidak diberikan kesempatan untuk membetulkan jawaban yang ia jawab salah.

W.S. Winkel (2009: 553), menjelaskan bahwa tes obyektif mempunyai kelebihan, antara lain:

- a. Jumlah pertanyaan atau pernyataan yang diajukan cukup banyak.
- b. Kemungkinan testee mendapat keuntungan dengan berspekulasi tentang materi yang akan keluar dalam soal.
- c. Testee tidak dituntut untuk menguraikan sendiri, tetapi hanya memilih di antara beberapa alternatif jawaban yang disajikan.
- d. Jawaban yang tepat sudah pasti sehingga tidak mungkin timbul variasi antara pemeriksa yang satu dengan yang lain dalam mengartikan jawaban.

- e. Pemeriksaan dapat dilakukan jauh lebih cepat dibanding dengan tes uraian.

Penelitian ini menggunakan tes tertulis berupa tes obyektif bentuk jawaban benar-salah dengan pembentulan dalam mengumpulkan data. Tes untuk guru bimbingan dan konseling dipergunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling guru bimbingan dan konseling yang meliputi aspek dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling, kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling, pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling, tugas dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling. Alternatif jawabannya dalam tes ini yaitu :

- a. B : Benar
- b. S : Salah

Adapun cara penghitungan skor tiap responden menjawab soalnya yaitu :

Tabel. 2 Penghitungan Skor Jawaban

Pilihan Jawaban	Favourable	Unfavourable
Benar	1	0
Salah	0	1

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa tes.

1. Tes

Instrumen merupakan alat dalam mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang dibuat dalam bentuk soal tes, angket, pedoman wawancara, dan pedoman observasi (Suharsimi Arikunto, 2010: 203). Penelitian ini menggunakan instrumen berupa soal tes. Adapun langkah-langkah penyusunan instrumen menurut Suharsimi Arikunto (2005: 135), yaitu :

- a. Mengidentifikasi variabel-variabel dalam rumusan judul penelitian.
- b. Menjabarkan variabel menjadi sub variabel
- c. Mencari indikator dari sub variabel
- d. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator
- e. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen.
- f. Melengkapi instrumen dengan (pedoman atau instruksi) dan kata pengantar.

Suharsimi juga menjelaskan (2002: 142) prosedur yang ditempuh setelah penyusunan instrumen yaitu:

- a. Uji-coba instrumen
- b. Analisis hasil uji coba
- c. Revisi terhadap item

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penyusunan instrumen tes tentang pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

a. Identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian

Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal mengenai pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling

b. Menjabarkan variabel menjadi sub variabel

Sub variabel dari variabel kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu:

- 1) Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling
- 2) Kualifikasi guru bimbingan dan konseling, kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling
- 3) Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.
- 4) Pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling
- 5) Dewan kode etik profesi

c. Mencari indikator dari sub variabel

Selanjutnya menjabarkan indikator dari tiap sub variabel, yaitu:

- 1) Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling
 - a) Mengetahui organisasi profesi, ranah pengembangan kemampuan, prinsip-prinsip dasar profesionalitas, dan tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling

- b) Mengetahui pengertian dan kewajiban mematuhi kode etik profesi, pentingnya etika organisasi, serta bentuk kode etik profesi bimbingan dan konseling
 - c) Mengetahui dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia
- 2) Kualifikasi guru bimbingan dan konseling, kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling.
 - a) Mengetahui kualifikasi, bidang program studi, dan pendidikan profesi pada guru bimbingan dan konseling
 - b) Mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling
 - c) Mengetahui kegiatan guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan yang profesional
- 3) Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.
 - a) Mengetahui penghargaan dan keterbukaan guru bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan layanan
 - b) Mengetahui kerahasiaan dan pelibatan berbagi informasi tentang konseling
 - c) Mengetahui setting dan kondisi sosial-psikologis penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.
 - d) Mengetahui pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling.

- e) Mengetahui tahapan penilaian layanan konseling dan hal-hal yang dinilai, baik dalam format konseling perorangan atau kelompok..
 - f) Mengetahui tanggung jawab konselor dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling
- 4) Pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling
- a) Mengetahui bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling
 - b) Mengetahui sanksi pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling
 - c) Mengetahui mekanisme penerapan sanksi terhadap konselor yang melanggar kode etik profesi bimbingan dan konseling
- 5) Dewan kode etik profesi
- a) Mengetahui adanya tingkatan dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling
 - b) Memahami tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling

d. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator

Setelah mengetahui indikator dari sub variabel, selanjutnya menjabarkan bagian deskriptor dari setiap indikator. Deskriptornya yaitu:

Tabel 3. Deskriptor Instrumen Penelitian

Sub Variabel	Indikator	Deskriptor
Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling	a. Mengetahui organisasi profesi, ranah pengembangan kemampuan, prinsip-prinsip dasar profesionalitas, dan tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling.	a. Mengetahui organisasi profesi dan anggota bimbingan dan konseling di Indonesia
		b. Mengetahui ranah pengembangan kemampuan anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling
		c. Memahami prinsip-prinsip dasar profesionalitas bagi konseli dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling
		d. Memahami tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling
	b. Mengetahui pengertian kode etik profesi, pentingnya etika organisasi, dan bentuk kode etik profesi bimbingan dan konseling	a. Memahami pengertian dan kewajiban mematuhi kode etik profesi
		b. Memahami pentingnya etika organisasi profesi bimbingan dan konseling
		c. Mengetahui isi kode etik profesi bimbingan dan konseling
	c. Mengetahui dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia	a. Memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia
		b. Memahami Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia
		c. Memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar

		hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia
		d. Memahami Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia
		e. Memahami Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) yang disusun dan diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai tahun 2003/2004 sebagai dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia
		f. Memahami Panduan Pengembangan diri yang disusun dan diberlakukan oleh Pusat Kurikulum Badan Pengembangan dan Penelitian Pendidikan tahun 2006 sebagai dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia
Kualifikasi guru bimbingan dan konseling, kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling.	a. Mengetahui kualifikasi, bidang program studi, dan pendidikan profesi pada guru bimbingan dan konseling	a. Memahami kualifikasi minimal akademik guru bimbingan dan konseling
		b. Memahami bidang program studi yang ditempuh sebagai kualifikasi guru bimbingan dan konseling
	b. Mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling	a. Memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani
		b. Menguasai landasan teoretik keilmuan pendidikan dan bimbingan dan konseling
		c. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap konseli
		d. Mengembangkan pribadi dan profesionalitas diri secara berkelanjutan
	c. Mengetahui kegiatan guru bimbingan dan konseling dalam	a. Memahami dinamika pelayanan sebagai praktik pelayanan bimbingan dan konseling secara umum
		b. Memahami praktik pelayanan bimbingan dan konseling secara

	menyelenggara kan layanan yang profesional	umum mengenai hubungan konselor dengan konseli
		c. Memahami praktik pelayanan bimbingan dan konseling pada unit kelembagaan
		d. Memahami praktik pelayanan bimbingan dan konseling pada unit keluarga
		e. Memahami praktik pelayanan bimbingan dan konseling secara mandiri, dukungan sejawat profesional konselor atau ahli lain.
	d. Mengetahui informasi, aplikasi instrumentasi, dan riset dalam kegiatan profesional guru bimbingan dan konseling	a. Memahami penyimpanan dan penggunaan informasi sebagai kegiatan profesional guru bimbingan dan konseling
		b. Memahami aplikasi instrumentasi sebagai kegiatan profesional guru bimbingan dan konseling
		c. Memahami riset sebagai kegiatan profesional guru bimbingan dan konseling
Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling	a. Mengetahui penghargaan dan keterbukaan guru bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan layanan	a. Memahami penghargaan konseli terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling
		b. Memahami kebenaran dan keterbukaan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling
	b. Mengetahui kerahasiaan dan pelibatan berbagi informasi tentang konseli.	a. Memahami kerahasiaan informasi tentang diri konseli.
		b. Memahami kerahasiaan informasi dalam bentuk rekaman data konseling
		c. Memahami kerahasiaan penggunaan informasi konseli untuk penelitian
		d. Memahami pelibatan pemberian informasi konseli dengan pihak lain
	c. Mengetahui setting dan kondisi sosial- psikologis penyelenggaraan layanan	a. Memahami suasana dan sarana fisik penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling
		b. Memahami kondisi sosial-psikologis dalam penyelenggaraan layanan konseling

	bimbingan dan konseling	
	d. Mengetahui pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling	a. Memahami berbagai pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling
	e. Mengetahui tahapan penilaian layanan konseling dan hal-hal yang dinilai, baik dalam format konseling perorangan atau kelompok.	a. Memahami laiseg, laiipen, dan laiipang sebagai tahapan penilaian setiap kali melakukan layanan bimbingan dan konseling b. Memahami aspek penilaian guru bimbingan dan konseling terhadap konseli setiap melakukan layanan bimbingan dan konseling perseorangan c. Memahami aspek penilaian guru bimbingan dan konseling terhadap konseli setiap melakukan layanan bimbingan dan konseling klasikal/ kelompok
	f. Mengetahui tanggung jawab konselor dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling	a. Memahami tanggung jawab konselor kepada konseli b. Memahami tanggung jawab konselor kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya c. Memahami tanggung jawab konselor kepada ilmu dan profesinya d. Memahami tanggung jawabnya kepada diri sendiri e. Memahami tanggung jawabnya kepada Tuhan yang Maha Esa
Pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling	a. Mengetahui bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling	a. Memahami pelanggaran yang dilakukan guru bimbingan dan konseling secara umum b. Memahami pelanggaran yang dilakukan guru bimbingan dan konseling terhadap konseli c. Memahami pelanggaran yang dilakukan terkait dengan lembaga tempat bekerja d. Memahami pelanggaran yang dilakukan guru bimbingan dan konseling terhadap rekan sejawat e. Memahami pelanggaran yang dilakukan terhadap organisasi profesi

	b. Mengetahui sanksi pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling	a. Memahami berbagai bentuk pemberian sanksi pelanggaran kepada konselor yang melanggar kode etik profesi bimbingan dan konseling
	c. Mengetahui mekanisme penerapan sanksi terhadap konselor yang melanggar kode etik profesi bimbingan dan konseling	b. Memahami lima tahapan penerapan sanksi yang melanggar kode etik profesi bimbingan dan konseling
Dewan kode etik profesi	a. Mengetahui adanya tingkatan dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling	a. Memahami ada dewan kode etik tingkat di nasional dan dewan kode etik tingkat di daerah
	b. Memahami tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling	a. Memahami tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi dalam menjaga tegaknya kode etik
		b. Memahami tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi dalam mengadakan verifikasi konselor yang melanggar kode etik profesi
		c. Memahami tugas dewan kode etik dalam menerima dan mempertimbangkan pembelaan dari konselor yang diadukan melanggar kode etik
		d. Memahami tugas dewan kode etik dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan sanksi kepada konselor yang melanggar kode etik
		e. Memahami tugas dewan kode etik sebagai saksi dalam pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling

		f. Memahami tugas dewan kode etik dalam pemberian sanksi bagi yang melanggar kode etik profesi bimbingan dan konseling
--	--	--

e. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen.

Perumusan butir butir instrumen disusun dalam kisi-kisi instrumen tes. Adapun kisi-kisi tes terlampir dalam lampiran 1.

f. Melengkapi instrumen dengan (pedoman atau instruksi) dan kata pengantar.

Tahap terakhir dalam penyusunan instrumen yaitu membuat pedoman atau instruksi tes. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan mengungkapkan ucapan terima kasih kepada responden dalam kata pengantar. Instruksi pengisian pada lembar soal tes, responden diminta memilih jawaban yang menurutnya benar atau salah dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia. Jika memilih jawaban salah, responden diminta membetulkan dari jawaban salahnya.

g. Uji-coba instrumen

Setelah penyusunan instrumen tes selesai, peneliti selanjutnya melakukan uji instrumen. Adapun pengujian instrumen sebagai berikut:

1) Uji vailiditas

Menurut Morissan, dkk (2012), uji validitas dilakukan agar instrumen penelitian dikatakan tepat dalam mengukur apa yang akan hendak diukur. Pengujian validitas instrumen tes dalam

penelitian ini menggunakan uji validitas konstruk. Menurut Sumarna (2005: 53), suatu alat ukur dikatakan valid apabila telah cocok dengan konstruksi teoritik dimana tes tersebut dibuat. Pengujian instrumen tes ini diuji ahli oleh dosen dari program studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Dr. Muh. Farozin, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi peneliti

2) Uji coba

Teknik uji coba yang dipakai oleh peneliti yaitu uji coba terpakai. Menurut Bernadette N. Setiadi, dkk (1998: 70), uji coba terpakai merupakan proses penelitian yang menggunakan subyek yang sama dengan subyek yang digunakan untuk menguji validitas alat tes pengukuran. Peserta yang digunakan dalam uji coba instrumen tes ini yaitu subyek penelitian itu sendiri.

3) Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap suatu hasil pengukuran. Dalam penelitian, suatu pengukuran konsisten dari satu waktu ke waktu yang lainnya, maka pengukuran tersebut dapat diandalkan dan dapat dipercaya (Morissan, dkk, 2012: 99). Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji reliabilitas *internal consistency* dengan teknik reliabilitas *Alpha Cronbach*. Menurut Sukardi (2011), pengujian konsistensi internal didasarkan untuk mengetahui keajekan dalam tes. Menurut Burhan Nurgiyantoro,

Gunawan, dan Marzuki (2004), teknik reliabilitas *Alpha Cronbach* dapat dipergunakan untuk instrumen yang jawabannya bersifat dikhotomis, yaitu jawaban benar (1) dan salah (0).

4) Analisis butir soal

Peneliti melakukan analisis butir soal dengan tujuan untuk mengetahui indeks tingkat kesulitan dan indeks daya beda tiap butir soal. Menurut Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki (2004), indeks tingkat kesulitan dan indeks daya beda tiap butir soal digunakan untuk mengetahui kualitas tiap butir item serta dapat dikatakan sebagai alat ukur yang baik karena telah mengukur setiap deskriptor dari indikator tertentu. Butir pernyataan dinyatakan layak dipakai dalam penelitian jika indeks tingkat kesulitan (ITK) maupun indeks daya beda (IDB) sama-sama memenuhi nilai interval indeks. Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki (2004: 357-359) memaparkan interval indeks tingkat kesulitan yang dinyatakan layak yaitu berkisar 0,15 – 0,85. Sedangkan interval indeks daya beda dinyatakan layak berkisar 0,20 – +1,00.

Cara untuk menghitung ITK yaitu mengambil sebagian dari lembar jawaban peserta sebanyak 27,5% peserta uji kelompok tinggi dan kelompok rendah, dan sisanya kelompok tengah ditinggalkan tidak untuk dianalisis. Adapun rumus untuk menghitung ITK menurut Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki (2004: 356) sebagai berikut

$$ITK = \frac{FKT + FKR}{N}$$

ITK : Indeks tingkat kesulitan yang dicari

FKT : Frekuensi jawaban benar kelompok tinggi

FKR : Frekuensi jawaban benar kelompok rendah

N : Jumlah peserta kedua kelompok (tinggi dan rendah)

Cara menghitung indeks daya beda yaitu dengan mengambil sebagian jumlah peserta menjadi kelompok tinggi atau kelompok rendah sebesar 27,5%. Adapun rumus untuk menghitung IDB menurut Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki (2004: 356) sebagai berikut

$$IDB = \frac{FKT - FKR}{n}$$

IDB : Indeks daya beda yang dicari

FKT : Frekuensi jawaban benar kelompok tinggi

FKR : Frekuensi jawaban benar kelompok rendah

n : Jumlah peserta kelompok tinggi atau rendah

h. Analisis uji-coba instrumen

Instrumen tes yang telah diuji-cobakan kemudian di analisis hasil reliabilitas dan analisis butir soal sehingga akan terlihat item mana yang gugur.

Kriteria yang dipergunakan dalam menentukan indeks reliabilitas instrumen mengacu pendapatnya Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki (2004: 352) yaitu nilai indeks reliabilitas 0,85

atau lebih. Dengan demikian apabila instrumen memiliki koefisien reliabilitas 0,85 ke bawah instrumen dinyatakan gugur.

Tabel 4. Hasil uji reliabilitas instrumen dengan *software* SPSS 17.0

Alpha Cronbach's	Indeks Reliabilitas	Reliabilitas	Jumlah Item
0,863	0,85	Reliabel	180

Instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena melebihi indeks reliabilitas 0,85. Selanjutnya melakukan analisis butir soal dengan tujuan untuk mengetahui layak/tidak layaknya tiap butir soal digunakan penelitian.

1) Indeks Tingkat Kesulitan

Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki (2004: 357) memaparkan interval indeks tingkat kesulitan yang dinyatakan layak yaitu berkisar 0,15 – 0,85. Jika indeks tingkat kesulitan semakin besar dan mendekati angka 1 (satu), maka soal tersebut dinyatakan sangat mudah (tidak layak). Sebaliknya, jika indeks tingkat kesulitan kecil dan mendekati 0 (nol), maka soal tersebut sangat sulit (tidak layak). Dengan demikian, apabila hasil penghitungan diluar kisaran angka indeks maka butir soal dinyatakan tidak layak atau gugur.

Tabel 5. Hasil Penghitungan Indeks Tingkat Kesulitan (ITK) dengan *Microsoft Excel 2013*

No	ITK	Keterangan	No	ITK	Keterangan
1	0,97	Tidak Layak	91	0,63	Layak
2	0,37	Layak	92	0,87	Tidak Layak
3	0,27	Layak	93	0,17	Layak
4	0,43	Layak	94	0,93	Tidak Layak

5	0,83	Layak	95	1,00	Tidak Layak
6	0,47	Layak	96	0,50	Layak
7	0,83	Layak	97	1,00	Tidak Layak
8	1,00	Tidak Layak	98	0,53	Layak
9	0,20	Layak	99	0,83	Layak
10	0,13	Tidak Layak	100	0,87	Tidak Layak
11	0,97	Tidak Layak	101	0,57	Layak
12	0,90	Tidak Layak	102	0,97	Tidak Layak
13	0,33	Layak	103	0,33	Layak
14	0,30	Layak	104	0,97	Tidak Layak
15	0,97	Tidak Layak	105	0,70	Layak
16	0,13	Tidak Layak	106	0,67	Layak
17	0,83	Layak	107	0,93	Tidak Layak
18	1,00	Tidak Layak	108	0,43	Layak
19	0,37	Layak	109	0,93	Tidak Layak
20	0,93	Tidak Layak	110	0,90	Tidak Layak
21	0,00	Tidak Layak	111	0,77	Layak
22	0,90	Tidak Layak	112	0,13	Tidak Layak
23	0,13	Tidak Layak	113	1,00	Tidak Layak
24	0,83	Layak	114	0,87	Tidak Layak
25	0,17	Layak	115	0,73	Layak
26	0,77	Layak	116	0,97	Tidak Layak
27	0,43	Layak	117	0,73	Layak
28	0,87	Tidak Layak	118	0,90	Tidak Layak
29	0,63	Layak	119	0,87	Tidak Layak
30	0,63	Layak	120	0,90	Tidak Layak
31	0,93	Tidak Layak	121	0,13	Tidak Layak
32	0,53	Layak	122	0,70	Layak
33	0,20	Layak	123	0,70	Layak
34	0,67	Layak	124	0,73	Layak
35	0,93	Tidak Layak	125	0,97	Tidak Layak
36	0,23	Layak	126	0,57	Layak
37	0,27	Layak	127	0,80	Layak
38	0,73	Layak	128	0,83	Layak
39	0,67	Layak	129	0,57	Layak
40	0,23	Layak	130	0,97	Tidak Layak
41	0,87	Tidak Layak	131	0,97	Tidak Layak
42	0,63	Layak	132	0,97	Tidak Layak
43	0,83	Layak	133	0,17	Layak
44	0,57	Layak	134	0,97	Tidak Layak
45	0,87	Tidak Layak	135	0,97	Tidak Layak
46	1,00	Tidak Layak	136	0,73	Layak

47	0,63	Layak	137	0,90	Tidak Layak
48	0,80	Layak	138	1,00	Tidak Layak
49	0,97	Tidak Layak	139	0,73	Layak
50	0,60	Layak	140	0,97	Tidak Layak
51	0,93	Tidak Layak	141	0,70	Layak
52	0,97	Tidak Layak	142	0,83	Layak
53	1,00	Tidak Layak	143	0,93	Tidak Layak
54	0,50	Layak	144	0,53	Layak
55	0,13	Tidak Layak	145	0,93	Tidak Layak
56	1,00	Tidak Layak	146	0,87	Tidak Layak
57	0,23	Layak	147	0,80	Layak
58	0,63	Layak	148	0,63	Layak
59	1,00	Tidak Layak	149	1,00	Tidak Layak
60	0,93	Tidak Layak	150	0,70	Layak
61	0,17	Layak	151	0,97	Tidak Layak
62	0,73	Layak	152	0,77	Layak
63	0,90	Tidak Layak	153	0,73	Layak
64	0,70	Layak	154	0,47	Layak
65	0,97	Tidak Layak	155	0,77	Layak
66	0,47	Layak	156	0,83	Layak
67	0,97	Tidak Layak	157	0,10	Tidak Layak
68	0,63	Layak	158	0,83	Layak
69	0,87	Layak	159	0,40	Layak
70	0,93	Tidak Layak	160	0,77	Layak
71	0,83	Layak	161	0,17	Layak
72	0,27	Layak	162	0,57	Layak
73	0,83	Layak	163	0,07	Tidak Layak
74	0,60	Layak	164	0,93	Tidak Layak
75	0,97	Tidak Layak	165	0,83	Layak
76	0,97	Tidak Layak	166	0,43	Layak
77	0,97	Tidak Layak	167	0,90	Tidak Layak
78	0,47	Layak	168	0,90	Tidak Layak
79	0,97	Tidak Layak	169	0,37	Layak
80	0,87	Tidak Layak	170	0,83	Layak
81	0,73	Layak	171	0,93	Tidak Layak
82	0,63	Layak	172	0,80	Layak
83	0,97	Tidak Layak	173	0,83	Layak
84	0,43	Layak	174	0,37	Layak
85	0,33	Layak	175	0,73	Layak
86	0,83	Layak	176	0,63	Layak
87	0,97	Tidak Layak	177	0,77	Layak
88	0,23	Layak	178	0,83	Layak

89	0,77	Layak	179	0,20	Layak
90	0,70	Layak	180	0,30	Layak

Berdasarkan tabel 5. di atas diperoleh hasil penghitungan indeks tingkat kesulitan dari instrumen tes yang telah diuji cobakan yaitu sebanyak 105 soal yang layak atau memenuhi kisaran angka indeks, sedangkan 75 soal tidak layak karena mendekati angka indeks 1 (satu) dan 0 (nol).

2) Indeks Daya Beda

Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki (2004: 359) menyatakan interval indeks daya beda secara teoritis berkisar -1,00 – +1,00. Apabila indeks daya beda mendekati bilangan 0 (nol) atau negatif dinyatakan tidak layak. Butir item dinyatakan layak apabila interval indeks daya beda berkisar 0,20 – +1,00. Dengan demikian, apabila hasil penghitungan diluar kisaran angka indeks maka butir soal dinyatakan tidak layak atau gugur.

Tabel 6. Hasil Penghitungan Indeks Daya Beda dengan *Microsoft Excel 2013*

No	IDB	Keterangan	No	IDB	Keterangan
1	0,07	Tidak Layak	91	0,07	Tidak Layak
2	0,47	Layak	92	0,13	Tidak Layak
3	0,13	Tidak Layak	93	0,33	Layak
4	0,07	Layak	94	0,13	Tidak Layak
5	0,33	Layak	95	0,00	Tidak Layak
6	0,00	Tidak Layak	96	0,20	Layak
7	0,33	Layak	97	0,00	Tidak Layak
8	0,00	Tidak Layak	98	0,27	Layak
9	0,00	Tidak Layak	99	-0,07	Tidak Layak
10	-0,13	Tidak Layak	100	0,13	Tidak Layak
11	0,07	Tidak Layak	101	0,33	Layak
12	-0,07	Tidak Layak	102	0,07	Tidak Layak
13	0,13	Tidak Layak	103	0,27	Layak

14	0,33	Layak	104	0,07	Tidak Layak
15	0,07	Tidak Layak	105	0,20	Layak
16	0,13	Tidak Layak	106	0,13	Tidak Layak
17	0,33	Layak	107	0,13	Tidak Layak
18	0,00	Tidak Layak	108	0,33	Layak
19	0,33	Layak	109	0,13	Tidak Layak
20	0,13	Tidak Layak	110	0,20	Layak
21	0,00	Tidak Layak	111	0,33	Layak
22	0,20	Layak	112	0,13	Tidak Layak
23	0,00	Tidak Layak	113	0,00	Tidak Layak
24	0,20	Layak	114	0,27	Layak
25	0,33	Layak	115	0,40	Layak
26	-0,20	Tidak Layak	116	0,07	Tidak Layak
27	-0,07	Tidak Layak	117	0,27	Layak
28	0,27	Layak	118	0,07	Tidak Layak
29	0,47	Layak	119	0,00	Tidak Layak
30	-0,07	Tidak Layak	120	-0,07	Tidak Layak
31	0,00	Tidak Layak	121	-0,13	Tidak Layak
32	0,00	Tidak Layak	122	0,20	Layak
33	0,27	Layak	123	0,47	Layak
34	-0,13	Tidak Layak	124	0,13	Tidak Layak
35	0,13	Tidak Layak	125	0,07	Tidak Layak
36	0,47	Layak	126	0,47	Layak
37	0,27	Layak	127	-0,13	Tidak Layak
38	0,40	Layak	128	0,07	Tidak Layak
39	0,13	Tidak Layak	129	0,60	Layak
40	0,07	Tidak Layak	130	0,07	Tidak Layak
41	0,00	Tidak Layak	131	-0,07	Tidak Layak
42	0,20	Layak	132	0,07	Tidak Layak
43	-0,20	Tidak Layak	133	0,33	Layak
44	0,47	Layak	134	0,07	Tidak Layak
45	0,27	Layak	135	0,07	Tidak Layak
46	0,00	Tidak Layak	136	0,53	Layak
47	0,47	Layak	137	0,07	Tidak Layak
48	-0,13	Tidak Layak	138	0,00	Tidak Layak
49	0,07	Tidak Layak	139	0,40	Layak
50	0,27	Layak	140	0,07	Tidak Layak
51	0,13	Tidak Layak	141	0,20	Layak
52	-0,07	Tidak Layak	142	0,20	Layak
53	0,00	Tidak Layak	143	0,00	Tidak Layak
54	0,60	Layak	144	0,53	Layak
55	0,13	Tidak Layak	145	0,00	Tidak Layak

56	0,00	Tidak Layak	146	0,27	Layak
57	0,20	Layak	147	0,27	Layak
58	0,47	Layak	148	0,33	Layak
59	0,00	Tidak Layak	149	0,00	Tidak Layak
60	0,13	Tidak Layak	150	-0,33	Tidak Layak
61	0,20	Layak	151	-0,07	Tidak Layak
62	0,13	Tidak Layak	152	0,20	Layak
63	0,20	Layak	153	0,13	Tidak Layak
64	0,47	Layak	154	0,40	Layak
65	-0,07	Tidak Layak	155	-0,07	Tidak Layak
66	0,53	Layak	156	-0,07	Tidak Layak
67	-0,07	Tidak Layak	157	0,07	Tidak Layak
68	0,20	Layak	158	0,20	Layak
69	0,00	Tidak Layak	159	0,27	Layak
70	0,13	Tidak Layak	160	0,33	Layak
71	-0,07	Tidak Layak	161	0,07	Tidak Layak
72	0,00	Tidak Layak	162	0,33	Layak
73	0,33	Layak	163	0,13	Tidak Layak
74	0,40	Layak	164	0,00	Tidak Layak
75	0,07	Tidak Layak	165	0,20	Layak
76	0,07	Tidak Layak	166	0,33	Layak
77	0,07	Tidak Layak	167	0,20	Layak
78	0,27	Layak	168	0,20	Layak
79	0,07	Tidak Layak	169	0,33	Layak
80	0,27	Layak	170	0,07	Tidak Layak
81	-0,40	Tidak Layak	171	0,00	Tidak Layak
82	0,47	Layak	172	0,13	Tidak Layak
83	0,07	Tidak Layak	173	0,20	Layak
84	0,73	Layak	174	0,07	Tidak Layak
85	0,13	Tidak Layak	175	0,00	Tidak Layak
86	0,33	Layak	176	0,20	Layak
87	0,07	Tidak Layak	177	0,07	Tidak Layak
88	0,07	Tidak Layak	178	0,07	Tidak Layak
89	0,47	Layak	179	0,13	Tidak Layak
90	0,33	Layak	180	0,20	Layak

Berdasarkan tabel 6. di atas diperoleh hasil penghitungan indeks daya beda dari instrumen tes yang telah diuji cobakan yaitu sebanyak 76 soal yang layak atau memenuhi kisaran angka

indeks, sedangkan 104 soal tidak layak karena mendekati angka indeks 0 (nol) dan negatif.

3) Indeks Tingkat Kesulitan dan Indeks Daya Beda

Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki (2004: 359) menyatakan bahwa butir soal pernyataan dinyatakan layak digunakan untuk data penelitian apabila memenuhi persyaratan indeks tingkat kesulitan dan daya beda yang sama. Adapun hasil analisis butir soal ITK dan IDB sebagai berikut

Tabel 7. Analisis Butir Soal ITK dan IDB

No	ITK	Keterangan	IDB	Keterangan	Analisis
1	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
2	0,37	Layak	0,47	Layak	Layak
3	0,27	Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
4	0,43	Layak	0,07	Layak	Layak
5	0,83	Layak	0,33	Layak	Layak
6	0,47	Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
7	0,83	Layak	0,33	Layak	Layak
8	1,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
9	0,20	Layak	0,00	Tidak Layak	Layak
10	0,13	Tidak Layak	-0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
11	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
12	0,90	Tidak Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
13	0,33	Layak	0,13	Tidak Layak	Layak
14	0,30	Layak	0,33	Layak	Layak
15	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
16	0,13	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
17	0,83	Layak	0,33	Layak	Layak
18	1,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
19	0,37	Layak	0,33	Layak	Layak
20	0,93	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
21	0,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
22	0,90	Tidak Layak	0,20	Layak	Layak
23	0,13	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
24	0,83	Layak	0,20	Layak	Layak
25	0,17	Layak	0,33	Layak	Layak
26	0,77	Layak	-0,20	Tidak Layak	Tidak Layak
27	0,43	Layak	-0,07	Tidak Layak	Layak
28	0,87	Tidak Layak	0,27	Layak	Tidak Layak

29	0,63	Layak	0,47	Layak	Layak
30	0,63	Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
31	0,93	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
32	0,53	Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
33	0,20	Layak	0,27	Layak	Layak
34	0,67	Layak	-0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
35	0,93	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
36	0,23	Layak	0,47	Layak	Layak
37	0,27	Layak	0,27	Layak	Layak
38	0,73	Layak	0,40	Layak	Layak
39	0,67	Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
40	0,23	Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
41	0,87	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
42	0,63	Layak	0,20	Layak	Layak
43	0,83	Layak	-0,20	Tidak Layak	Tidak Layak
44	0,57	Layak	0,47	Layak	Layak
45	0,87	Tidak Layak	0,27	Layak	Tidak Layak
46	1,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
47	0,63	Layak	0,47	Layak	Layak
48	0,80	Layak	-0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
49	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
50	0,60	Layak	0,27	Layak	Layak
51	0,93	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
52	0,97	Tidak Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
53	1,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
54	0,50	Layak	0,60	Layak	Layak
55	0,13	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
56	1,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
57	0,23	Layak	0,20	Layak	Layak
58	0,63	Layak	0,47	Layak	Layak
59	1,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
60	0,93	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
61	0,17	Layak	0,20	Layak	Layak
62	0,73	Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
63	0,90	Tidak Layak	0,20	Layak	Tidak Layak
64	0,70	Layak	0,47	Layak	Layak
65	0,97	Tidak Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
66	0,47	Layak	0,53	Layak	Layak
67	0,97	Tidak Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
68	0,63	Layak	0,20	Layak	Layak
69	0,87	Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
70	0,93	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
71	0,83	Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
72	0,27	Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
73	0,83	Layak	0,33	Layak	Layak
74	0,60	Layak	0,40	Layak	Layak

75	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
76	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
77	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
78	0,47	Layak	0,27	Layak	Layak
79	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
80	0,87	Tidak Layak	0,27	Layak	Tidak Layak
81	0,73	Layak	-0,40	Tidak Layak	Tidak Layak
82	0,63	Layak	0,47	Layak	Layak
83	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
84	0,43	Layak	0,73	Layak	Layak
85	0,33	Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
86	0,83	Layak	0,33	Layak	Layak
87	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
88	0,23	Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
89	0,77	Layak	0,47	Layak	Layak
90	0,70	Layak	0,33	Layak	Layak
91	0,63	Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
92	0,87	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
93	0,17	Layak	0,33	Layak	Layak
94	0,93	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
95	1,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
96	0,50	Layak	0,20	Layak	Layak
97	1,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
98	0,53	Layak	0,27	Layak	Layak
99	0,83	Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
100	0,87	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
101	0,57	Layak	0,33	Layak	Layak
102	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
103	0,33	Layak	0,27	Layak	Layak
104	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
105	0,70	Layak	0,20	Layak	Layak
106	0,67	Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
107	0,93	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
108	0,43	Layak	0,33	Layak	Layak
109	0,93	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
110	0,90	Tidak Layak	0,20	Layak	Tidak Layak
111	0,77	Layak	0,33	Layak	Layak
112	0,13	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
113	1,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
114	0,87	Tidak Layak	0,27	Layak	Tidak Layak
115	0,73	Layak	0,40	Layak	Layak
116	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
117	0,73	Layak	0,27	Layak	Layak
118	0,90	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
119	0,87	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
120	0,90	Tidak Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak

121	0,13	Tidak Layak	-0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
122	0,70	Layak	0,20	Layak	Layak
123	0,70	Layak	0,47	Layak	Layak
124	0,73	Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
125	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
126	0,57	Layak	0,47	Layak	Layak
127	0,80	Layak	-0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
128	0,83	Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
129	0,57	Layak	0,60	Layak	Layak
130	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
131	0,97	Tidak Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
132	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
133	0,17	Layak	0,33	Layak	Layak
134	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
135	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
136	0,73	Layak	0,53	Layak	Layak
137	0,90	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
138	1,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
139	0,73	Layak	0,40	Layak	Layak
140	0,97	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
141	0,70	Layak	0,20	Layak	Layak
142	0,83	Layak	0,20	Layak	Layak
143	0,93	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
144	0,53	Layak	0,53	Layak	Layak
145	0,93	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
146	0,87	Tidak Layak	0,27	Layak	Tidak Layak
147	0,80	Layak	0,27	Layak	Layak
148	0,63	Layak	0,33	Layak	Layak
149	1,00	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
150	0,70	Layak	-0,33	Tidak Layak	Tidak Layak
151	0,97	Tidak Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
152	0,77	Layak	0,20	Layak	Layak
153	0,73	Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
154	0,47	Layak	0,40	Layak	Layak
155	0,77	Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
156	0,83	Layak	-0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
157	0,10	Tidak Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
158	0,83	Layak	0,20	Layak	Layak
159	0,40	Layak	0,27	Layak	Layak
160	0,77	Layak	0,33	Layak	Layak
161	0,17	Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
162	0,57	Layak	0,33	Layak	Layak
163	0,07	Tidak Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
164	0,93	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
165	0,83	Layak	0,20	Layak	Layak
166	0,43	Layak	0,33	Layak	Layak

167	0,90	Tidak Layak	0,20	Layak	Tidak Layak
168	0,90	Tidak Layak	0,20	Layak	Tidak Layak
169	0,37	Layak	0,33	Layak	Layak
170	0,83	Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
171	0,93	Tidak Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
172	0,80	Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
173	0,83	Layak	0,20	Layak	Layak
174	0,37	Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
175	0,73	Layak	0,00	Tidak Layak	Tidak Layak
176	0,63	Layak	0,20	Layak	Layak
177	0,77	Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
178	0,83	Layak	0,07	Tidak Layak	Tidak Layak
179	0,20	Layak	0,13	Tidak Layak	Tidak Layak
180	0,30	Layak	0,20	Layak	Layak

Tabel 7. di atas menjelaskan bahwa analisis butir soal berdasarkan angka kelayakan dari indeks tingkat kesulitan dan indeks daya beda. Hasil dari analisis tersebut adalah 71 soal dinyatakan layak digunakan untuk data penelitian, sedangkan 109 soal tidak layak/gugur sehingga tidak dapat digunakan untuk data penelitian.

i. Revisi item tes

Instrumen direvisi sesuai dengan hasil analisis butir soal dengan cara pengurangan soal yang tidak layak atau dinyatakan gugur. Adapun hasil revisi instrumen kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut.

Tabel 8. Rangkuman Uji Instrumen Tes Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

No	Aspek	Nomer butir soal sebelum uji instrumen	Jml	Nomer butir soal setelah uji instrumen	Jml	Ket
1	Dasar Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	1*,2,3*,4*,5,6*,7,8*,9,10*,11*,12*,13,14,15*,16*,17,18*,1	42	2,4,5,7,9,13,14,17,19,22,24,25,27,29,33,36,37,38,42	19	Item no 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23,

		9,20*,21*,2 2,23*,24,25, 26*,27,28*, 29,30*,31*, 32*,33,34*, 35*,36,37,3 8,39*,40*,4 1*,42				26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, dan 41 gugur
2	Kualifikasi Guru Bimbingan dan konseling; Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling; dan Kegiatan Profesional Bimbingan dan Konseling	43*,44,45*, 46*,47,48*, 49*,50,51*, 52*,53*,54, 55*,56*,57, 58,59*,60*, 61,62*,63*, 64,65*,66,6 7*,68,69*,7 0*,71*,72*, 73,74,75*,7 6*,77*,78,7 9*,80*,81*, 82,83*,84,8 5*	43	44,47,50,54,57, 58,61,64,66,68, 73,74,78,82,84	15	Item no 43, 45, 46, 48, 49, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, dan 85 gugur
3	Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling	86,87*,88*, 89,90,91*,9 2*,93,94*,9 5*,96,97*,9 8,99*,100*, 101,102*,10 3,104*,105, 106*,107*,1 08,109*,110 *,111,112*, 113*,114*,1 15,116*,117 ,118*,119*, 120*,121*,1 22,123,124*, ,125*,126,1 27*,128*,12 9,130*,131*, ,132*,133,1 34*,135*,13 6,137*	52	86,89,90,93,96, 98,101,103,105, 108,111,115,11 7,122,123,126,1 29,133,136	19	Item no 87, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, dan 137 gugur

4	Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Profesi BK	138*,139,140*,141,142,143*,144,145*,146*,147,148,149*,150*,151*,152,153*,154,155*,156*,157*,158,159	22	139,141,142,144,147,148,152,154,158,159	10	Item no 140, 143, 145, 149, 150, 151, 153, 155, 156, dan 157 gugur
5	Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi BK	160,161*,162,163*,164*,165,166,167*,168*,169,170*,171*,172*,173,174*,175*,176,177*,178*,179*,180	21	160,162,165,166,169,173,176,180	8	Item no 161, 163, 164, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 178, dan 179 gugur
Jumlah Item			180	Jumlah Item	71	

Keterangan: * = Item dinyatakan gugur

Berdasarkan tabel 8. jumlah soal sebelum uji instrumen sebanyak 180 soal. Setelah melakukan uji instrumen, jumlah soal menjadi 71 dengan butir soal yang dapat digunakan dalam data penelitian ini yaitu 2, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 36, 37, 38, 42, 44, 47, 50, 54, 57, 58, 61, 64, 66, 68, 73, 74, 78, 82, 84, 86, 89, 90, 93, 96, 98, 101, 103, 105, 108, 111, 115, 117, 122, 123, 126, 129, 133, 136, 139, 141, 142, 144, 147, 148, 152, 154, 158, 159, 160, 162, 165, 166, 169, 173, 176, dan 180. Butir soal yang gugur dalam data penelitian ini yaitu 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 125,

127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 140, 143, 145, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 161, 163, 164, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 178, dan 179 dengan jumlah soal sebanyak 109

F. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mencatat skor secara sistematis dari hasil tes yang didapat, selanjutnya melakukan analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu bersifat kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif dan bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Menurut Suharsimi Arikunto (2010), teknik statistik deskriptif yaitu teknik pengolahan data dengan tujuan menganalisis dan menggambarkan data dengan penghitungan *modus*, *median*, *mean*, dan standar deviasi. Penjelasan lain menurut Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki (2004: 8) mengenai statistik deskriptif yaitu teknik yang memberikan informasi data yang dimiliki tidak bermaksud untuk menugji hipotesis, tetapi untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna disertai penghitungan “sederhana” yang bersifat lebih memperjelas keadaan atau karakteristik data. Penghitungan sederhana yang dimaksud yaitu penghitungan skor, nilai, skor tertinggi dan terendah, *modus*, *mean*, *median*, dan simpangan baku. Setelah melakukan penghitungan, skor disajikan dan disusun dalam distribusi frekuensi dengan tujuan agar data mudah dipahami. Setelah disusun, data ditabulasikan ke dalam bentuk tabel dan grafis untuk melihat gambaran secara komprehensif.

Data yang telah diperoleh akan dikategorisasikan dengan menginterpretasi skor berdasarkan posisi skor terhadap suatu norma (*mean*)

sehingga hasil ukur yang berupa angka (kuantitatif) dapat diinterpretasikan secara kualitatif. Adapun cara untuk menentukan kategori skor dipergunakan norma sebagai berikut:

$$X \geq (\mu + 1,0\sigma) = \text{Tinggi}$$

$$(\mu - 1,0\sigma) \leq X < (\mu + 1,0\sigma) = \text{Sedang}$$

$$(\mu - 1,0\sigma) < X = \text{Rendah}$$

Penghitungan besarnya *mean* teoritik dan simpangan baku digunakan rumus sebagai berikut (Saifuddin Azwar, 2013):

$$\mu = \text{Mean ideal yang dicapai instrumen}$$

$$= \frac{1}{2} (\text{skor tertinggi} + \text{skor terendah})$$

$$\sigma = \text{Simpangan baku yang dicapai instrumen}$$

$$= \frac{1}{6} (\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah})$$

Model analisis Miles dan Huberman dimana langkah-langkah analisis sebagai berikut (Sugiyono, 2008: 247-252)

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tem dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. *Display Data* (Penyajian data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, mudah dipahami, dan dapat

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Kesimpulan dalam data kualitatif ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi, Waktu dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul. Terdapat 17 SMP Negeri di Kabupaten Bantul yang menjadi kelompok kerja di tiap kecamatan yaitu SMP N 1 Srandakan, SMP N 1 Sewon, SMP N 1 Sedayu, SMP N 1 Sanden, SMP N 1 Pundong, SMP N 1 Pleret SMP N 1 Piyungan, SMP N 1 Pandak, SMP N 1 Pajangan, SMP N 1 Kretek, SMP N 1 Kasihan, SMP N 1 Jetis, SMP N 1 Imogiri, SMP N 1 Dlingo, SMP N 1 Bantul, SMP N 1 Bambanglipuro, SMP N 1 Banguntapan. Waktu penelitian dimulai tanggal 19 Mei 2016 s.d. 24 Juni 2016. Subyek penelitian adalah populasi guru bimbingan dan konseling yang berjumlah 52 guru bimbingan dan konseling dengan ijazah 48 Program Studi BK dan 4 Program Studi Non-BK. Pengambilan data menggunakan alat tes benar-salah dengan pembetulan mengenai kode etik profesi bimbingan dan konseling.

2. Deskripsi Hasil Data Penelitian Kuantitatif Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Deskripsi hasil penelitian kuantitatif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu deskripsi terhadap hasil penelitian variabel pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling dan hasil penelitian pada setiap sub variabel yang kemudian dikategorisasikan sesuai dengan teknik analisis data yang dipaparkan pada bab sebelumnya.

a. Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Hasil penilaian dari tes benar-salah mengenai pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling dengan deskripsi nilai sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Perhitungan Pemahaman kode etik profesi BK

Total Skor	2245
Rataan statistik	43,17
Simpangan Baku Statistik	11,34
Median	47
Modus	47
Skor tertinggi	60
Skor terendah	13
Rataan ideal	36,5
Simpangan baku ideal	7,83

Menentukan skor kategori tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling secara keseluruhan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rataan ideal} + \text{simpangan baku ideal}$$

$$\text{Rataan ideal} - \text{simpangan baku ideal}$$

Adapun hasil kategori yang didapat yaitu 28,7 dan 44,3. Nilai tergolong rendah apabila $< 28,7$ dan nilai tergolong tinggi apabila $> 44,3$ sehingga skor dapat dikategorikan menjadi:

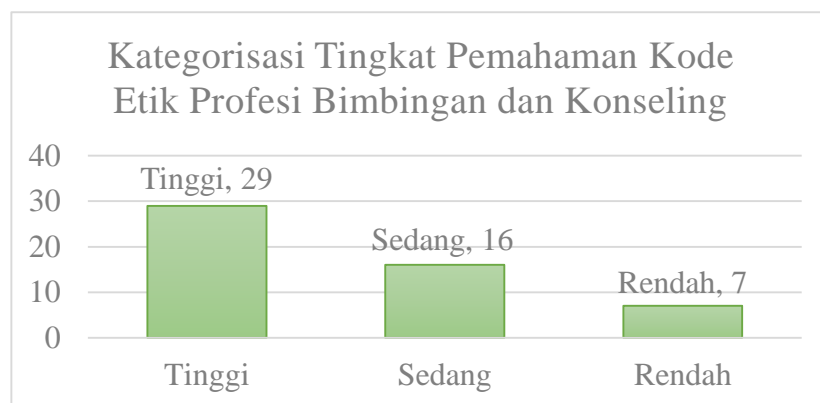
Tabel 10. Skor Kategori Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi BK

Kategori	Interval
Tinggi	$X \geq 44,3$
Sedang	$28,7 < X \leq 44,3$
Rendah	$28,7 < X$

Gambaran distribusi frekuensi kategorisasi tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling disajikan dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman kode etik profesi BK

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 44,3$	Tinggi	29	55,77
2	$28,7 < X \leq 44,3$	Sedang	16	30,77
3	$28,7 < X$	Rendah	7	13,46
Jumlah			52	100%



Gambar 1. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada kategori tinggi sejumlah 29 guru bimbingan dan konseling (55,77%), kategori sedang dengan jumlah guru bimbingan dan konseling 16 (30,77%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 7 (13,46%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru

bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling kategori **tinggi**.

b. Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Tiap Aspek

1) Dasar Kode Etik Profesi BK

Hasil penilaian dari tes benar-salah mengenai dasar kode etik profesi BK dengan deskripsi nilai sebagai berikut:

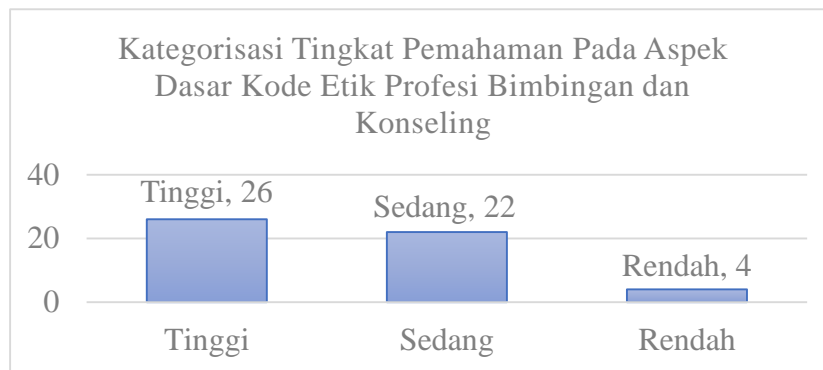
Tabel 12. Hasil Perhitungan Pemahaman Dasar Kode Etik Profesi BK

Total Skor	535
Rataan statistik	10,29
Simpangan Baku Statistik	3,07
Median	10,5
Modus	10
Skor tertinggi	16
Skor terendah	1
Rataan ideal	8
Simpangan baku ideal	2,33

Gambaran distribusi frekuensi kategorisasi tingkat pemahaman dasar kode etik profesi BK disajikan dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Dasar Kode Etik profesi BK

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 11$	Tinggi	26	50
2	$6 < X \leq 11$	Sedang	22	42,3
3	$6 < X$	Rendah	4	7,7
Jumlah			52	100%



Gambar 2. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada Aspek Dasar Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman pada aspek dasar kode etik profesi BK dalam kategori tinggi sejumlah 26 guru bimbingan dan konseling (50%), kategori sedang dengan jumlah guru bimbingan dan konseling 22 (42,3%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 5 (7,7%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman dalam aspek dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling pada kategori **tinggi**.

2) Kualifikasi Guru BK; Kompetensi Guru BK; dan Kegiatan Profesional BK

Hasil penilaian dari tes benar-salah mengenai kualifikasi guru BK; kompetensi guru BK; dan kegiatan profesional BK dengan deskripsi nilai sebagai berikut:

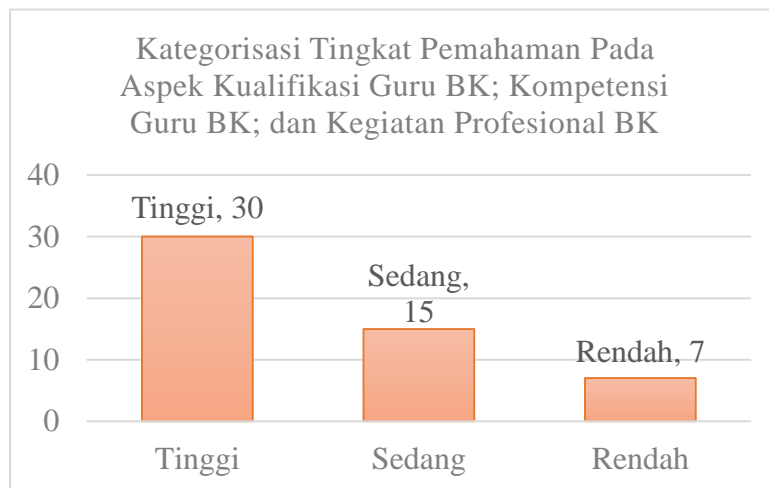
Tabel 14. Hasil Perhitungan Pemahaman Kualifikasi Guru BK; Kompetensi Guru BK; dan Kegiatan Profesional BK

Total Skor	463
Rataan statistik	8,9
Simpangan Baku Statistik	3,43
Median	9
Modus	8
Skor tertinggi	13
Skor terendah	0
Rataan ideal	6,5
Simpangan baku ideal	2,17

Gambaran distribusi frekuensi kategorisasi tingkat pemahaman kualifikasi guru BK; kompetensi guru BK; dan kegiatan profesional BK disajikan dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman kualifikasi Guru BK; Kompetensi guru BK; dan Kegiatan Profesional BK

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 8,67$	Tinggi	30	57,7
2	$4,33 < X \leq 8,67$	Sedang	15	28,8
3	$4,33 < X$	Rendah	7	13,5
Jumlah			52	100%



Gambar 3. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada Aspek Kualifikasi Guru BK; Kompetensi Guru BK; dan Kegiatan Profesional BK

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman pada aspek kualifikasi guru BK; kompetensi guru BK; dan kegiatan profesional BK dalam kategori tinggi sejumlah 30 guru bimbingan dan konseling (57,7%), kategori sedang dengan jumlah guru bimbingan dan konseling 15 (28,8%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 7 (13,5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman pada aspek kualifikasi guru BK; kompetensi guru BK; dan kegiatan profesional BK pada kategori **tinggi**.

3) Pelaksanaan Pelayanan BK

Hasil penilaian dari tes benar-salah mengenai pelaksanaan pelayanan BK dengan deskripsi nilai sebagai berikut:

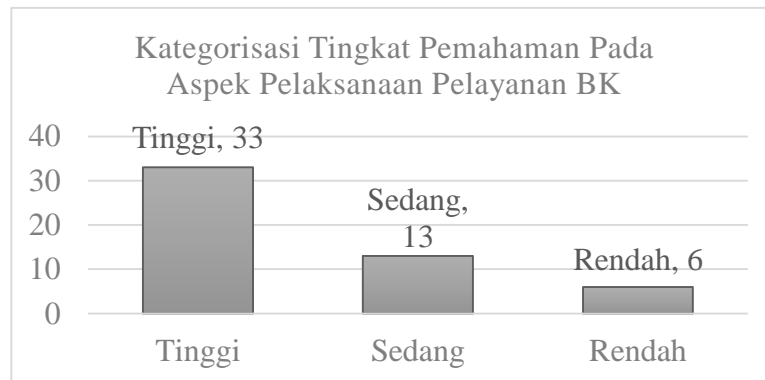
Tabel 16. Hasil Perhitungan Pemahaman Pelaksanaan Pelayanan BK

Total Skor	640
Rataan statistik	12,31
Simpangan Baku Statistik	4,05
Median	13
Modus	14
Skor tertinggi	19
Skor terendah	1
Rataan ideal	10
Simpangan baku ideal	3

Gambaran distribusi frekuensi kategorisasi tingkat pemahaman pelaksanaan pelayanan BK disajikan dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Pelaksanaan Pelayanan BK

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 13$	Tinggi	33	63,5
2	$7 < X \leq 13$	Sedang	13	25
3	$7 < X$	Rendah	6	11,5
Jumlah			52	100%



Gambar 4. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada Aspek Pelaksanaan Pelayanan BK

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman pada aspek pemahaman pelaksanaan pelayanan BK dalam kategori tinggi sejumlah 33 guru bimbingan dan konseling (63,5%), kategori sedang dengan jumlah guru bimbingan dan konseling 13 (25%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 6 (11,5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman dalam aspek pemahaman pelaksanaan pelayanan BK pada kategori **tinggi**.

4) Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Profesi BK

Hasil penilaian dari tes benar-salah mengenai pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK dengan deskripsi nilai sebagai berikut:

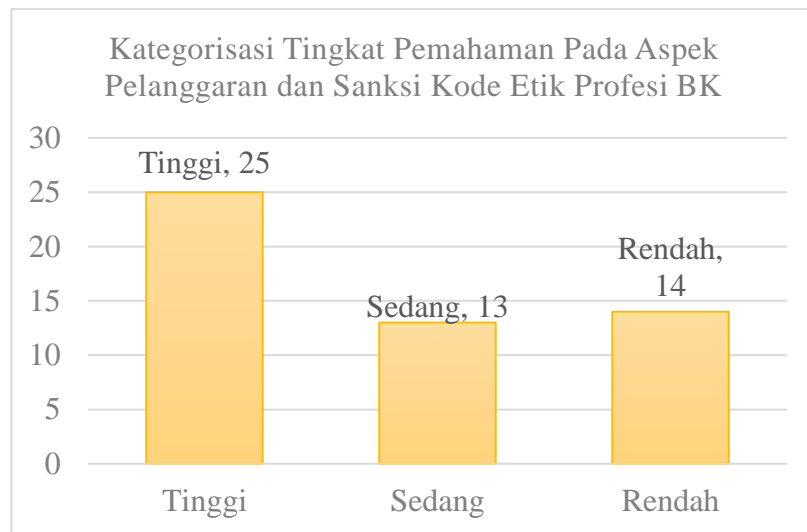
Tabel 18. Hasil Perhitungan Pemahaman Pelanggaran dan Sanksi
Kode Etik profesi BK

Total Skor	356
Rataan statistik	6,85
Simpangan Baku Statistik	1,93
Median	7
Modus	87
Skor tertinggi	10
Skor terendah	3
Rataan ideal	6,5
Simpangan baku ideal	1,17

Gambaran distribusi frekuensi kategorisasi tingkat pemahaman pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK disajikan dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman
Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Profesi BK

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 7,67$	Tinggi	25	48,08
2	$5,33 < X \leq 7,67$	Sedang	13	25
3	$5,33 < X$	Rendah	14	26,92
Jumlah			52	100%



Gambar 5. Kategorisasi Tingkat Pada Aspek Pemahaman Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Profesi BK

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman pada aspek pemahaman pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK dalam kategori tinggi sejumlah 25 guru bimbingan dan konseling (48,08%), kategori sedang dengan jumlah guru bimbingan dan konseling 13 (25%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 14 (26,92%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman dalam aspek pemahaman pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK pada kategori **tinggi**.

5) Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi BK

Hasil penilaian dari tes benar-salah mengenai tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK dengan deskripsi nilai sebagai berikut:

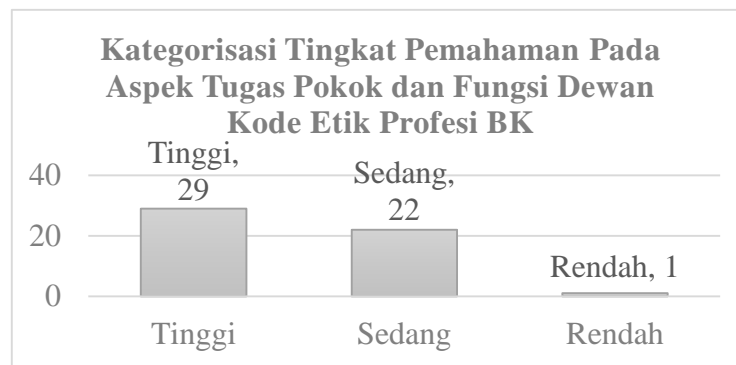
Tabel 20. Hasil Perhitungan Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi BK

Total Skor	251
Rataan statistik	4,83
Simpangan Baku Statistik	1,48
Median	5
Modus	4
Skor tertinggi	7
Skor terendah	0
Rataan ideal	3,5
Simpangan baku ideal	1,17

Gambaran distribusi frekuensi kategorisasi tingkat pemahaman tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK disajikan dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 21. Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Tingkat Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi BK

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X \geq 4,67$	Tinggi	29	55,77
2	$2,33 < X \leq 4,67$	Sedang	22	42,31
3	$2,33 < X$	Rendah	1	1,92
Jumlah			52	100%



Gambar 6. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Pada Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kode Etik Profesi BK

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki pemahaman pada aspek pemahaman tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK dalam kategori tinggi sejumlah 29 guru bimbingan dan konseling (55,77%), kategori sedang dengan jumlah guru bimbingan dan konseling 22 (42,31%) sedangkan pada kategori rendah sejumlah 1 (1,92%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman dalam aspek tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK pada kategori **tinggi**.

3. Deskripsi Hasil Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Deskripsi hasil penelitian kualitatif mengenai pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu dengan cara:

- a. Mereduksi data alasan salah yang tidak sesuai dengan soal pernyataan (Lampiran 5)

- b. Mendisplay data alasan salah dari setiap responden.
 - c. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan temuan baru berupa alasan yang logis sesuai pernyataan dari keseluruhan soal.
- Penjabaran hasil analisis data alasan salah pada setiap butir soal yaitu:

1) Butir soal nomer 2

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 2 yaitu anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia hanya untuk lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) sebagai berikut:

Tabel 22. Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 2

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Anggota ABKIN tidak hanya lulusan PPK tetapi juga dari lulusan S-1 BK yang menjadi guru BK	5
2	ABKIN beranggotakan guru BK/konselor dan lulusan pendidikan profesi konselor	1
3	Anggota bisa dari praktisi pendidikan lainnya tetapi yang paham profesi konselor	1
4	Untuk semua guru BK meski belum/ tidak harus PPK	1
5	Hanya untuk lulusan jurusan BK, PP, Psikologi	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 2 “Anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia hanya untuk lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK)”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan terbanyak yaitu 5 guru BK dengan alasan “Anggota ABKIN tidak hanya lulusan PPK tetapi juga dari lulusan S-1 BK yang menjadi guru BK”. Empat alasan lainnya memiliki jumlah alasan yang sama yaitu masing-masing tiap alasan 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada

nomer soal 2 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“anggota ABKIN tidak hanya lulusan PPK tetapi juga dari lulusan S-1 BK yang menjadi guru BK”**

2) Butir soal nomer 4

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 4 yaitu ranah pengembangan kemampuan yang perlu dimiliki anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu bidang pendidikan, agama, dan industri sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 4

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Ranah pengembangan kemampuan yang perlu dimiliki yaitu bidang kemampuan profesional, pedagogik, sosial, kepribadian	3
2	Bidang industri bukan ranah pengembangan	3
3	Semua bidang kehidupan	2
4	Ditambah bidang bimbingan dan konseling	1
5	Bidang pendidikan	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 4 **“Ranah pengembangan kemampuan yang perlu dimiliki anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu bidang pendidikan, agama, dan industri”**. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan **“ranah pengembangan kemampuan yang perlu dimiliki yaitu bidang kemampuan profesional, pedagogik, sosial, kepribadian”** dan **“bidang industri bukan ranah**

pengembangan” masing-masing 3 guru BK, 2 guru BK dengan alasan “semua bidang kehidupan” serta alasan “bidang bimbingan dan konseling” dan “bidang pendidikan” dengan jumlah masing-masing 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 4 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“ranah pengembangan kemampuan yang perlu dimiliki yaitu bidang kemampuan profesional, pedagogik, sosial, kepribadian” dan “bidang industri bukan ranah pengembangan”**

3) Butir soal nomer 5

Tidak terdapat responden yang memberikan alasan pada butir soal nomer 5 “Ranah pengembangan kemampuan anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu bidang pribadi, belajar, sosial, dan karier”.

4) Butir soal nomer 7

Tidak terdapat responden yang memberikan alasan pada butir soal nomer 7 “Prinsip dasar penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu setiap individu mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling”.

5) Butir soal nomer 9

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 9 yaitu prinsip dasar penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu setiap individu mempunyai kewajiban untuk memahami arti penting dari pilihan hidup sebagai berikut:

Tabel 24. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 9

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Semua aspek kehidupan	2

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 9 “Prinsip dasar penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu setiap individu mempunyai kewajiban untuk memahami arti penting dari pilihan hidup”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “semua aspek kehidupan” sebanyak 2 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 9 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah “**semua aspek kehidupan**”.

6) Butir soal nomer 13

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 13 yaitu tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu mengatur misi organisasi profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 25. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 13

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Tujuan kode etik profesi BK Indonesia bukan mengatur misi organisasi, tetapi mendukung	7
2	Sebagai pedoman Guru BK dalam melaksanakan tugasnya	4

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 13 “Tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu mengatur misi organisasi profesi bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan terbanyak yaitu 7 guru BK dengan alasan “tujuan kode etik profesi BK Indonesia bukan mengatur misi organisasi, tetapi mendukung” dan 4 guru BK memberikan alasan “sebagai pedoman Guru BK dalam melaksanakan tugasnya”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 13 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu mengatur misi organisasi profesi bimbingan dan konseling”**.

7) Butir soal nomer 14

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 14 yaitu tujuan dibentuknya kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah sebagai syarat untuk memenuhi terbentuknya induk organisasi profesi bimbingan dan konseling, yaitu ABKIN sebagai berikut:

Tabel 26. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 14

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Sebagai pedoman dalam berperilaku oleh guru BK	5
2	Tujuan kode etik profesi BK; melindungi konselor, yang menjadi anggota asosiasi, mendukung misi asosiasi BK,	1

	prinsip/panduan perilaku etis konselor, membantu konselor dalam memberikan pelayanan	
--	--	--

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 14 “Tujuan dibentuknya kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah sebagai syarat untuk memenuhi terbentuknya induk organisasi profesi bimbingan dan konseling, yaitu ABKIN”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan terbanyak yaitu 5 guru BK dengan alasan “sebagai pedoman dalam berperilaku oleh guru BK” dan 1 guru BK memberikan alasan “Tujuan kode etik profesi BK; melindungi konselor, yang menjadi anggota asosiasi, mendukung misi asosiasi BK, prinsip/panduan perilaku etis konselor, membantu konselor dalam memberikan pelayanan”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 14 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“sebagai pedoman dalam berperilaku oleh guru BK”**.

8) Butir soal nomer 17

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 17 yaitu seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 27. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 17

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Karena yang wajib mematuhi hanya guru BK	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 17 “Seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu 1 guru BK dengan alasan “karena yang wajib mematuhi hanya guru BK”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 17 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“karena yang wajib mematuhi hanya guru BK”**.

9) Butir soal nomer 19

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 19 yaitu etika organisasi profesi bimbingan dan konseling tidak mengatur anggota profesi dalam menjalin hubungan dengan organisasi profesi lain sebagai berikut:

Tabel 28. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 19

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Mengatur anggota profesi dalam menjalin hubungan dengan profesi lain	7

2	ABKIN mengatur anggota profesi menjalin kerjasama dengan organisasi profesi	1
---	---	---

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 19 “Etika organisasi profesi bimbingan dan konseling tidak mengatur anggota profesi dalam menjalin hubungan dengan organisasi profesi lain”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan terbanyak yaitu 7 guru BK dengan alasan “mengatur anggota profesi dalam menjalin hubungan dengan profesi lain” dan 1 guru BK memberikan alasan “ABKIN mengatur anggota profesi menjalin kerjasama dengan organisasi profesi”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 19 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“mengatur anggota profesi dalam menjalin hubungan dengan profesi lain”**.

10) Butir soal nomer 22

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 22 yaitu kode etik profesi memuat standar dan perilaku guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 29. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 22

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Mengatur guru BK melaksanakan kewajiban	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 17 “Kode etik profesi memuat standar dan perilaku guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu 1 guru BK dengan alasan “mengatur guru BK melaksanakan kewajiban”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 22 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“mengatur guru BK melaksanakan kewajiban”**.

11) Butir soal nomer 24

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 24 yaitu kode etik profesi berisi aturan bagi guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 30. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 24

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Dalam profesinya dan dalam bermsayarakat	2
2	Beda antara aturan dengan kode etik	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 24 “Kode etik profesi berisi aturan bagi guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan terbanyak

yaitu 2 guru BK dengan alasan “dalam profesinya dan dalam bermsayarakat” dan 1 guru BK memberikan alasan “beda antara aturan dengan kode etik”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 24 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“dalam profesinya dan dalam bermsayarakat”**.

12) Butir soal nomer 25

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 25 yaitu Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Konselor Indonesia merupakan dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia sebagai berikut:

Tabel 31. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 25

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	AD ART IKI bukan dasar hukum kode etik profesi BK	4

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 25 “Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Konselor Indonesia merupakan dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu 4 guru BK dengan alasan “AD ART IKI bukan dasar hukum kode etik profesi BK”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 25 sebagian

besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah “**AD ART IKI bukan dasar hukum kode etik profesi BK**”.

13) Butir soal nomer 27

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 27 yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Guru Republik Indonesia bukan merupakan dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia sebagai berikut:

Tabel 32. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 27

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	AD/ART PGRI merupakan salah satu dasar hukum kode etik organisasi profesi BK	8
2	Merupakan dasar pelaksanaan	1
3	Harusnya menjadi dasar untuk kode etik organisasi	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 27 “Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Guru Republik Indonesia bukan merupakan dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “AD/ART PGRI merupakan salah satu dasar hukum kode etik organisasi profesi BK” sebanyak 8 guru BK dan masing-masing 1 guru BK dengan alasan “merupakan dasar pelaksanaan” serta alasan “harusnya menjadi dasar untuk kode etik organisasi”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 27 sebagian besar guru

bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“AD/ART PGRI merupakan salah satu dasar hukum kode etik organisasi profesi BK”**.

14) Butir soal nomer 29

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 29 yaitu Undang-undang Dasar 1945 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia sebagai berikut:

Tabel 33. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 29

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	UUD 1945 merupakan salah satu dasar hukum kode etik BK Indonesia	15
2	UUD 1945 merupakan sumber segala hukum dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara	2

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 29 “Undang-undang Dasar 1945 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan terbanyak yaitu 15 guru BK dengan alasan “UUD 1945 merupakan salah satu dasar hukum kode etik BK Indonesia” dan 2 guru BK memberikan alasan “UUD 1945 merupakan sumber segala hukum dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara”. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 29 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan

alasan salah “UUD 1945 merupakan salah satu dasar hukum kode etik BK Indonesia”.

15) Butir soal nomer 33

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 33 yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2005 tentang guru merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 34. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 33

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Dasar hukum RI, pancasila, UUD 1945	2
2	UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS	2
3	PP No. 74 thn 2008 tentang guru	3

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 33 “Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2005 tentang guru merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “Dasar hukum RI, pancasila, UUD 1945” sebanyak 2 guru BK, alasan “UU No 20 tahun 2003 tentang Standar dan PP No 74 tahun 2008 tentang Guru” 2 guru BK, serta alasan “PP No. 74 thn 2008 tentang guru” sebanyak 3 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 27 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di

Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“PP No. 74 thn 2008 tentang guru”**.

16) Butir soal nomer 36

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 36 yaitu Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 35. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 36

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Permendikbud No. 111 tentang BK PDPM bukan dasar hukum	3
2	Yang betul Permendiknas RI No. 27 thn 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor	2
3	Panduan dan juknis kurikulum 2013	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 36 “Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “Permendikbud No. 111 tentang BK PDPM bukan dasar hukum” sebanyak 3 guru BK, alasan “yang betul Permendiknas RI No. 27 thn 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor” 2 guru BK, serta alasan “panduan dan juknis kurikulum

2013” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 36 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah “**Permendikbud No. 111 tentang BK PDPM bukan dasar hukum**”.

17) Butir soal nomer 37

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 37 yaitu Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) tahun 2003/2004 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 36. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 37

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	DSPK merupakan dasar hukum kode etik profesi	5
2	PP 20 tentang pendidikan nasional juga termasuk	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 37 “Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) tahun 2003/2004 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “DSPK merupakan dasar hukum kode etik profesi” sebanyak 5 guru BK dan alasan “PP 20 tentang pendidikan nasional juga termasuk” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 37 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di

Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“DSPK merupakan dasar hukum kode etik profesi”**.

18) Butir soal nomer 38

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 38 yaitu Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) tahun 2007/2008 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 37. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 38

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	DSPK salah satu dasar hukum kode etik profesi BK	4

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 38 “Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) tahun 2007/2008 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “DSPK salah satu dasar hukum kode etik profesi BK” sebanyak 4 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 38 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“DSPK salah satu dasar hukum kode etik profesi BK”**.

19) Butir soal nomer 42

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 42 yaitu Panduan Pengembangan diri yang diberlakukan tahun 2005 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 38. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 42

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Justru pengembangan diri merupakan dasar pokok profesi BK	1
2	Dasar hukum kode etik adalah PP 20 tentang pendidikan nasional	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 42 “Panduan Pengembangan diri yang diberlakukan tahun 2005 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “Justru pengembangan diri merupakan dasar pokok profesi BK” dan “Dasar hukum kode etik adalah PP 20 tentang pendidikan nasional” masing-masing 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 42 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“justru pengembangan diri merupakan dasar pokok profesi BK”** dan **“dasar hukum kode etik adalah PP 20 tentang pendidikan nasional”**

20) Butir soal nomer 44

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 44 yaitu kualifikasi akademik guru bimbingan dan konseling yaitu minimal lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) sebagai berikut:

Tabel 39. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 44

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Minimal lulusan S-1 BK	21
2	Prodi BK S-1 dan PPK	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 44 “Kualifikasi akademik guru bimbingan dan konseling yaitu minimal lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK)”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “minimal lulusan S-1 BK” sebanyak 21 guru BK dan alasan “Prodi BK S-1 dan PPK” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 44 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah “**minimal lulusan S-1 BK**”.

21) Butir soal nomer 47

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 47 yaitu program studi psikologi menyiapkan tenaga pendidik profesional menjadi guru bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 40. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 47

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Prodi BK S-1	6
2	Menjadi psikolog	5
3	Program studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	3
4	Program Profesi Konseling	1
5	Permendikbud No 111 Tahun 2014 mengatur Guru BK adalah lulusan S1 BK	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 44 “Program studi psikologi menyiapkan tenaga pendidik profesional menjadi guru bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama terbanyak yaitu alasan “Prodi BK S-1” sebanyak 6 guru BK. Dua alasan sama banyak jumlahnya yaitu “Permendikbud No 111 Tahun 2014 mengatur Guru BK adalah lulusan S1 BK” dan “Program Profesi Konseling” masing-masing 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 47 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah “**Prodi BK S-1**”.

22) Butir soal nomer 50

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 50 yaitu guru bimbingan dan konseling tidak perlu memahami permasalahan konseli secara mendalam dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 41. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 50

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Guru BK harus mendalami permasalahan konseli dalam menyelenggarakan BK	20

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 50 “Program studi psikologi menyiapkan tenaga pendidik profesional menjadi guru bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “guru BK harus mendalami permasalahan konseli dalam menyelenggarakan BK” sebanyak 20 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 50 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“guru BK harus mendalami permasalahan konseli dalam menyelenggarakan BK”**.

23) Butir soal nomer 54

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 54 yaitu guru bimbingan dan konseling menguasai landasan teori dan praksis hanya pada ruang lingkup ilmu pendidikan sebagai berikut:

Tabel 42. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 54

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Tidak hanya pada bidang pendidikan tetapi juga bidang BK	6
2	Tidak cukup hanya lingkup pendidikan tetapi juga ilmu-ilmu yang lain: misalnya pekerjaan industri, sosial, dan pengembangan ilmu pengetahuan umum	5

3	Berbagai disiplin ilmu	2
---	------------------------	---

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 54 “Guru bimbingan dan konseling menguasai landasan teori dan praksis hanya pada ruang lingkup ilmu pendidikan”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “tidak hanya pada bidang pendidikan tetapi juga bidang BK” sebanyak 6 guru BK, alasan “tidak cukup hanya lingkup pendidikan tetapi juga ilmu-ilmu yang lain: misalnya pekerjaan industri, sosial, dan pengembangan ilmu pengetahuan umum” 5 guru BK, serta alasan “berbagai disiplin ilmu” sebanyak 2 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 54 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“Tidak hanya pada bidang pendidikan tetapi juga bidang BK”**.

24) Butir soal nomer 57

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 57 yaitu guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling menggunakan pendekatan dan teknik konseling secara direktif-komprehensif sebagai berikut:

Tabel 43. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 57

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Penggunaan pendekatan dan teknik konseling menyesuaikan permasalahan siswa	5

2	Metode yang digunakan elektik/campuran	2
---	--	---

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 57 “Guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling menggunakan pendekatan dan teknik konseling secara direktif-komprehensif”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “penggunaan pendekatan dan teknik konseling menyesuaikan permasalahan siswa” sebanyak 5 guru BK dan alasan “metode yang digunakan elektik/campuran” sebanyak 2 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 57 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“penggunaan pendekatan dan teknik konseling menyesuaikan permasalahan siswa”**.

25) Butir soal nomer 58

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 58 yaitu guru bimbingan dan konseling tidak mempunyai peran dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 44. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 58

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Guru BK memiliki peran dalam ABKIN dan kegiatan profesi BK	16
2	Berdiri dan berjalannya organisasi profesi bimbingan tergantung pada guru BK yang berperan didalamnya	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 58 “Guru bimbingan dan konseling tidak mempunyai peran dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “guru BK memiliki peran dalam ABKIN dan kegiatan profesi BK” sebanyak 16 guru BK dan alasan “berdiri dan berjalannya organisasi profesi bimbingan tergantung pada guru BK yang berperan didalamnya” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 58 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“guru BK memiliki peran dalam ABKIN dan kegiatan profesi BK”**.

26) Butir soal nomer 61

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 61 yaitu guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kemampuan profesionalitas diri dapat dilakukan melalui diskusi antar seprofesi sebagai berikut:

Tabel 45. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 61

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Melalui diklat, seminar, MGBK, dll	3
2	Pengembangan kemampuan profesionalitas tidak hanya dengan diskusi, tapi bisa dengan berbagai media lain	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 61 “Guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kemampuan profesionalitas diri dapat dilakukan melalui diskusi antar seprofesi”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “melalui diklat, seminar, MGBK, dll” sebanyak 3 guru BK dan alasan “pengembangan kemampuan profesionalitas tidak hanya dengan diskusi, tapi bisa dengan berbagai media lain” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 61 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“melalui diklat, seminar, MGBK, dll”**.

27) Butir soal nomer 64

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 64 yaitu guru bimbingan dan konseling tidak perlu membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 46. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 64

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Guru pembimbing harus membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan BK	11
2	Harus selalu membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan sebagai bukti dokumentasi, evaluasi, analisis dan tindak lanjut	8
3	Perlu sebagai dokumen, sewaktu-waktu diperlukan	2

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal

nomer 64 “Guru bimbingan dan konseling tidak perlu membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “guru pembimbing harus membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan BK” sebanyak 11 guru BK, alasan “harus selalu membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan sebagai bukti dokumentasi, evaluasi, analisis dan tindak lanjut” 8 guru BK, serta alasan “perlu sebagai dokumen, sewaktu-waktu diperlukan” sebanyak 2 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 64 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“guru pembimbing harus membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan BK”**.

28) Butir soal nomer 66

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 66 yaitu hubungan guru bimbingan dan konseling dengan konseli secara umum yaitu guru bimbingan dan konseling tidak diwajibkan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling hingga tuntas kepada konseli sebagai berikut:

Tabel 47. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 66

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Guru BK dalam memberikan layanan kepada konseli harus dilaksanakan secara terus menerus dan tuntas terhadap masalah yang dihadapi konseli	16

2	Sampai tuntas, kecuali konseli minta dialihkan/kepada pihak lain dan konselor tidak merasa tidak mampu (referral)	2
---	---	---

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 66 “Guru bimbingan dan konseling dengan konseli secara umum yaitu guru bimbingan dan konseling tidak diwajibkan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling hingga tuntas kepada konseli”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “guru BK dalam memberikan layanan kepada konseli harus dilaksanakan secara terus menerus dan tuntas terhadap masalah yang dihadapi konseli” sebanyak 16 guru BK dan alasan “sampai tuntas, kecuali konseli minta dialihkan/ kepada pihak lain dan konselor tidak merasa tidak mampu (referral)” sebanyak 2 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 66 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri sekelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“guru BK dalam memberikan layanan kepada konseli harus dilaksanakan secara terus menerus dan tuntas terhadap masalah yang dihadapi konseli”**

29) Butir soal nomer 68

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 68 yaitu pelayanan guru bimbingan dan konseling pada unit kelembagaan yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli yang bermasalah saja sebagai berikut:

Tabel 48. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 68

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Guru BK memberikan layanan BK kepada semua siswa untuk mencapai kemandirian, keberhasilan dan kehidupannya	13
2	Kepada semua konseli baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah	11

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 68 “Hubungan guru bimbingan dan konseling dengan konseli secara umum yaitu guru bimbingan dan konseling tidak diwajibkan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling hingga tuntas kepada konseli”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “guru BK memberikan layanan BK kepada semua siswa untuk mencapai kemandirian, keberhasilan dan kehidupannya” sebanyak 13 guru BK dan alasan “kepada semua konseli baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah” sebanyak 11 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 68 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“guru BK memberikan layanan BK kepada semua siswa untuk mencapai kemandirian dan keberhasilan dan kehidupannya”**.

30) Butir soal nomer 73

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 73 yaitu pelayanan guru bimbingan dan konseling pada unit keluarga yaitu

menghormati kondisi kehidupan keluarga tempat yang bersangkutan bekerja sebagai berikut:

Tabel 49. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 73

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Keluarga konseli	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 73 “Pelayanan guru bimbingan dan konseling pada unit keluarga yaitu menghormati kondisi kehidupan keluarga tempat yang bersangkutan bekerja”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “keluarga konseli” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 73 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri sekelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah “keluarga konseli”.

31) Butir soal nomer 74

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 74 yaitu guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara mandiri tidak perlu memperoleh izin praktik terlebih dahulu dari organisasi profesi sebagai berikut:

Tabel 50. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 74

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Perlu peroleh izin praktik terlebih dahulu dari organisasi profesi	7
2	Harus punya izin dan lisensi konselor	3
3	Karena untuk membuka pada tes mandiri perlu legalitas dengan ambil pendidikan profesi tersebut	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 74 “Guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara mandiri tidak perlu memperoleh izin praktik terlebih dahulu dari organisasi profesi”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “perlu peroleh izin praktik terlebih dahulu dari organisasi profesi” sebanyak 7 guru BK, alasan “harus punya izin dan lisensi konselor” 3 guru BK, serta alasan “karena untuk membuka pada tes mandiri perlu legalitas dengan ambil pendidikan profesi tersebut” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 74 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“perlu peroleh izin praktik terlebih dahulu dari organisasi profesi”**.

32) Butir soal nomer 78

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 78 yaitu guru bimbingan dan konseling tidak boleh menyampaikan data konseli

kepada keluarganya merupakan kegiatan profesional layanan bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 51. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 78

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Boleh bila diperlukan untuk kepentingan konseli	6
2	Harus menyampaikan, kalau perlu kerjasama	2
3	Harus bisa simpan rahasia	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 78 “Guru bimbingan dan konseling tidak boleh menyampaikan data konseli kepada keluarganya merupakan kegiatan profesional layanan bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “boleh bila diperlukan untuk kepentingan konseli” sebanyak 6 guru BK, alasan “harus menyampaikan, kalau perlu kerjasama” 2 guru BK, serta alasan “harus bisa simpan rahasia” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 78 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“boleh bila diperlukan untuk kepentingan konseli”**.

33) Butir soal nomer 82

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 82 yaitu guru bimbingan dan konseling dalam penggunaan instrumen tidak

diwajibkan mengikuti pedoman yang berlaku bagi instrumen tes atau non-tes tersebut sebagai berikut:

Tabel 52. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 82

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Penggunaan instrumen harus mengikuti pedoman yang berlaku untuk mendapatkan hasil yang valid	20

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 82 “Guru bimbingan dan konseling dalam penggunaan instrumen tidak diwajibkan mengikuti pedoman yang berlaku bagi instrumen tes atau non-tes tersebut”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “penggunaan instrumen harus mengikuti pedoman yang berlaku untuk mendapatkan hasil yang valid” sebanyak 20 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 82 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“penggunaan instrumen harus mengikuti pedoman yang berlaku untuk mendapatkan hasil yang valid”**.

34) Butir soal nomer 84

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 84 yaitu guru bimbingan dan konseling dalam melaporkan hasil riset diperbolehkan memberitahu identitas subjek penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 53. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 84

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Subyek penelitian tidak perlu dipublikasikan	6
2	Identitas harus dirahasiakan kecuali seizin subyek	8

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 84 “Guru bimbingan dan konseling dalam melaporkan hasil riset diperbolehkan memberitahu identitas subjek penelitian”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “identitas harus dirahasiakan kecuali seizin subyek” sebanyak 8 guru BK dan alasan “subyek penelitian tidak perlu dipublikasikan” sebanyak 6 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 84 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“identitas harus dirahasiakan kecuali seizin subyek”**.

35) Butir soal nomer 86

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 86 yaitu guru bimbingan dan konseling dalam memahami sasaran layanan perlu menghargai konseli sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai berikut:

Tabel 54. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 86

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Sesuai masalah konseli	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 86 “Guru bimbingan dan konseling dalam memahami sasaran layanan perlu menghargai konseli sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan “sesuai masalah konseli” 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 86 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“sesuai masalah konseli”**.

36) Butir soal nomer 89

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 89 yaitu guru bimbingan dan konseling dalam menangani permasalahan konseli yaitu bertindak secara subyektif sebagai berikut:

Tabel 55. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 89

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Bertindak secara obyektif	20
2	Harus bertindak secara obyektif. Tidak memihak	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 89 “Guru bimbingan dan konseling dalam menangani permasalahan konseli yaitu bertindak secara subyektif”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “identitas harus dirahasiakan kecuali seizin subyek” sebanyak 20 guru BK dan

alasan “harus bertindak secara obyektif. Tidak memihak” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 89 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah “**bertindak secara obyektif**”.

37) Butir soal nomer 90

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 90 yaitu guru bimbingan dan konseling dalam membahas permasalahan konseli yaitu bertindak secara subyektif sebagai berikut:

Tabel 56. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 90

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Bertindak secara obyektif	22
2	Obyektifitas konseli harus dijunjung tinggi	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 90 “Guru bimbingan dan konseling dalam membahas permasalahan konseli yaitu bertindak secara subyektif”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “bertindak secara obyektif” sebanyak 20 guru BK dan alasan “obyektifitas konseli harus dijunjung tinggi” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 90 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok

kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“bertindak secara obyektif”**.

38) Butir soal nomer 93

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 90 yaitu guru bimbingan dan konseling dalam berbagi informasi konseli perlu izin dari yang bersangkutan sesuai dengan asas keterbukaan bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 57. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 93

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Bukan azas keterbukaan tetapi azas kerahasiaan	6
2	Tidak usah izin	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 93 “Guru bimbingan dan konseling dalam berbagi informasi konseli perlu izin dari yang bersangkutan sesuai dengan asas keterbukaan bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “bukan azas keterbukaan tetapi azas kerahasiaan” sebanyak 6 guru BK dan alasan “tidak usah izin” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 93 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“bukan azas keterbukaan tetapi azas kerahasiaan”**.

39) Butir soal nomer 96

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 96 yaitu guru bimbingan dan konseling dalam perekaman data diperbolehkan langsung merekam proses konseling tanpa meminta izin dari konseli sebagai berikut:

Tabel 58. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 96

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Perekaman data harus seijin konseli	14
2	Pelaksanaan kegiatan layanan BK yang didokumentasikan perlu minta ijin dan kesepakatan dari pihak terlebih dulu	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 96 “Guru bimbingan dan konseling dalam perekaman data diperbolehkan langsung merekam proses konseling tanpa meminta izin dari konseli”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “perekaman data harus seijin konseli” sebanyak 6 guru BK dan alasan “pelaksanaan kegiatan layanan BK yang didokumentasikan perlu minta ijin dan kesepakatan dari pihak terlebih dulu” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 96 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“perekaman data harus seijin konseli”**.

40) Butir soal nomer 98

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 98 yaitu guru bimbingan dan konseling tidak dapat menggunakan informasi konseli untuk keperluan penelitiannya sebagai berikut:

Tabel 59. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 98

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Dapat menggunakan informasi konseli untuk keperluan penelitian	8
2	Diperbolehkan untuk menggunakan data tentang penelitian dnegan mempertimbangkan asas kerahasiaan	4

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 98 “Guru bimbingan dan konseling tidak dapat menggunakan informasi konseli untuk keperluan penelitiannya”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “dapat menggunakan informasi konseli untuk keperluan penelitian” sebanyak 8 guru BK dan alasan “diperbolehkan untuk menggunakan data tentang penelitian dnegan mempertimbangkan asas kerahasiaan” sebanyak 4 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 98 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“dapat menggunakan informasi konseli untuk keperluan penelitian”**.

41) Butir soal nomer 101

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 101 yaitu guru bimbingan dan konseling tidak perlu memastikan kerahasiaan data konseli dalam memberikan informasi kepada pihak lain sebagai berikut:

Tabel 60. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 101

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Guru BK harus memastikan kerahasiaan konseli kepada pihak lain	25

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 101 “Guru bimbingan dan konseling tidak perlu memastikan kerahasiaan data konseli dalam memberikan informasi kepada pihak lain”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan “guru BK harus memastikan kerahasiaan konseli kepada pihak lain” 25 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 101 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri sekelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“guru BK harus memastikan kerahasiaan konseli kepada pihak lain”**.

42) Butir soal nomer 103

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 103 yaitu guru bimbingan dan konseling boleh menyampaikan nama konseli pada saat konferensi kasus dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 61. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 103

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Tidak boleh menyampaikan nama, tetapi dengan simbol/kode, agar hasilnya obyektif	7
2	Nama tidak boleh disampaikan, tetapi hanya permasalahannya yang disampaikan	1
3	Nama konseli harus disamarkan, sesuai unsur/asas kerahasiaan	4

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 103 “Guru bimbingan dan konseling boleh menyampaikan nama konseli pada saat konferensi kasus dilaksanakan”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “tidak boleh menyampaikan nama, tetapi dengan simbol/kode, agar hasilnya obyektif” sebanyak 7 guru BK, alasan “nama tidak boleh disampaikan, tetapi hanya permasalahannya yang disampaikan” 1 guru BK, serta alasan “nama konseli harus disamarkan, sesuai unsur/asas kerahasiaan” sebanyak 4 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 103 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“Tidak boleh menyampaikan nama, tetapi dengan simbol/kode, agar hasilnya obyektif”**.

43) Butir soal nomer 105

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 105 yaitu penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diselenggarakan di dalam ruangan sebagai berikut:

Tabel 62. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 105

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Pelaksanaan layanan bisa dilakukan dimana saja yang penting kedua belah pihak merasa nyaman	9
2	Pelayanan BK bisa juga dilakukan diluar ruangan; misalnya ditaman, perpustakaan, tempat ibadah, industri	14

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 105 “Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diselenggarakan di dalam ruangan”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “pelayanan BK bisa juga dilakukan diluar ruangan; misalnya ditaman, perpustakaan, tempat ibadah, industri” sebanyak 14 guru BK dan alasan “pelaksanaan layanan bisa dilakukan dimana saja yang penting kedua belah pihak merasa nyaman” sebanyak 9 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 105 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“pelayanan BK bisa juga dilakukan diluar ruangan; misalnya ditaman, perpustakaan, tempat ibadah, industri”**.

44) Butir soal nomer 108

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 108 yaitu pelayanan konseling dilaksanakan di tempat “terbuka”, artinya proses layanan konseling dapat dilihat oleh orang lain sebagai berikut:

Tabel 63. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 108

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Pelayanan konseling dilaksanakan ditempat tertutup, aman, nyaman, rahasia tidak diketahui orang lain	8
2	Ditempat mana saja asal tetap dijaga kerahasiaan masalahnya	4
3	Bisa terbuka bisa tertutup melihat permasalahan yang ditangani	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 108 “Pelayanan konseling dilaksanakan di tempat “terbuka”, artinya proses layanan konseling dapat dilihat oleh orang lain”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “pelayanan konseling dilaksanakan ditempat tertutup, aman, nyaman, rahasia tidak diketahui orang lain” sebanyak 8 guru BK, alasan “ditempat mana saja asal tetap dijaga kerahasiaan masalahnya” 4 guru BK, serta alasan “bisa terbuka bisa tertutup melihat permasalahan yang ditangani” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 108 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“pelayanan konseling**

dilaksanakan ditempat tertutup, aman, nyaman, rahasia tidak diketahui orang lain”.

45) Butir soal nomer 111

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 108 yaitu guru bimbingan dan konseling dalam memilih teknik konseling tidak harus sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan kondisi konseli sebagai berikut:

Tabel 64. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 111

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Guru BK harus menyesuaikan dengan masalah, kebutuhan, dan kondisi konseli dalam memilih teknik konseling	36

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 111 “Guru bimbingan dan konseling dalam memilih teknik konseling tidak harus sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan kondisi konseli”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan “guru BK harus menyesuaikan dengan masalah, kebutuhan, dan kondisi konseli dalam memilih teknik konseling” 36 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 111 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri sekelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“guru BK harus menyesuaikan dengan masalah, kebutuhan, dan kondisi konseli dalam memilih teknik konseling”.**

46) Butir soal nomer 115

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 115 yaitu guru bimbingan dan konseling tidak perlu melakukan penilaian jangka segera setiap kali menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 65. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 115

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Penilaian segera perlu karena mengetahui keberhasilan layanan sehingga dapat melakukan tindak lanjut, disesuaikan dengan tujuan layanannya	11
2	Setiap kegiatan selalu dilaksanakan penilaian untuk menentukan penanganan berikutnya	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 115 “Guru bimbingan dan konseling tidak perlu melakukan penilaian jangka segera setiap kali menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “penilaian segera perlu karena mengetahui keberhasilan layanan sehingga dapat melakukan tindak lanjut, disesuaikan dengan tujuan layanannya” sebanyak 11 guru BK dan alasan “setiap kegiatan selalu dilaksanakan penilaian untuk menentukan penanganan berikutnya” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 115 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-

kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“penilaian segera perlu karena mengetahui keberhasilan layanan sehingga dapat melakukan tindak lanjut, disesuaikan dengan tujuan layanannya”**.

47) Butir soal nomer 117

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 117 yaitu guru guru bimbingan dan konseling tidak perlu melakukan penilaian hasil layanan setiap menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling perorangan sebagai berikut:

Tabel 66. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 117

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Perlu melakukan penilaian untuk mengetahui berhasil tidaknya layanan yang sudah diberikan	25
2	Melakukan penilaian merupakan bentuk tindakan profesional	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 117 “Guru bimbingan dan konseling tidak perlu melakukan penilaian hasil layanan setiap menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling perorangan”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “perlu melakukan penilaian untuk mengetahui berhasil tidaknya layanan yang sudah diberikan” sebanyak 25 guru BK dan alasan “melakukan penilaian merupakan bentuk tindakan profesional” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 117 sebagian besar

guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“perlu melakukan penilaian untuk mengetahui berhasil tidaknya layanan yang sudah diberikan”**.

48) Butir soal nomer 122

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 122 yaitu aspek penilaian konselor terhadap konseli dalam bimbingan dan konseling kelompok yaitu kondisi kognitif atau berpikir sebagai berikut:

Tabel 67. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 122

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Tri kotomi: jiwa, perilaku, semangat	1
2	Mencakup 3 aspek (kognitif, afektif, dan psikomotor)	1
3	Ada kerja sama	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 122 “Aspek penilaian konselor terhadap konseli dalam bimbingan dan konseling kelompok yaitu kondisi kognitif atau berpikir”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “tri kotomi: jiwa, perilaku, semangat”, “mencakup 3 aspek (kognitif, afektif, dan psikomotor)”, dan “ada kerja sama” dengan jumlah masing-masing 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 122 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di

Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“tri kotomi: jiwa, perilaku, semangat”, “mencakup 3 aspek (kognitif, afektif, dan psikomotor)”, dan “ada kerja sama”**.

49) Butir soal nomer 123

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 123 yaitu tanggung jawab guru bimbingan dan konseling terhadap konseli yaitu hanya membantu konseli dalam memenuhi kebutuhan bidang pribadi dan kariernya sebagai berikut:

Tabel 68. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 123

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Bidang layanan BK pribadi, sosial, belajar, dan karier	22
2	Belajar dan sosial	3

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 123 “Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling terhadap konseli yaitu hanya membantu konseli dalam memenuhi kebutuhan bidang pribadi dan kariernya”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan **“bidang layanan BK pribadi, sosial, belajar, dan karier”** sebanyak 22 guru BK dan alasan **“belajar dan sosial”** sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 123 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“bidang layanan BK pribadi, sosial, belajar, dan karier”**.

50) Butir soal nomer 126

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 126 yaitu tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada atasan yaitu tidak perlu memberikan informasi kepada pimpinan lembaga tentang perannya terhadap konseli sebagai berikut:

Tabel 69. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 126

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Wujud pertanggungjawaban kepada atasan melaporkan hasil kegiatan konseling atau layanan BK	12
2	Perlu memberikan informasi sejauh tidak merugikan konseli	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 126 “Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada atasan yaitu tidak perlu memberikan informasi kepada pimpinan lembaga tentang perannya terhadap konseli”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “wujud pertanggungjawaban kepada atasan melaporkan hasil kegiatan konseling atau layanan BK” sebanyak 12 guru BK dan alasan “perlu memberikan informasi sejauh tidak merugikan konseli” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 126 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“wujud pertanggungjawaban kepada atasan melaporkan hasil kegiatan konseling atau layanan BK”**.

51) Butir soal nomer 129

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 129 yaitu tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada ilmu yaitu menggunakan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan di luar tujuan profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 70. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 129

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Penggunaan ilmu harus sesuai kepentingan dan tujuan profesi BK	14
2	Sepenuhnya untuk kepentingan kemajuan pendidikan dalam upaya membentuk dan mencapai hasil pendidikan cerdas dan berkarakter	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 129 “Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada ilmu yaitu menggunakan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan di luar tujuan profesi bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “penggunaan ilmu harus sesuai kepentingan dan tujuan profesi BK” sebanyak 12 guru BK dan alasan “sepenuhnya untuk kepentingan kemajuan pendidikan dalam upaya membentuk dan mencapai hasil pendidikan cerdas dan berkarakter” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 129 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di

Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“penggunaan ilmu harus sesuai kepentingan dan tujuan profesi BK”**.

52) Butir soal nomer 133

Tidak terdapat responden yang memberikan alasan pada butir soal nomer 133 “Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada diri sendiri yaitu menyadari kualitas layanan bimbingan dan konseling yang dilakukannya berdampak pada pribadi konseli”.

53) Butir soal nomer 136

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 136 yaitu tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu menyadari bahwa pelayanan bimbingan dan konseling bukan untuk kebaikan konseli sebagai berikut:

Tabel 71. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 136

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Pelayanan BK semata-mata untuk kebaikan konseli dan mencapai perkembangan yang optimal	21
2	Pemberian layanan BK didasari dengan meningkatkan kemandirian konseli yang bertuju pada tanggung jawab sebagai makhluk tuhan	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 136 “Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu menyadari bahwa pelayanan bimbingan dan konseling bukan untuk kebaikan konseli”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “pelayanan BK semata-

mata untuk kebaikan konseli dan mencapai perkembangan yang optimal” sebanyak 21 guru BK dan alasan “pemberian layanan BK didasari dengan meningkatkan kemandirian konseli yang bertuju pada tanggung jawab sebagai makhluk tuhan” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 136 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri sekelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“pelayanan BK semata-mata untuk kebaikan konseli dan mencapai perkembangan yang optimal”**.

54) Butir soal nomer 139

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 139 yaitu guru bimbingan dan konseling melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik organisasi profesi bukan merupakan pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling secara umum sebagai berikut:

Tabel 72. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 139

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Guru BK yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik profesi merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi BK	20
2	Pelanggaran tindak pidana merupakan pelanggaran hukum jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 139 “Guru bimbingan dan konseling melakukan tindak pidana

yang mencemarkan nama baik organisasi profesi bukan merupakan pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling secara umum”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “guru BK yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik profesi merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi BK” sebanyak 20 guru BK dan alasan “pelanggaran tindak pidana merupakan pelanggaran hukum jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 139 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“guru BK yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik profesi merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi BK”**.

55) Butir soal nomer 141

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 141 yaitu guru bimbingan dan konseling yang menyebarkan rahasia konseli kepada pihak lain bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli sebagai berikut:

Tabel 73. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 141

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Guru BK yang menyebarkan rahasia konseli kepada pihak lain merupakan perilaku pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli	13
2	Guru BK wajib menjaga kerahasiaan konseli dalam menyelesaikan permasalahan	9

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 141 “Guru bimbingan dan konseling yang menyebarkan rahasia konseli kepada pihak lain bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “guru BK yang menyebarkan rahasia konseli kepada pihak lain merupakan perilaku pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli” sebanyak 13 guru BK dan alasan “guru BK wajib menjaga kerahasiaan konseli dalam menyelesaikan permasalahan” sebanyak 9 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 141 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“guru BK yang menyebarkan rahasia konseli kepada pihak lain merupakan perilaku pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli”**.

56) Butir soal nomer 142

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 142 yaitu guru bimbingan dan konseling melakukan perbuatan asusila (seperti pelecehan seksual) kepada konseli merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli sebagai berikut:

Tabel 74. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 142

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Kode etik menjaga harga dan martabat diri	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 142 “Guru bimbingan dan konseling melakukan perbuatan asusila (seperti pelecehan seksual) kepada konseli merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan “kode etik menjaga harga dan martabat diri” 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 142 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“kode etik menjaga harga dan martabat diri”**.

57) Butir soal nomer 144

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 144 yaitu guru bimbingan dan konseling melakukan tindak kesalahan terhadap lembaga tempat bekerja bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap lembaga kerja sebagai berikut:

Tabel 75. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 144

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Tindak kesalahan merupakan bentuk pelanggaran kode etik terhadap lembaganya	12
2	Karena merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi yaitu tak mampu menjaga nama baik	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 144 “Guru bimbingan dan konseling yang menyebarkan rahasia konseli kepada pihak lain bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik

profesi terhadap konseli”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “tindak kesalahan merupakan bentuk pelanggaran kode etik terhadap lembaganya” sebanyak 12 guru BK dan alasan “karena merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi yaitu tak mampu menjaga nama baik” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 144 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“tindak kesalahan merupakan bentuk pelanggaran kode etik terhadap lembaganya”**.

58) Butir soal nomer 147

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 147 yaitu guru bimbingan dan konseling menolak bekerja sama dengan rekan seprofesi merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 76. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 147

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Harusnya menjalin kerja sama rekan seprofesi	2
2	Guru BK tidak menolak bekerja sama dengan rekan seprofesi	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 147 “Guru bimbingan dan konseling menolak bekerja sama dengan rekan seprofesi merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan

dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “harusnya menjalin kerja sama rekan seprofesi” sebanyak 2 guru BK dan alasan “guru BK tidak menolak bekerja sama dengan rekan seprofesi” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 147 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“harusnya menjalin kerja sama rekan seprofesi”**.

59) Butir soal nomer 148

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 148 yaitu guru bimbingan dan konseling merebut konseli dari rekan seprofesi bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 77. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 148

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Merebut konseli merupakan bentuk pelanggaran kode etik	12
2	Jika ingin menangani konseli yang sama (kasus dan konseling) harus ijin sama konseli ybs	2
3	Jika merebut dalam artian mengambil alih kasus siswa, bisa diterima jika tujuannya segera/ darurat mengatasi masalah konseli dan banyak orang menghendakinya	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 148 “Pelayanan konseling dilaksanakan di tempat “terbuka”, artinya proses layanan konseling dapat dilihat oleh orang lain”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan

“merebut konseli merupakan bentuk pelanggaran kode etik” sebanyak 12 guru BK, alasan “jika ingin menangani konseli yang sama (kasus dan konseling) harus ijin sama konseli ybs” 2 guru BK, serta alasan “jika merebut dalam artian mengambil alih kasus siswa, bisa diterima jika tujuannya segera/ darurat mengatasi masalah konseli dan banyak orang menghendakinya” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomor soal 148 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“merebut konseli merupakan bentuk pelanggaran kode etik”**.

60) Butir soal nomor 152

Tidak terdapat responden yang memberikan alasan pada butir soal nomor 152 “Guru bimbingan dan konseling tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi merupakan pelanggaran kode etik profesi terhadap organisasi profesi”.

61) Butir soal nomor 154

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomor 154 yaitu pemberian sanksi bagi guru bimbingan dan konseling yang melanggar kode etik profesi yaitu dicabut keanggotaan dari ABKIN dan tetap diberi izin praktik mandiri sebagai berikut:

Tabel 78. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 154

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Dicabut keanggotaan dari ABKIN dan dicabut izin prakteknya	10

2	Dilihat dulu bobot pelanggarannya (ringan, sedang, berat)	3
---	---	---

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 154 “Pemberian sanksi bagi guru bimbingan dan konseling yang melanggar kode etik profesi yaitu dicabut keanggotaan dari ABKIN dan tetap diberi izin praktik mandiri”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “dicabut keanggotaan dari ABKIN dan dicabut izin prakteknya” sebanyak 10 guru BK dan alasan “dilihat dulu bobot pelanggarannya (ringan, sedang, berat)” sebanyak 3 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 154 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“dicabut keanggotaan dari ABKIN dan dicabut izin prakteknya”**.

62) Butir soal nomer 158

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 158 yaitu tahapan kedua penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi yaitu konseli melaporkan adanya pelanggaran kode etik profesi kepada dewan kode etik profesi sebagai berikut:

Tabel 79. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 158

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Tahap kedua penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi memverifikasi informasi	3
2	Seharusnya klarifikasi atas laporan konseli	2

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 158 “Tahapan kedua penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi yaitu konseli melaporkan adanya pelanggaran kode etik profesi kepada dewan kode etik profesi”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “tahap kedua penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi memverifikasi informasi” sebanyak 3 guru BK dan alasan “seharusnya klarifikasi atas laporan konseli” sebanyak 3 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 158 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“tahap kedua penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi memverifikasi informasi”**.

63) Butir soal nomer 159

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 159 yaitu tahapan ketiga penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu guru bimbingan dan konseling yang melakukan pelanggaran tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebagai berikut:

Tabel 80. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 159

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Guru BK dapat melakukan pembelaan terhadap pelanggaran kode etik profesi	10

2	Pada tahap ketiga masuk pada sanksi. Pencabutan dari keanggotaan ABKIN	1
3	Diberi kesempatan/dipanggil untuk verifikasi	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 159 “Tahapan ketiga penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu guru bimbingan dan konseling yang melakukan pelanggaran tidak diberi kesempatan untuk membela diri”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama terbanyak yaitu alasan “guru BK dapat melakukan pembelaan terhadap pelanggaran kode etik profesi” sebanyak 10 guru BK. Dua alasan sama banyak jumlahnya yaitu “pada tahap ketiga masuk pada sanksi. Pencabutan dari keanggotaan ABKIN” dan “diberi kesempatan/dipanggil untuk verifikasi” masing-masing 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 159 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri sekelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“guru BK dapat melakukan pembelaan terhadap pelanggaran kode etik profesi”**.

64) Butir soal nomer 160

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 160 yaitu ABKIN membentuk dewan kode etik profesi dalam dua tingkatan yaitu tingkat daerah dan tingkat nasional sebagai berikut:

Tabel 81. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 160

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Ada tiga tingkat	1
2	Ada satu tingkat yaitu nasional	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 160 “ABKIN membentuk dewan kode etik profesi dalam dua tingkatan yaitu tingkat daerah dan tingkat nasional”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “ada tiga tingkat” dan “ada satu tingkat yaitu nasional” dengan jumlah masing-masing 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 160 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“ada tiga tingkat” dan “ada satu tingkat yaitu nasional”**

65) Butir soal nomer 162

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 162 yaitu dewan kode etik profesi dalam struktural organisasi profesi ABKIN hanya ada satu tingkatan yaitu tingkat nasional sebagai berikut:

Tabel 82. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 162

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Dewan kode etik ada ditingkat nasional dan propinsi	7
2	Dimulai dari tingkat kabupaten, propinsi dan nasional	4

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 162 “Dewan kode etik profesi dalam struktural organisasi profesi ABKIN hanya ada satu tingkatan yaitu tingkat nasional”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “dewan kode etik ada ditingkat nasional dan propinsi” sebanyak 7 guru BK dan alasan “dimulai dari tingkat kabupaten, propinsi dan nasional” sebanyak 4 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 162 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“dewan kode etik ada ditingkat nasional dan propinsi”**.

66) Butir soal nomer 165

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 165 yaitu dewan kode etik profesi mempunyai tugas dalam menjaga dan mengawasi tegaknya kode etik profesi sebagai berikut:

Tabel 83. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 165

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Ada tingkatan, dari teguran lisan sampai tulisan dan pencabutan	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 165 “Dewan kode etik profesi mempunyai tugas dalam menjaga dan mengawasi tegaknya kode etik profesi”. Jumlah

responden yang mengungkapkan alasan “ada tingkatan, dari teguran lisan sampai tulisan dan pencabutan” 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 165 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“ada tingkatan, dari teguran lisan sampai tulisan dan pencabutan”**.

67) Butir soal nomer 166

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 166 yaitu dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak mempunyai fungsi dalam memeriksa adanya pelanggaran terhadap kode etik oleh guru bimbingan dan konseling sebagai berikut:

Tabel 84. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 166

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Dewan kode etik memverifikasi data dari konseli atau masyarakat sebelum penerapan sanksi	5
2	Dewan kode etik profesi mempunyai fungsi memeriksa adanya pelanggaran terhadap kode etik oleh guru BK	6

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 165 “Dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak mempunyai fungsi dalam memeriksa adanya pelanggaran terhadap kode etik oleh guru bimbingan dan konseling”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “dewan kode etik profesi mempunyai fungsi memeriksa adanya pelanggaran terhadap kode etik oleh guru BK” sebanyak 6 guru BK dan alasan “dewan kode

etik memverifikasi data dari konseli atau masyarakat sebelum penerapan sanksi” sebanyak 5 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 165 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“dewan kode etik profesi mempunyai fungsi memeriksa adanya pelanggaran terhadap kode etik oleh guru BK”**.

68) Butir soal nomer 169

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 154 yaitu dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak mempunyai tugas menerima pembelaan dari guru bimbingan dan konseling yang diadukan melanggar kode etik profesi sebagai berikut:

Tabel 85. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 169

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Dewan kode etik memiliki tugas menerima pembelaan dari guru BK yang diadukan	9
2	Dewan harus memberi perlindungan pada setiap anggotanya	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 169 “Dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak mempunyai tugas menerima pembelaan dari guru bimbingan dan konseling yang diadukan melanggar kode etik profesi”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan sama yaitu alasan “dewan kode etik memiliki tugas menerima pembelaan dari guru BK yang

diadukan” sebanyak 9 guru BK dan alasan “dewan harus memberi perlindungan pada setiap anggotanya” sebanyak 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 169 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“dewan kode etik memiliki tugas menerima pembelaan dari guru BK yang diadukan”**.

69) Butir soal nomer 173

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 173 yaitu tugas dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu mempertimbangkan sanksi kepada guru bimbingan dan konseling yang terbukti melanggar kode etik profesi sebagai berikut:

Tabel 86 . Hasil analisis alasan salah dari butir soal 173

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Tidak cukup mempertimbangkan sanksi tetapi lebih kearah meninggalkan tugas profesional guru bk dalam menjalankan tugas pemberian layanan	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 173 “Tugas dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu mempertimbangkan sanksi kepada guru bimbingan dan konseling yang terbukti melanggar kode etik profesi”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan “tidak cukup mempertimbangkan sanksi tetapi lebih kearah meninggalkan tugas

profesional guru bk dalam menjalankan tugas pemberian layanan” 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 173 sebagian besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“tidak cukup mempertimbangkan sanksi tetapi lebih kearah meninggalkan tugas profesional guru bk dalam menjalankan tugas pemberian layanan”**

70) Butir soal nomer 176

Hasil Analisis Alasan Salah dari Butir Soal Nomer 176 yaitu dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak memiliki fungsi sebagai saksi di pengadilan berkenaan dengan perkara hukum sebagai berikut:

Tabel 87. Hasil analisis alasan salah dari butir soal 176

NO	Alasan Salah	Frekuensi Alasan Sama
1	Dewan kode etik profesi memiliki fungsi sebagai saksi dalam pelanggaran yang berkaitan dengan profesi	10

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 macam alasan salah yang dikemukakan dari butir soal nomer 176 “Dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak memiliki fungsi sebagai saksi di pengadilan berkenaan dengan perkara hukum”. Jumlah responden yang mengungkapkan alasan “dewan kode etik profesi memiliki fungsi sebagai saksi dalam pelanggaran yang berkaitan dengan profesi” 1 guru BK. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada nomer soal 176 sebagian

besar guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-kelompok kerja di Kabupaten Bantul memberikan alasan salah **“dewan kode etik profesi memiliki fungsi sebagai saksi dalam pelanggaran yang berkaitan dengan profesi”**.

71) Butir soal nomer 180

Tidak terdapat responden yang memberikan alasan pada butir soal nomer 180 “Tugas dewan kode etik profesi yaitu merevisi rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling”.

Berdasarkan hasil analisis alasan pembenaran dari setiap butir soal, maka didapatkan kesimpulan alasan secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 88. Hasil Analisis Alasan Salah dari Keseluruhan Butir Soal

NO	Alasan
1	Anggota ABKIN tidak hanya lulusan PPK tetapi juga dari lulusan S-1 BK yang menjadi guru BK
2	Ranah pengembangan kemampuan yang perlu dimiliki yaitu bidang kemampuan profesional, pedagogik, sosial, kepribadian” dan “bidang industri bukan ranah pengembangan
3	Semua aspek kehidupan
4	Tujuan kode etik profesi BK Indonesia bukan mengatur misi organisasi, tetapi mendukung
5	Sebagai pedoman dalam berperilaku oleh guru BK
6	Karena yang wajib mematuhi hanya guru BK
7	Mengatur anggota profesi dalam menjalin hubungan dengan profesi lain
8	Mengatur guru BK melaksanakan kewajiban
9	Dalam profesinya dan dalam bermsayarakat
10	AD ART IKI bukan dasar hukum kode etik profesi BK
11	AD/ART PGRI merupakan salah satu dasar hukum kode etik organisasi profesi BK
12	UUD 1945 merupakan salah satu dasar hukum kode etik BK Indonesia

13	PP No. 74 thn 2008 tentang guru
14	Permendikbud No. 111 tentang BK PDPM bukan dasar hukum
15	DSPK merupakan dasar hukum kode etik profesi
16	DSPK salah satu dasar hukum kode etik profesi BK
17	Dasar hukum kode etik adalah PP 20 tentang pendidikan nasional
18	Justru pengembangan diri merupakan dasar pokok profesi BK
19	Minimal lulusan S-1 BK
20	Prodi BK S-1
21	Guru BK harus mendalami permasalahan konseli dalam menyelenggarakan BK
22	Tidak hanya pada bidang pendidikan tetapi juga bidang BK
23	Penggunaan pendekatan dan teknik konseling menyesuaikan permasalahan siswa
24	Guru BK memiliki peran dalam ABKIN dan kegiatan profesi BK
25	Melalui diklat, seminar, MGBK, dll
26	Guru pembimbing harus membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan BK
27	Guru BK dalam memberikan layanan kepada konseli harus dilaksanakan secara terus menerus dan tuntas terhadap masalah yang dihadapi konseli
28	Guru BK memberikan layanan BK kepada semua siswa untuk mencapai kemandirian, keberhasilan dan kehidupannya
29	Keluarga konseli
30	Perlu peroleh izin praktik terlebih dahulu dari organisasi profesi
31	Boleh bila diperlukan untuk kepentingan konseli
32	Penggunaan instrumen harus mengikuti pedoman yang berlaku untuk mendapatkan hasil yang valid
33	Identitas harus dirahasiakan kecuali seizin subyek
34	Sesuai masalah konseli
35	Bertindak secara obyektif
36	Bertindak secara obyektif
37	Bukan azas keterbukaan tetapi azas kerahasiaan
38	Perekaman data harus seizin konseli

39	Dapat menggunakan informasi konseli untuk keperluan penelitian
40	Guru BK harus memastikan kerahasiaan konseli kepada pihak lain
41	Tidak boleh menyampaikan nama, tetapi dengan simbol/kode, agar hasilnya obyektif
42	Pelayanan BK bisa juga dilakukan diluar ruangan; misalnya di taman, perpustakaan, tempat ibadah, industri
43	Pelayanan konseling dilaksanakan ditempat tertutup, aman, nyaman, rahasia tidak diketahui orang lain
44	Guru BK harus menyesuaikan dengan masalah, kebutuhan, dan kondisi konseli dalam memilih teknik konseling
45	Penilaian segera perlu karena mengetahui keberhasilan layanan sehingga dapat melakukan tindak lanjut, disesuaikan dengan tujuan layanannya
46	Perlu melakukan penilaian untuk mengetahui berhasil tidaknya layanan yang sudah diberikan
47	Tri kotomi: jiwa, perilaku, semangat
48	Mencakup 3 aspek (kognitif, afektif, dan psikomotor)
49	Ada kerja sama
50	Bidang layanan BK pribadi, sosial, belajar, dan karier
51	Wujud pertanggungjawaban kepada atasan melaporkan hasil kegiatan konseling atau layanan BK
52	Penggunaan ilmu harus sesuai kepentingan dan tujuan profesi BK
53	Pelayanan BK semata-mata untuk kebaikan konseli dan mencapai perkembangan yang optimal
54	Guru BK yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik profesi merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi BK
55	Guru BK yang menyebarkan rahasia konseli kepada pihak lain merupakan perilaku pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli
56	Kode etik menjaga harga dan martabat diri
57	Tindak kesalahan merupakan bentuk pelanggaran kode etik terhadap lembaganya
58	Harusnya menjalin kerja sama rekan seprofesi
59	Merebut konseli merupakan bentuk pelanggaran kode etik
60	Dicabut keanggotaan dari ABKIN dan dicabut izin prakteknya
61	Tahap kedua penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi memverifikasi informasi
62	Guru BK dapat melakukan pembelaan terhadap pelanggaran kode etik profesi
63	Ada tiga tingkat

64	Ada satu tingkat yaitu nasional
65	Dewan kode etik ada ditingkat nasional dan propinsi
66	Ada tingkatan, dari teguran lisan sampai tulisan dan pencabutan
67	Dewan kode etik profesi mempunyai fungsi memeriksa adanya pelanggaran terhadap kode etik oleh guru BK
68	Dewan kode etik memiliki tugas menerima pembelaan dari guru BK yang diadukan
69	Tidak cukup mempertimbangkan sanksi tetapi lebih kearah meninggalkan tugas profesional guru bk dalam menjalankan tugas pemberian layanan
70	Dewan kode etik profesi memiliki fungsi sebagai saksi dalam pelanggaran yang berkaitan dengan profesi

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif di atas, didapatkan beberapa hasil analisis. Pertama, hasil penelitian tentang pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling memahami isi dari kode etik profesi bimbingan dan konseling. Pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling termasuk dalam kategori tinggi disebabkan oleh beberapa alasan yaitu pentingnya memahami kode etik profesi bimbingan dan konseling agar dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat ketika menjalankan tugas sebagai guru BK. Hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh Mungin Eddy Wibowo (2005: 53) yang menyatakan bahwa kode etik profesi bimbingan dan konseling penting dalam mengatur tingkah laku pada waktu menjalankan tugas dan mengatur hubungan konselor dengan konseli, rekan sejawat, lembaga kerja, pimpinan, dan tenaga profesional lainnya. Alasan lain yaitu bahwa kode etik profesi bimbingan dan konseling perlu dipahami untuk mengatur guru BK dalam

melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan K. Bertens (2005) bahwa kode etik merupakan aturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus (pendidik) dalam masyarakat yang diharapkan menjadi pedoman oleh kelompok tersebut.

Kedua, pemahaman guru BK mengenai aspek dari dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling terkategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling memahami dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling termasuk dalam kategori tinggi disebabkan oleh beberapa alasan yaitu perlunya memahami dasar hukum kode etik bimbingan dan konseling agar kegiatan layanan bimbingan dan konseling dapat dilindungi secara hukum. Hal ini sesuai yang dikemukakan Van Hoose dan Kottler (1985) dalam Gladding (2012: 68) bahwa kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri yang dikendalikan oleh undang-undang. Alasan lain juga dikemukakan bahwa dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling perlu dipatuhi dan diamalkan oleh guru BK. Pengamalan kode etik profesi bimbingan dan konseling dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi BK. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh K. Bertens (2002) bahwa kode etik profesi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap suatu profesi sehingga ketika masyarakat meminta layanan BK merasa terjamin keamanannya karena sudah tercantum dalam kode etik profesi.

Ketiga, pemahaman guru BK mengenai aspek kualifikasi guru bimbingan dan konseling, kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan kegiatan profesional

bimbingan dan konseling terkategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling memahami kualifikasi guru bimbingan dan konseling, kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling. Alasan penyebab aspek ini termasuk dalam kategori tinggi yaitu pentingnya memahami syarat kualifikasi akademik seorang guru BK agar yang menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling tidak sembarangan orang dan terhindar dari mal-praktek. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Van Hoose dan Kottler (1985) dalam Gladding (2012: 68) bahwa kode etik melindungi praktisi dari pengaduan mal-praktik. Alasan lain yaitu perlunya memahami kompetensi yang dimiliki oleh guru BK dan kegiatan profesional yang dilakukan agar mempunyai kinerja yang sesuai dengan diharapkan oleh organisasi profesi dalam meningkatkan mutu kerja.

Keempat, pemahaman guru BK mengenai aspek pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling memahami pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Alasan penyebab aspek ini termasuk kategori tinggi yaitu guru BK perlu memahami kerahasiaan informasi dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Kerahasiaan penting karena termasuk dalam asas kerahasiaan BK sehingga perlu dipahami agar kegiatan layanan BK berjalan dengan lancar. Hal ini tercantum dalam Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan asas, salah satunya asas kerahasiaan yang menuntut guru BK merahasiakan segenap data dan keterangan konseli. Tanggung jawab guru BK

dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling juga tercantum dalam Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa tanggung jawab layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru BK dalam pengelolaan program layanan BK.

Kelima, pemahaman guru BK mengenai aspek pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling memahami berbagai pelanggaran dan sanksi dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling. Alasan penyebab aspek ini termasuk kategori tinggi yaitu guru BK perlu menjaga martabat dan harga diri konseli sehingga konselor perlu menghindari berbagai hal yang tidak boleh dilakukan agar tidak mendapat sanksi yang berujung pencabutan izin lisensi praktik. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Mungin Eddy Wibowo (2005: 53) bahwa kode etik memberikan perlindungan kepada konseli. Alasan lain yaitu untuk kode etik perlu menjaga nama baik profesi supaya tetap menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling.

Terakhir, pemahaman guru BK mengenai aspek tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling memahami berbagai tugas utama dan fungsi dari dewan kode etik profesi. Alasan penyebab aspek ini termasuk kategori tinggi yaitu guru BK penting mengetahui tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi BK karena memantau dan menangani pelanggaran terhadap kode etik profesi yang dilakukan oleh guru BK. Menurut R. Hermawan S (1979) dalam

Soetjipto & Raflis Kosasi (2011) bahwa dewan kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi. Alasan lain yaitu guru BK perlu memahami berbagai tingkatan dewan kode etik profesi BK yang menjaga tegaknya kode etik profesi sebagai profesi yang bermartabat.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya:

1. Beberapa guru-guru bimbingan dan konseling ada yang tidak memberikan alasan salah ketika menjawab pilihan salah.
2. Terdapat beberapa guru bimbingan dan konseling yang kurang bersungguh-sungguh dalam mengisi instrumen tes.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru BK di SMP Negeri se-Kelompok Kerja Kabupaten Bantul berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 55,77% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \geq 44,3$ dan guru BK dapat dikatakan paham mengenai kode etik profesi bimbingan dan konseling.
2. Tingkat pemahaman aspek dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 50% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \geq 11$, aspek kualifikasi guru bimbingan dan konseling, kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 57,7% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \geq 8,67$, aspek pelaksanaan pelayanan BK berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 63,5% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \geq 13$, aspek pelanggaran dan sanksi kode etik profesi BK berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 48,08% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \geq 7,67$, dan aspek tugas pokok dan fungsi dewan kode etik berada pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 55,77% dari 52 subyek yang masuk dalam interval skor $X \geq 4,67$ dan guru bimbingan dan konseling

dapat dikatakan paham mengenai semua aspek dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diberikan saran kepada sejumlah pihak sebagai berikut:

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling

Guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat melaksanakan kode etik profesi BK yang sudah dipahami dengan cara berperilaku dan berkegiatan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling.

2. Bagi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia diharapkan terus mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut mengenai kode etik profesi dengan menyesuaikan situasi kondisi di lapangan supaya anggota profesi BK dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling dapat bekerja secara optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kode etik profesi bimbingan dan konseling yang dirumuskan ABKIN agar data lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2005). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia..* Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- _____. (2007). *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal.* Bandung: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- _____. (2010). *Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).* Semarang: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Bernadette N. Setiadi, R.W. Matindas, dan Liche Seniati Chairy. (1988). *Pedoman Penulisan Skripsi Psikologi.* Jakarta: LPSP3-UI.
- Bimo Walgito. (2004). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah.* Yogyakarta: Andi.
- Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki. (2004). *Statistika Terapan untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas.* Jakarta: Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Djemari Mardapi. (2008). *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes.* Yogyakarta: Mitra Cendekia.
- Gladding, Samuel T. (2012). *Konseling: Profesi yang Menyeluruh, edisi Keenam.* (Alih bahasa: Dr. Ir. P.M. Winarmo, M. Kom; drg. Lilian Yuwono). Jakarta: Indeks.
- Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Guru Indonesia.
- K. Bertens. (2002). *Etika.* Jakarta: Gramedia Pustsaka Utama.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Morissan, Andy Corry, & Farid Hamid. (2012). *Metodologi Penelitian Survei.* Jakarta: Kencana.
- Mungin Eddy Wibowo. (2005). *Konseling Kelompok Perkembangan.* Semarang: UNY Press.

- Nana Sudjana & Ibrahim. (2004). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurfuadi. (2012). *Profesionalisme Guru*. Purwokerto: STAIN Press.
- Nisa Emirina Royan. (2014). Pola Perilaku Penemuan Informasi (Information Seeking Behavior) Di Kalangan Mahasiswa Skripsi. *Jurnal UNAIR* (Volume 3 Nomer 2 Tahun 2014). Hlm 12-13. Diakses dari <http://journal.unair.ac.id/pola-perilaku-penemuan-informasi-article-7627-media-136-category-8.html> pada tanggal 4 Desember 2015. Jam 14:30 WIB.
- Ondi Saondi & Aris Suherman. (2010). *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Prayitno, & Erman Amti. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- S. Margono. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saifuddin Azwar. (2013). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetjipto & Raflis Kosasi. (2011). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- _____. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumarna. (2005). *Analisis, Validitas, Reliabilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Rosda.
- Syamsu Yusuf, & A. Juntika Nurihsan. (2006). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rosda.
- TIM Dosen PPB FIP UNY. (2000). *Bimbingan dan Konseling Untuk Sekolah Menengah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tohirin. (2013). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- W.S. Winkel. (2007). *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi.
- _____. (2009). *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Yuanita Puspitasari. (2010). Pelaksanaan Kode Etik Konselor Di SMA/SMK SeKota Malang. Skripsi. *Abstrak Hasil Penelitian Bimbingan dan Konseling & Psikologi*. Malang: FIP UM. Diakses dari <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/BK-Psikologi/article/view/9374> pada tanggal 27 Januari 2016. Jam 13:30 WIB.
- Zainal Arifin. (2012). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel : Tingkat pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling

Teori : Kode etik profesi bimbingan dan konseling merupakan pedoman dan landasan moral yang berisi aturan bagi anggota profesi bimbingan dan konseling mencakup tingkah laku, sikap, akhlak, dan perbuatan yang wajib dipatuhi dan diamalkan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling dengan harapan dapat bertanggungjawab dalam menjalani tugasnya sebagai seorang profesional.

Kode etik profesi bimbingan dan konseling mencakup 5 aspek yang terdiri dari (1) dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling (2) kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling, (3) pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, (4) pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling, (5) tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling

Definisi Operasional : Pemahaman kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling merupakan kemampuan dalam menguasai makna pedoman yang berisi aturan bagi guru berprofesi di bidang bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling mencakup aspek (1) dasar kode

etik profesi bimbingan dan konseling (2) kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, (3) pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, (4) pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling, (5) tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling.

Sub Variabel

- : 1. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling,
2. Kualifikasi guru bimbingan dan konseling; kompetensi guru bimbingan dan konseling; dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling
3. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling,
4. Pelanggaran dan sanksi, kode etik profesi bimbingan dan konseling,
5. Tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling

No.	Sub Variabel	Indikator	Deskriptor	Butir Item Pernyataan		Jumlah
				Favou rable	Unfavour able	
1	Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling	d. Mengetahui organisasi profesi, ranah pengembangan kemampuan, prinsip-prinsip dasar profesionalitas, dan tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling.	e. Mengetahui organisasi profesi dan anggota bimbingan dan konseling di Indonesia	1	2, 3	42
			f. Mengetahui ranah pengembangan kemampuan anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling	5, 6	4	
			g. Memahami prinsip-prinsip dasar profesionalitas bagi konseli dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling	7, 8	9, 10	

			h. Memahami tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling	11, 12	13, 14	
		e. Mengetahui pengertian dan kewajiban mematuhi kode etik profesi, pentingnya etika organisasi, dan bentuk kode etik profesi bimbingan dan konseling	d. Memahami pengertian dan kewajiban mematuhi kode etik profesi	15, 17	16	
			e. Memahami pentingnya etika organisasi profesi bimbingan dan konseling	18, 20	19, 21	
			f. Mengetahui isi kode etik profesi bimbingan dan konseling	22, 24	23	
		f. Mengetahui landasan legal kode etik organisasi profesi bimbingan dan	g. Memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan	26, 27	25	

		konselin g Indonesi a	konseling Indonesia			
			h. Memahami Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia	28, 30	29	
			i. Memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia	31, 32	33	

			j. Memahami Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia	34, 35	36	
			k. Memahami Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) disusun dan diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai tahun 2003/2004 sebagai dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia	38, 39	37	

			1. Memahami Panduan Pengembangan diri disusun dan diberlakukan oleh Pusat Kurikulum Badan Pengembangan dan Penelitian Pendidikan tahun 2006 sebagai dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia	41, 42	40	
2.	Kualifikasi guru bimbingan dan konseling, kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan kegiatan profesional bimbingan dan konseling.	e. Mengetahui kualifikasi, bidang program studi, dan pendidikan profesi pada guru bimbingan dan konseling	c. Memahami kualifikasi minimal akademik guru bimbingan dan konseling	43	44, 45	43
			d. Memahami bidang program studi yang ditempuh sebagai kualifikasi guru bimbingan dan konseling	46, 48	47	
		f. Mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh	e. Memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani	49, 51	50	

		guru bimbingan dan konseling	f. Menguasai landasan teoretik keilmuan pendidikan dan bimbingan dan konseling	52, 53	54	
			g. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap konseli	56	55, 57	
			h. Mengembangkan pribadi dan profesionalitas diri secara berkelanjutan	59, 60	58, 61	
		g. Mengetahui kegiatan guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan yang profesional	f. Memahami dinamika pelayanan sebagai praktik pelayanan bimbingan dan konseling secara umum	62, 63	64	
			g. Memahami praktik pelayanan bimbingan dan konseling secara umum mengenai hubungan konselor dengan konseli	65, 67	66	
			h. Memahami praktik pelayanan bimbingan dan konseling pada unit kelembagaan	69, 70	68	

			i. Memahami praktik pelayanan bimbingan dan konseling pada unit keluarga	71, 73	72	
			j. Memahami praktik pelayanan bimbingan dan konseling secara mandiri, dukungan sejawat profesional konselor atau ahli lain.	75, 76	74	
		h. Mengetahui informasi, aplikasi instrumentasi, dan riset dalam kegiatan profesional guru bimbingan dan konseling	d. Memahami penyimpanan dan penggunaan informasi sebagai kegiatan profesional guru bimbingan dan konseling	77, 79	78	
			e. Memahami aplikasi instrumentasi sebagai kegiatan profesional guru bimbingan dan konseling	80, 81	82	
			f. Memahami riset sebagai kegiatan profesional guru bimbingan dan konseling	83, 85	84	

3.	Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling	g. Mengetahui penghargaan dan keterbukaan guru bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan layanan	c. Memahami penghargaan konseli terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling	86, 87	88	52
			d. Memahami kebenaran dan keterbukaan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling	91	89, 90	
		h. Mengetahui kerahasiaan dan pelibatan berbagi informasi tentang konseli.	e. Memahami kerahasiaan informasi tentang diri konseli.	92, 94	93	
			f. Memahami kerahasiaan informasi dalam bentuk rekaman data konseling	95, 97	96	
			g. Memahami kerahasiaan penggunaan informasi konseli untuk penelitian	99, 100	98	
			h. Memahami pelibatan pemberian informasi konseli dengan pihak lain	102	101, 103	

		i. Mengetahui setting dan kondisi sosial-psikologis penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling	c. Memahami suasana dan sarana fisik penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling	104, 106	105	
			d. Memahami kondisi sosial-psikologis dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling	107, 109	108	
		j. Mengetahui pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling	b. Memahami berbagai pendekatan dan teknik bimbingan dan konseling yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling	110, 113	111, 112	
		k. Mengetahui tahapan penilaian layanan konseling dan	d. Memahami laseg, laijapen, dan laijapang sebagai penilaian setiap kali melakukan layanan bimbingan dan konseling	116	114, 115	

		hal-hal yang dinilai, baik dalam format konseling perorangan atau kelompok.	e. Memahami aspek penilaian guru bimbingan dan konseling terhadap konseli setiap melakukan layanan bimbingan dan konseling perseorangan	118, 119	117	
			f. Memahami aspek penilaian guru bimbingan dan konseling terhadap konseli setiap melakukan layanan bimbingan dan konseling klasikal/ kelompok	120, 122	121	
		l. Mengetahui tanggung jawab konselor dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling	f. Memahami tanggung jawab konselor kepada konseli	124, 125	123	
			g. Memahami tanggung jawab konselor kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya	127, 128	126	
			h. Memahami tanggung jawab konselor kepada ilmu dan profesinya	130, 131	129	
			i. Memahami tanggung jawabnya	132, 134	133	

			kepada diri sendiri			
			j. Memahami tanggung jawabnya kepada Tuhan yang Maha Esa	135, 137	136	
4.	Pelanggaran dan sanksi kode etik profesi bimbingan dan konseling	d. Mengetahui bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling	f. Memahami pelanggaran yang dilakukan guru bimbingan dan konseling secara umum	138, 140	139	22
			g. Memahami pelanggaran yang dilakukan guru bimbingan dan konseling terhadap konseli	142, 143	141	
			h. Memahami pelanggaran yang dilakukan guru bimbingan dan konseling terkait dengan lembaga tempat bekerja	145, 146	144	
			i. Memahami pelanggaran yang dilakukan guru bimbingan dan konseling terhadap rekan sejawat	147, 149	148	

			j. Memahami pelanggaran yang dilakukan guru bimbingan dan konseling terhadap organisasi profesi	151, 152	150	
		e. Mengetahui sanksi pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling	c. Memahami berbagai bentuk pemberian sanksi pelanggaran kepada konselor yang melanggar kode etik profesi bimbingan dan konseling	153, 155	154	
		f. Mengetahui mekanisme penerapan sanksi terhadap konselor yang melanggar kode etik profesi bimbingan dan konseling	d. Memahami tahapan penerapan sanksi yang melanggar kode etik profesi bimbingan dan konseling	156, 158	157, 159	

5.	Dewan kode etik profesi	c. Mengetahui adanya tingkatan dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling	b. Memahami ada dewan kode etik tingkat nasional dan dewan kode etik tingkat daerah	160	161, 162	21
		d. Memahami tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling	g. Memahami tugas pokok dewan kode etik profesi dalam menjaga tegaknya kode etik	164, 165	163	
			h. Memahami fungsi dewan kode etik profesi dalam mengadakan verifikasi konselor yang melanggar kode etik profesi	167, 168	166	
			i. Memahami tugas dewan kode etik dalam menerima dan mempertimbangkan pembelaan dari konselor yang diadukan melanggar kode etik	170, 171	169	

			j. Memahami tugas dewan kode etik dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan sanksi kepada konselor yang melanggar kode etik	172, 173	174	
			k. Memahami fungsi dewan kode etik sebagai saksi dalam pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling	175, 177	176	
			l. Memahami tugas dewan kode etik dalam pemberian sanksi bagi yang melanggar kode etik profesi bimbingan dan konseling	178	179, 180	
Jumlah Total Item				107	73	180

Lampiran 2. Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN

KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING



OLEH:

FAJAR ILHAM

NIM 12104244015

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

JURUSAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2016

220

KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

A. KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga dengan izin-Nya dapat menyusun instrumen ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan Tugas Akhir Skripsi (TAS) di program sarjana jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Terkait hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling untuk mengisi lembar jawab instrumen yang telah disediakan.

Data yang saya dapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dan tidak ada hubungannya dengan pangkat atau jabatan Bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling. Untuk itu Bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling tidak perlu ragu untuk mengisi instrumen tes ini dengan sejujur-jujurnya, karena dengan data yang akurat hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami sangat berharap partisipasi Bapak/Ibu konselor dalam pemberian informasi. Atas partisipasi Bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling saya mengucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, Mei 2016

Peneliti

Fajar Ilham

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Berdo'alah terlebih dahulu sebelum menjawab tiap pernyataan
2. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan seksama
3. Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang tersedia
4. Beri tanda silang (X) pada salah satu alternatif jawab yang sesuai dengan pemahaman Bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling. Adapun alternatif jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:

B : Benar

S : Salah

5. Jika bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling memilih jawaban benar, maka tidak perlu mengisi kolom perbaiki yang telah disediakan.
6. Jika Bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling memilih jawaban salah, maka dimohon Bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling mengisi pernyataan yang benar di kolom yang telah disediakan.

C. CONTOH PENGISIAN

Contoh 1:

No	Pernyataan	Jawaban	
		B	S
1	Kerahasiaan tidak termasuk dalam asas bimbingan dan konseling	X	
	Alasan salah : -		

Pemberian tanda silang (X) pada kolom **B** menjelaskan bahwa pernyataan mengenai kerahasiaan termasuk dalam asas bimbingan dan konseling menurut Bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling yaitu **benar**, sehingga Bapak/Ibu guru paham dengan pernyataan tersebut dan tidak perlu mengisi kolom alasan.

Contoh 2:

No	Pernyataan	Jawaban	
		B	S
1	Kerahasiaan tidak termasuk dalam asas bimbingan dan konseling		X
	Alasan salah : Kerahasiaan merupakan salah satu asas bimbingan dan konseling		

Pemberian tanda silang (X) pada kolom **S** menjelaskan bahwa pernyataan mengenai kerahasiaan tidak termasuk dalam asas bimbingan dan konseling menurut Bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling yaitu **salah**, sehingga Bapak/Ibu guru tidak paham dengan pernyataan tersebut dan perlu memperbaiki pernyataan yang menurut Bapak/Ibu guru benar di kolom alasan.

Kerahasiaan tes ini sangat dijaga, dengan demikian jawablah pernyataan-pernyataan dengan **JUJUR** dan **TELITI** sesuai dengan pemahaman Bapak/Ibu guru bimbingan dan konseling.

Selamat Mengerjakan

D. IDENTITAS RESPONDEN

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Nama | : |
| 2. Jenis Kelamin | : Laki-laki/Perempuan *) |
| 3. Usia | : |
| 4. Pendidikan Terakhir | : D III/S1/S2/S3 |
| 5. Ijazah | : BK/ Non-BK |

Jika Non-BK, jurusan yang diambil adalah

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 6. Lama bertugas menjadi guru BK | : thn/.....bln |
| 7. Tugas selain sebagai guru BK *) | : a. Kepala sekolah |
| | b. Wakil kepala sekolah |
| | c. Koordinator BK |
| | d. Koperasi |
| | e. Perpustakaan |
| | f. Pembina pramuka |
| | g. |

*) coret yang tidak perlu

E. PERNYATAAN

No	Pernyataan	Jawaban	
		B	S
1	Induk organisasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia adalah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia		
	Alasan salah :		
2	Tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu membantu anggota organisasi profesi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional		
	Alasan salah :		
3	Anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia yaitu pendidik dan ahli bimbingan dan konseling minimal tamatan program studi sarjana (S1) bimbingan dan konseling dan harus lulusan program pendidikan profesi konselor (PPK)		
	Alasan salah :		
4	Ranah pengembangan kemampuan yang perlu dimiliki anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu bidang pendidikan, agama, dan industri		
	Alasan salah :		
5	Ranah pengembangan kemampuan anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu bidang pribadi, belajar, sosial, dan karier		
	Alasan salah :		
6	Ranah pengembangan kemampuan anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu bidang keluarga dan kewarganegaraan		

	Alasan salah :		
7	Prinsip dasar penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu setiap individu mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
8	Prinsip dasar penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan dirinya sesuai dengan hak-hak pribadinya dan aturan hukum		
	Alasan salah :		
9	Prinsip dasar penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu setiap individu mempunyai kewajiban untuk memahami arti penting dari pilihan hidup		
	Alasan salah :		
10	Prinsip dasar penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu setiap individu berkewajiban memperoleh informasi yang mendukung pengembangan dirinya		
	Alasan salah :		
11	Tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu membantu anggota organisasi profesi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional		
	Alasan salah :		
12	Tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu memberikan panduan perilaku yang berkarakter bagi anggota organisasi bimbingan dan konseling		

	Alasan salah :		
13	Tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu mengatur misi organisasi profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
14	Tujuan dibentuknya kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah sebagai syarat untuk memenuhi terbentuknya induk organisasi profesi bimbingan dan konseling, yaitu ABKIN		
	Alasan salah :		
15	Kode etik profesi adalah pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
16	Kode etik profesi bimbingan dan konseling merupakan suatu sistem nilai dan moral yang berisi aturan tentang apa yang perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan ditugaskan dalam bentuk ucapan atau tindakan.		
	Alasan salah :		
17	Seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
18	Pentingnya etika organisasi profesi bimbingan dan konseling bagi konselor yaitu menjadi pedoman dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		

19	Etika organisasi profesi bimbingan dan konseling tidak mengatur anggota profesi dalam menjalin hubungan dengan organisasi profesi lain		
	Alasan salah :		
20	Konselor perlu memahami nilai dan moral etika organisasi profesi dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
21	Etika organisasi profesi bimbingan dan konseling menjelaskan landasan kepribadian anggota profesi dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
22	Kode etik profesi memuat standar dan perilaku guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
23	Kode etik profesi memuat kepribadian guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
24	Kode etik profesi berisi aturan bagi guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		

25	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Konselor Indonesia merupakan dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia		
	Alasan salah :		
26	Dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ABKIN		
	Alasan salah :		
27	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Guru Republik Indonesia bukan merupakan dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia		
	Alasan salah :		
28	Dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu Pancasila		
	Alasan salah :		
29	Undang-undang Dasar 1945 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia		
	Alasan salah :		
30	Dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika		
	Alasan salah :		
31	Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		

32	Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang guru bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
33	Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2005 tentang guru merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
34	Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
35	Permendiknas RI No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
36	Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
37	Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) tahun 2003/2004 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling		

	Alasan salah :		
38	Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) tahun 2007/2008 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
39	Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) tahun 2005/2006 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
40	Panduan Pengembangan diri yang diberlakukan tahun 2006 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
41	Panduan Pengembangan diri yang diberlakukan tahun 2010 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
42	Panduan Pengembangan diri yang diberlakukan tahun 2005 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
43	Kualifikasi akademik guru bimbingan dan konseling yaitu minimal lulusan sarjana pendidikan (S-1)		
	Alasan salah :		

44	Kualifikasi akademik guru bimbingan dan konseling yaitu minimal lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK)		
	Alasan salah :		
45	Kualifikasi akademik guru bimbingan dan konseling yaitu minimal lulusan diploma dua (D-II)		
	Alasan salah :		
46	Program studi bimbingan dan konseling menyiapkan tenaga pendidik profesional menjadi guru bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
47	Program studi psikologi menyiapkan tenaga pendidik profesional menjadi guru bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
48	Program studi ilmu komunikasi bukan merupakan bidang yang ditempuh untuk menyiapkan tenaga pendidik profesional menjadi guru bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
49	Guru bimbingan dan konseling dalam memahami konseli perlu mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis pada diri konseli		
	Alasan salah :		
50	Guru bimbingan dan konseling tidak perlu memahami permasalahan konseli secara mendalam dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		

51	Guru bimbingan dan konseling perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan konseli dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
52	Guru bimbingan dan konseling mempunyai kompetensi dalam menguasai landasan teori dan praksis ilmu pendidikan		
	Alasan salah :		
53	Guru bimbingan dan konseling mempunyai kompetensi dalam menguasai landasan teori dan praksis ilmu bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
54	Guru bimbingan dan konseling menguasai landasan teori dan praksis hanya pada ruang lingkup ilmu pendidikan		
	Alasan salah :		
55	Guru bimbingan dan konseling merancang program layanan bimbingan dan konseling hanya pada satuan pendidikan		
	Alasan salah :		
56	Guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling perlu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli		
	Alasan salah :		

57	Guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling menggunakan pendekatan dan teknik konseling secara direktif-komprehensif		
	Alasan salah :		
58	Guru bimbingan dan konseling tidak mempunyai peran dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
59	Guru bimbingan dan konseling perlu memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional		
	Alasan salah :		
60	Guru bimbingan dan konseling perlu menunjukkan kinerja yang profesional dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
61	Guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kemampuan profesionalitas diri dapat dilakukan melalui diskusi antar seprofesi		
	Alasan salah :		
62	Guru bimbingan dan konseling berhak tidak melanjutkan hubungan dengan konseli apabila tidak memperoleh manfaat dari layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
63	Guru bimbingan dan konseling wajib menangani konseli sesuai dengan kesepakatan antara keduanya merupakan dinamika pelayanan bimbingan dan konseling secara umum		
	Alasan salah :		

64	Guru bimbingan dan konseling tidak perlu membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
65	Hubungan guru bimbingan dan konseling dengan konseli secara umum yaitu guru bimbingan dan konseling menghormati harkat, martabat, dan keyakinan diri konseli		
	Alasan salah :		
66	Hubungan guru bimbingan dan konseling dengan konseli secara umum yaitu guru bimbingan dan konseling tidak diwajibkan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling hingga tuntas kepada konseli		
	Alasan salah :		
67	Hubungan guru bimbingan dan konseling dengan konseli secara umum yaitu guru bimbingan dan konseling tidak diperkenankan memaksa konseli melakukan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
68	Pelayanan guru bimbingan dan konseling pada unit kelembagaan yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli yang bermasalah saja		
	Alasan salah :		
69	Pelayanan guru bimbingan dan konseling pada unit kelembagaan yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli yang membutuhkan bantuan		
	Alasan salah :		

70	Kegiatan profesional guru bimbingan dan konseling pada unit kelembagaan yaitu memahami visi, misi, tujuan, pola kerja dan nilai-nilai yang berlaku di lembaga tempat bekerja		
	Alasan salah :		
71	Pelayanan guru bimbingan dan konseling pada unit keluarga yaitu mengenal kondisi kehidupan keluarga tempat yang bersangkutan bekerja		
	Alasan salah :		
72	Pelayanan guru bimbingan dan konseling pada unit keluarga yaitu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada anggota keluarga tertentu saja		
	Alasan salah :		
73	Pelayanan guru bimbingan dan konseling pada unit keluarga yaitu menghormati kondisi kehidupan keluarga tempat yang bersangkutan bekerja		
	Alasan salah :		
74	Guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara mandiri tidak perlu memperoleh izin praktik terlebih dahulu dari organisasi profesi		
	Alasan salah :		
75	Guru bimbingan dan konseling saling mendukung dan menghormati rekan kerja merupakan dukungan antar seprofesi		
	Alasan salah :		

76	Guru bimbingan dan konseling menolong rekan seprofesi yang membutuhkan bantuan merupakan dukungan antar konselor seprofesi		
	Alasan salah :		
77	Catatan tentang diri konseli merupakan informasi yang bersifat rahasia		
	Alasan salah :		
78	Guru bimbingan dan konseling tidak boleh menyampaikan data konseli kepada keluarganya merupakan kegiatan profesional layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
79	Kegiatan profesional guru bimbingan dan konseling dalam penggunaan informasi yaitu data konseli hanya boleh disampaikan kepada orang yang berwenang menggunakannya		
	Alasan salah :		
80	Guru bimbingan dan konseling mempunyai wewenang dalam penggunaan instrumen tes atau non-tes sebagai kegiatan profesional bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
81	Kegiatan profesional guru bimbingan dan konseling yaitu memberitahukan hasil tes atau non tes tentang konseli kepada orang tuanya		
	Alasan salah :		

82	Guru bimbingan dan konseling dalam penggunaan instrumen tidak diwajibkan mengikuti pedoman yang berlaku bagi instrumen tes atau non-tes tersebut		
	Alasan salah :		
83	Guru bimbingan dan konseling dalam melakukan riset sebagai kegiatan profesional bimbingan dan konseling tidak boleh merugikan subyek yang diteliti.		
	Alasan salah :		
84	Guru bimbingan dan konseling dalam melaporkan hasil riset diperbolehkan memberitahu identitas subjek penelitian		
	Alasan salah :		
85	Guru bimbingan dan konseling tidak perlu melakukan penelitian bukan merupakan kegiatan profesional layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
86	Guru bimbingan dan konseling dalam memahami sasaran layanan perlu menghargai konseli sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya		
	Alasan salah :		
87	Guru bimbingan dan konseling dalam memahami sasaran layanan perlu menghargai konseli sebagai individu yang mempunyai latar belakang budaya berbeda-beda		
	Alasan salah :		

88	Guru bimbingan dan konseling dalam memahami sasaran layanan perlu memposisikan konseli sebagai objek layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
89	Guru bimbingan dan konseling dalam menangani permasalahan konseli yaitu bertindak secara subyektif		
	Alasan salah :		
90	Guru bimbingan dan konseling dalam membahas permasalahan konseli yaitu bertindak secara subyektif		
	Alasan salah :		
91	Guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling tidak pernah memihak konseli		
	Alasan salah :		
92	Guru bimbingan dan konseling dalam memberikan informasi kepada pihak lain perlu merahasiakan informasi konseli		
	Alasan salah :		
93	Guru bimbingan dan konseling dalam berbagi informasi konseli perlu izin dari yang bersangkutan sesuai dengan asas keterbukaan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
94	Guru bimbingan dan konseling tidak boleh sembarangan menyebarkan informasi mengenai diri konseli kepada orang lain		

	Alasan salah :		
95	Guru bimbingan dan konseling perlu menjaga kerahasiaan rekaman data konseling dari pihak lain		
	Alasan salah :		
96	Guru bimbingan dan konseling dalam perekaman data diperbolehkan langsung merekam proses konseling tanpa meminta izin dari konseli		
	Alasan salah :		
97	Guru bimbingan dan konseling dalam hal penyimpanan informasi perlu menjaga kerahasiaan rekaman data konseling secara sungguh-sungguh.		
	Alasan salah :		
98	Guru bimbingan dan konseling tidak dapat menggunakan informasi konseli untuk keperluan penelitiannya.		
	Alasan salah :		
99	Syarat penggunaan informasi konseli untuk penelitian yaitu konselor mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari tempat yang bersangkutan bekerja		
	Alasan salah :		
100	Guru bimbingan dan konseling diperbolehkan menggunakan informasi konseli untuk keperluan penelitiannya		
	Alasan salah :		

101	Guru bimbingan dan konseling tidak perlu memastikan kerahasiaan data konseli dalam memberikan informasi kepada pihak lain		
	Alasan salah :		
102	Guru bimbingan dan konseling dalam memberikan informasi konseli kepada pihak lain perlu izin terlebih dahulu dari konseli yang bersangkutan		
	Alasan salah :		
103	Guru bimbingan dan konseling boleh menyampaikan nama konseli pada saat konferensi kasus dilaksanakan		
	Alasan salah :		
104	Guru bimbingan dan konseling perlu memperhatikan suasana dan ruangan tempat penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
105	Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diselenggarakan di dalam ruangan		
	Alasan salah :		
106	Tempat penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dapat dilengkapi dengan alat tempat berbaring		
	Alasan salah :		
107	Pelayanan konseling dilaksanakan di tempat “tertutup”, artinya tidak dilihat oleh pihak ketiga yang dapat mencemari asas kerahasiaan		
	Alasan salah :		

108	Pelayanan konseling dilaksanakan di tempat “terbuka”, artinya proses layanan konseling dapat dilihat oleh orang lain		
	Alasan salah :		
109	Tempat penyelenggaraan konseling dipersiapkan senyaman mungkin sehingga konseli merasa dihargai		
	Alasan salah :		
110	Konseling psikoanalisis, ego, psikologi individual, analisis transaksional, self, gestalt, behavioral, realitas, rasional-emosional, dan pancawaskita merupakan pendekatan konseling yang perlu dipahami oleh guru bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
111	Guru bimbingan dan konseling dalam memilih teknik konseling tidak harus sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan kondisi konseli.		
	Alasan salah :		
112	Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan teknik remedial dalam rangka pemeliharaan kondisi kekinian konseli		
	Alasan salah :		
113	Guru bimbingan dan konseling dalam memahami diri konseli dapat menggunakan teknik instrumen tes maupun non-tes		
	Alasan salah :		

114	Guru bimbingan dan konseling tidak perlu melakukan penilaian jangka pendek dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
115	Guru bimbingan dan konseling tidak perlu melakukan penilaian jangka segera setiap kali menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
116	Guru bimbingan dan konseling perlu melakukan penilaian jangka panjang dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
117	Guru bimbingan dan konseling tidak perlu melakukan penilaian hasil layanan setiap menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling perorangan		
	Alasan salah :		
118	Aspek penilaian konselor terhadap konseli dalam bimbingan dan konseling perorangan yaitu upaya dan kesungguhan		
	Alasan salah :		
119	Aspek penilaian konselor terhadap konseli dalam bimbingan dan konseling perorangan yaitu kondisi afektif atau perasaan		
	Alasan salah :		
120	Aspek penilaian konselor terhadap konseli dalam bimbingan dan konseling kelompok yaitu sikap dan perasaan		
	Alasan salah :		

121	Aspek penilaian konselor terhadap konseli dalam bimbingan dan konseling kelompok yaitu kesungguhan		
	Alasan salah :		
122	Aspek penilaian konselor terhadap konseli dalam bimbingan dan konseling kelompok yaitu kondisi kognitif atau berpikir		
	Alasan salah :		
123	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling terhadap konseli yaitu hanya membantu konseli dalam memenuhi kebutuhan bidang pribadi dan kariernya.		
	Alasan salah :		
124	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling terhadap konseli yaitu memelihara hak-hak konseli yang menguntungkan bagi dirinya.		
	Alasan salah :		
125	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling terhadap konseli yaitu mengarahkan segenap kemampuan profesionalnya yang terbaik dalam membantu konseli		
	Alasan salah :		
126	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada atasan yaitu tidak perlu memberikan informasi kepada pimpinan lembaga tentang perannya terhadap konseli		
	Alasan salah :		
127	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada atasan yaitu menerima kritik dan masukan dari pimpinan		

	lembaga sebagai pertimbangan dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
128	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada pimpinan lembaga yaitu melakukan kerja sama dengan dengan seluruh perangkat kelembagaan		
	Alasan salah :		
129	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada ilmu yaitu menggunakan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan di luar tujuan profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
130	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada profesi yaitu secara konsisten tunduk pada aturan kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
131	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada ilmu yaitu menyadari bahwa ilmu yang telah dipelajari wajib diimplementasikan dengan baik		
	Alasan salah :		
132	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada diri sendiri yaitu berusaha terus menerus mengembangkan kompetensi keprofesionalannya		
	Alasan salah :		
133	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada diri sendiri yaitu menyadari kualitas layanan bimbingan dan		

	konseling yang dilakukannya berdampak pada pribadi konseli		
	Alasan salah :		
134	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada diri sendiri yaitu melaksanakan layanan bimbingan dan konseling penuh dedikasi		
	Alasan salah :		
135	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu memohon ridho demi suksesnya penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
136	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu menyadari bahwa pelayanan bimbingan dan konseling bukan untuk kebaikan konseli		
	Alasan salah :		
137	Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu menjalankan pelayanan bimbingan dan konseling dengan niat ibadah		
	Alasan salah :		
138	Guru bimbingan dan konseling melanggar nilai-nilai yang mencemarkan nama baik profesi merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling secara umum		
	Alasan salah :		

139	Guru bimbingan dan konseling melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik organisasi profesi bukan merupakan pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling secara umum		
	Alasan salah :		
140	Guru bimbingan dan konseling melanggar norma yang mencemarkan nama baik profesi merupakan pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling secara umum		
	Alasan salah :		
141	Guru bimbingan dan konseling yang menyebarkan rahasia konseli kepada pihak lain bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli		
	Alasan salah :		
142	Guru bimbingan dan konseling melakukan perbuatan asusila (seperti pelecehan seksual) kepada konseli merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli		
	Alasan salah :		
143	Guru bimbingan dan konseling mengabaikan permintaan konseli untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli		
	Alasan salah :		
144	Guru bimbingan dan konseling melakukan tindak kesalahan terhadap lembaga tempat bekerja bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap lembaga kerja		
	Alasan salah :		

145	Guru bimbingan dan konseling tidak melakukan tindak pidana terhadap lembaga tempat bekerja bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap lembaga kerja		
	Alasan salah :		
146	Guru bimbingan dan konseling tidak melakukan tindak pidana terhadap lembaga tempat bekerja bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap lembaga kerja		
	Alasan salah :		
147	Guru bimbingan dan konseling menolak bekerja sama dengan rekan seprofesi merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
148	Guru bimbingan dan konseling merebut konseli dari rekan seprofesi bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
149	Guru bimbingan dan konseling menghina dan bersikap arogan terhadap rekan seprofesi merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
150	Guru bimbingan dan konseling mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap organisasi profesi		
	Alasan salah :		

151	Guru bimbingan dan konseling mencemarkan nama baik organisasi profesinya merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap organisasi profesi		
	Alasan salah :		
152	Guru bimbingan dan konseling tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi merupakan pelanggaran kode etik profesi terhadap organisasi profesi		
	Alasan salah :		
153	Pemberian sanksi bagi guru bimbingan dan konseling yang melanggar kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu teguran secara lisan		
	Alasan salah :		
154	Pemberian sanksi bagi guru bimbingan dan konseling yang melanggar kode etik profesi yaitu dicabut keanggotaan dari ABKIN dan tetap diberi izin praktik mandiri		
	Alasan salah :		
155	Pemberian sanksi bagi guru bimbingan dan konseling yang melanggar kode etik profesi yaitu peringatan keras secara tertulis		
	Alasan salah :		
156	Tahapan pertama penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu adanya pengaduan dari konseli mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		

157	Tahapan keempat penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu guru bimbingan dan konseling dipanggil untuk verifikasi pengaduan yang disampaikan oleh konseli		
	Alasan salah :		
158	Tahapan kedua penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi yaitu konseli melaporkan adanya pelanggaran kode etik profesi kepada dewan kode etik profesi		
	Alasan salah :		
159	Tahapan ketiga penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu guru bimbingan dan konseling yang melakukan pelanggaran tidak diberi kesempatan untuk membela diri		
	Alasan salah :		
160	ABKIN membentuk dewan kode etik profesi dalam dua tingkatan yaitu tingkat daerah dan tingkat nasional		
	Alasan salah :		
161	ABKIN membentuk dewan kode etik profesi dalam tiga tingkatan yaitu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional		
	Alasan salah :		
162	Dewan kode etik profesi dalam struktural organisasi profesi ABKIN hanya ada satu tingkatan yaitu tingkat nasional		
	Alasan salah :		

163	Tugas pokok dewan kode etik profesi yaitu mengatur tegaknya kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
164	Tugas pokok profesi yaitu menjaga tegaknya kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi yang bermartabat		
	Alasan salah :		
165	Dewan kode etik profesi mempunyai tugas dalam menjaga dan mengawasi tegaknya kode etik profesi		
	Alasan salah :		
166	Dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak mempunyai fungsi dalam memeriksa adanya pelanggaran terhadap kode etik oleh guru bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
167	Fungsi dewan kode etik profesi yaitu mengadakan verifikasi tentang pelanggaran kode etik profesi oleh guru bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
168	Fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu memeriksa dan memverifikasi tentang adanya pelanggaran kode etik profesi oleh guru bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
169	Dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak mempunyai tugas menerima pembelaan dari guru		

	bimbingan dan konseling yang diadukan melanggar kode etik profesi		
	Alasan salah :		
170	Tugas pokok dewan kode etik profesi yaitu mempertimbangkan pembelaan dari guru bimbingan dan konseling yang diadukan melanggar kode etik profesi		
	Alasan salah :		
171	Tugas pokok dewan kode etik profesi yaitu menerima dan mempertimbangkan pembelaan dari guru bimbingan dan konseling yang diadukan melanggar kode etik profesi		
	Alasan salah :		
172	Tugas dewan kode etik profesi yaitu menjatuhkan sanksi kepada guru bimbingan dan konseling yang terbukti melanggar kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
173	Tugas dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu mempertimbangkan sanksi kepada guru bimbingan dan konseling yang terbukti melanggar kode etik profesi		
	Alasan salah :		
174	Tugas dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu tidak memberikan hukuman kepada guru bimbingan dan konseling yang terbukti melanggar kode etik profesi		
	Alasan salah :		
175	Fungsi dewan kode etik profesi yaitu bertindak sebagai saksi di pengadilan berkenaan dengan permasalahan hukum		

	Alasan salah :		
176	Dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak memiliki fungsi sebagai saksi di pengadilan berkenaan dengan perkara hukum		
	Alasan salah :		
177	Fungsi dewan kode etik profesi yaitu memberikan keterangan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh konselor		
	Alasan salah :		
178	Tugas dewan kode etik profesi yaitu secara langsung menangani pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
179	Tugas dewan kode etik profesi yaitu merumuskan kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		
180	Tugas dewan kode etik profesi yaitu merevisi rumusan kode etik profesi bimbingan dan konseling		
	Alasan salah :		

Lampiran 3. Analisis SPSS 17.0 Uji Reliabilitas & Statistik Deskriptif

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	52	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	52	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.863	180

Statistics

		Kode_Etik_Profesi_BK	Dasar_Kode_Etik_Profesi_BK	Kualifikasi_Kompetensi_Kegiatan_BK	Pelaksanaan_Pelayanan_BK	Pelanggaran_dan_Sanksi_Kode_Etik	Tugas_Pokok_dan_Fungsi_Dewan_Kode_Etik
N	Valid	52	52	52	52	52	52
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		43.17	10.29	8.90	12.31	6.81	4.83
Std. Error of Mean		1.572	.427	.476	.562	.268	.205
Median		47.00	10.50	9.00	13.00	7.00	5.00
Mode		47	10	8 ^a	14	8	4 ^a
Minimum		13	1	0	1	3	0
Maximum		60	16	13	19	10	7
Sum		2245	535	463	640	354	251

Lampiran 4. Tabulasi Data Penelitian Kuantitatif

Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
4	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
6	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
7	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
8	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
9	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
10	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
12	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
13	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
14	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
15	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
16	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
17	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
18	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
19	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
20	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
21	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
22	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
23	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
24	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
25	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
26	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1

27	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
29	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
30	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
32	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
33	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
34	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
35	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
36	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
37	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
38	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
39	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
40	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
41	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0
42	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
43	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
44	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
45	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
46	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
47	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
48	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
49	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
50	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
52	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
Jum. Skor Kel. Tinggi	15	9	5	7	15	7	15	15	3	1	15	13	6	7	15	3	15	15	8	15
Jum. Skor Kel. Rendah	14	2	3	6	10	7	10	15	3	3	14	14	4	2	14	1	10	15	3	13
ITK	0,97	0,37	0,27	0,43	0,83	0,47	0,83	1,00	0,20	0,13	0,97	0,90	0,33	0,30	0,97	0,13	0,83	1,00	0,37	0,93

IDB	0,07	0,47	0,13	0,07	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	- 0,13	0,07	- 0,07	0,13	0,33	0,07	0,13	0,33	0,00	0,33	0,13
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	15	2	14	5	10	6	15	13	9	14	8	5	9	15	7	6	14	11	4	13	11	11	12
0	12	2	11	0	13	7	11	6	10	14	8	1	11	13	0	2	8	9	3	13	8	14	5
0,00	0,90	0,13	0,83	0,17	0,77	0,43	0,87	0,63	0,63	0,93	0,53	0,20	0,67	0,93	0,23	0,27	0,73	0,67	0,23	0,87	0,63	0,83	0,57
0,00	0,20	0,00	0,20	0,33	- 0,20	- 0,07	0,27	0,47	- 0,07	0,00	0,00	0,27	- 0,13	0,13	0,47	0,27	0,40	0,13	0,07	0,00	0,20	- 0,20	0,47

45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1

1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1
15	15	13	11	15	11	15	14	15	12	3	15	5	13	15	15	4	12	15	14	14	11	14	11
11	15	6	13	14	7	13	15	15	3	1	15	2	6	15	13	1	10	12	7	15	3	15	8
0,87	1,00	0,63	0,80	0,97	0,60	0,93	0,97	1,00	0,50	0,13	1,00	0,23	0,63	1,00	0,93	0,17	0,73	0,90	0,70	0,97	0,47	0,97	0,63
0,27	0,00	0,47	- 0,13	0,07	0,27	0,13	- 0,07	0,00	0,60	0,13	0,00	0,20	0,47	0,00	0,13	0,20	0,13	0,20	0,47	- 0,07	0,53	- 0,07	0,20

69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1

1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
13	15	12	4	15	12	15	15	15	9	15	15	8	13	15	12	6	15	15	4	15	13	10	14
13	13	13	4	10	6	14	14	14	5	14	11	14	6	14	1	4	10	14	3	8	8	9	12
0,87	0,93	0,83	0,27	0,83	0,60	0,97	0,97	0,97	0,47	0,97	0,87	0,73	0,63	0,97	0,43	0,33	0,83	0,97	0,23	0,77	0,70	0,63	0,87
0,00	0,13	- 0,07	0,00	0,33	0,40	0,07	0,07	0,07	0,27	0,07	0,27	- 0,40	0,47	0,07	0,73	0,13	0,33	0,07	0,07	0,47	0,33	0,07	0,13

93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	15	15	9	15	10	12	14	11	15	7	15	12	11	15	9	15	15	14	3	15	15	14
0	13	15	6	15	6	13	12	6	14	3	14	9	9	13	4	13	12	9	1	15	11	8
0,17	0,93	1,00	0,50	1,00	0,53	0,83	0,87	0,57	0,97	0,33	0,97	0,70	0,67	0,93	0,43	0,93	0,90	0,77	0,13	1,00	0,87	0,73
0,33	0,13	0,00	0,20	0,00	0,27	- 0,07	0,13	0,33	0,07	0,27	0,07	0,20	0,13	0,13	0,33	0,13	0,20	0,33	0,13	0,00	0,27	0,40

116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1

1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
15	13	14	13	13	1	12	14	12	15	12	11	13	13	15	14	15	5	15	15	15	14	15	14
14	9	13	13	14	3	9	7	10	14	5	13	12	4	14	15	14	0	14	14	7	13	15	8
0,97	0,73	0,90	0,87	0,90	0,13	0,70	0,70	0,73	0,97	0,57	0,80	0,83	0,57	0,97	0,97	0,97	0,17	0,97	0,97	0,73	0,90	1,00	0,73
0,07	0,27	0,07	0,00	- 0,07	- 0,13	0,20	0,47	0,13	0,07	0,47	- 0,13	0,07	0,60	0,07	- 0,07	0,07	0,33	0,07	0,07	0,53	0,07	0,00	0,40

140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0

1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12	14	14	12	14	15	14	12	15	8	14	13	12	10	11	12	2	14	8	14	3	11	2
14	9	11	14	4	14	11	10	7	15	13	15	10	10	4	12	13	1	11	4	9	2	6	0
0,97	0,70	0,83	0,93	0,53	0,93	0,87	0,80	0,63	1,00	0,70	0,97	0,77	0,73	0,47	0,77	0,83	0,10	0,83	0,40	0,77	0,17	0,57	0,07
0,07	0,20	0,20	0,00	0,53	0,00	0,27	0,27	0,33	0,00	- 0,33	- 0,07	0,20	0,13	0,40	- 0,07	- 0,07	0,07	0,20	0,27	0,33	0,07	0,33	0,13

164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0

0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1
14	14	9	15	15	8	13	14	13	14	6	11	11	12	13	4	6
14	11	4	12	12	3	12	14	11	11	5	11	8	11	12	2	3
0,93	0,83	0,43	0,90	0,90	0,37	0,83	0,93	0,80	0,83	0,37	0,73	0,63	0,77	0,83	0,20	0,30
0,00	0,20	0,33	0,20	0,20	0,33	0,07	0,00	0,13	0,20	0,07	0,00	0,20	0,07	0,07	0,13	0,20

Lampiran 5. Alasan Salah dari Setiap Butir Soal Pernyataan

1. Pernyataan nomer 2 “Anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia hanya untuk lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK)”

Alasan
Hanya untuk lulusan jurusan BK, PP, Psikologi
Anggota ABKIN tidak hanya lulusan PPK tetapi juga dari lulusan S-1 BK yang menjadi guru BK
Untuk pembimbing dan konselor secara keseluruhan
Anggota ABKIN adalah mereka yang berkecimpung dalam layanan BK yang sudah memahami syarat-syarat yang ditentukan
Tidak hanya untuk lulusan PPK
Prodi BK juga termasuk didalamnya
S-1 BK bisa juga masuk
Anggota ABKIN juga diperuntukan lulusan BK tidak hanya lulusan PPK
Seluruh konselor sekolah/ diluar sekolah
Untuk semua guru BK meski belum/ tidak harus PPK
Untuk semua anggota ABKIN
ABKIN beranggotakan guru BK/konselor dan lulusan pendidikan profesi konselor
Anggota bisa dari praktisi pendidikany lainnya tetapi yang paham profesi konselor
S1 jurusan BK bisa menjadi anggota ABKIN
Tidak hanya tapi boleh S-1
Guru BP/BK

2. Pernyataan nomer 4 “Ranah pengembangan kemampuan yang perlu dimiliki anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu bidang pendidikan, agama, dan industri”

Alasan
Bidang industri bukan ranah pengembangan
Karena guru harus memiliki kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional
Semua bidang kehidupan
Tidak hanya tiga ranah seperti diatas tetapi ranah yang lain perlu dimiliki

Harus meliputi ranah kompetensi, kepribadian, sosial, profesional dan akademik
Ranah pengembangan kemampuan yang perlu dimiliki yaitu bidang kemampuan profesional, pedagogik, sosial, kepribadian
Bidang sosial juga, industri tidak
Bidang pendidikan
Menyeluruh
Tanpa industri
Ditambah lingkup bimbingan dan konseling
Semua aspek kehidupan di masyarakat
Ditambah bidang bimbingan dan konseling
Industri tidak termasuk

3. Pernyataan nomer 9 “Prinsip dasar penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yaitu setiap individu mempunyai kewajiban untuk memahami arti penting dari pilihan hidup”

Alasan
Semua aspek kehidupan
Semua aspek kehidupan

4. Pernyataan nomer 13 “Tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu mengatur misi organisasi profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
Mengatur organisasi profesi BK
Tujuan kode etik profesi BK Indonesia bukan mengatur misi organisasi, tetapi mendukung
Mendukung bukan mengatur
Mengatur visi & misi organisasi profesi BK
Tujuannya adalah mendukung misi organisasi profesi BK dalam mengatur
Tujuan yang benar mendukung misi organisasi profesi
Sebagai pedoman Guru BK dalam melaksanakan tugasnya
Sebagai pedoman guru BK dalam melaksanakan tugasnya
Sebagai pedoman guru BK dalam melaksanakan tugasnya

Acaun atau pedoman dalam tugas
Tidak menyimpang kode etik
Mengatur visi dan misi BK

5. Pernyataan nomer 14 “Tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia yaitu mengatur misi organisasi profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
Hanya mendukung
Untuk membuat pedoman terhadap kegiatan & karakteristik guru BK
Tujuan kode etik profesi BK; melindungi konselor, yang menjadi anggota asosiasi, mendukung misi asosiasi BK, prinsip/panduan perilaku etis konselor, membantu konselor dalam memberikan pelayanan
Mengatur misi organisasi profesi guru BK dan meningkatkan tugas profesionalnya
Sebagai pedoman guru BK dalam berperilaku
Bukan sebagai syarat
Pedoman dalam berperilaku guru BK
Sebagai pedoman dalam berperilaku oleh guru BK
Landasan atau panduan kerja

6. Pernyataan nomer 17 “Seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
Karena yang wajib mematuhi hanya guru BK

7. Pernyataan nomer 19 “Seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
Mengatur anggota profesi BK menjalin hubungan dengan organisasi lain

Mengatur anggota profesi dalam menjalin hubungan dengan organisasi profesi lain
Mengatur anggota profesi dalam menjalin hubungan dengan profesi lain
Mengatur anggota profesi
Menjalin misal mereferral
Mengatur anggota
ABKIN mengatur anggota profesi menjalin kerjasama dengan organisasi profesi
Mengatur anggota profesi
Ada hubungan/ bisa menjalin
Mengatur anggota profesi

8. Pernyataan nomer 22 “Kode etik profesi memuat standar dan perilaku guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling”

Alasan
Selama sebagai guru konselor
Mengatur guru BK melaksanakan kewajiban
Semua sebagai guru

9. Pernyataan nomer 24 “Kode etik profesi berisi aturan bagi guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling”

Alasan
Beda antara aturan dengan kode etik
Dalam profesinya dan dalam bermsayarakat
Dalam profesinya dan dalam bermasyarakat

10. Pernyataan nomer 25 “Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Konselor Indonesia merupakan dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia”

Alasan
Ikatan Konselor Indonesia tidak termasuk dasar hukum kode etik
Tidak termasuk dalam dasar landasan
Bukan dasar hukum kode etik organisasi profesi BK Indonesia
AD ART IKI bukan dasar hukum kode etik profesi BK

11. Pernyataan nomer 27 “Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Guru Republik Indonesia bukan merupakan dasar hukum kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia”

Alasan
AD/ART PGRI merupakan salah satu dasar hukum kode etik organisasi profesi BK
AD ART PGRI merupakan dasar hukum kode etik
AD ART PGRI merupakan dasar hukum kode etik
Ada kode etik guru yang tertuang juga dalam AD PGRI
Merupakan dasar pelaksanaan
Sebagai dasar hukum
Merupakan dasar
Termasuk dasar hukum
Harusnyan menjadi dasar untuk kode etik organisasi
AD/ART PGRI merupakan salah satu dasar hukum kode etik profesi
BK termasuk profesi guru
AD-ART sebagai landasan dosen juga

12. Pernyataan nomer 29 “Undang-undang Dasar 1945 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia”

Alasan
UUD 1945 merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling
UUD 1945 dasar hukumnya
Sebagai dasar kode etik salah satunya adalah UUD 1945
UUD 1945 merupakan sumber seagla hukum dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara
Salah satu dasar hukum

Pancasila
UUD 1945 dasar hukumnya
UUD 1945 adalah dsar hukum sesudah Pancasila
Sebagai dasar hukum
UUD 1945 merupakan dasar hukum kode etik BK
Harusnya menjadi pertimbangan dasar hukum kode etik profesi
UUD 1945 merupakan salah satu dasar hukum kode etik BK Indonesia
UUD 1945 adalah sebagai dasar hukum
Sebagai dasar hukum 1 Pancasila dan UUD 1945
UUD merupakan dasar hukum kode etik
UUD 1945 merupakan salah satu dasar hukum kode etik
UUD termasuk dasar hukum kode etik
UUD 1945 merupakan dasar hukum kode etik
UUD 1945 sebagai sumber segala hukum

13. Pernyataan nomer 33 “Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2005 tentang guru merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
Kode etik yang mencetuskan ABKIN
Yang betul UU No. 20 thn 2003 tentang sisdiknas
UU No 20 tahun 2003 tentang Standar dan PP No 74 tahun 2008 tentang Guru
PP No. 74 thn 2008 tentang guru
Dasarnya pancasila dan tuntutan profesi
PP No. 74 thn 2008 ttg guru
Dasar hukum RI, pancasila, UUD 1945
Dasar hukum RI pancasila, UUD 1945

14. Pernyataan nomer 36 “Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
Yang betul Permendiknas RI No. 27 thn 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor
Permendikbud No. 111 tentang BK PDPM bukan dasar hukum
Permendikbud No. 111 tentang BK PDPM bukan dasar hukum
Panduan dan juknis kurikulum 2013
Yang betul Permendiknas RI No. 27 thn 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
Permendikbud No. 111 bukan dasar hukum kode etik

15. Pernyataan nomer 37 “Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) tahun 2003/2004 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
DSPK merupakn dasar hukum kode etik
Standar profesi salah satu dasar kode etik profesi
Iya, DSPK merupakan dasar hukum kode etik
Harusnya sebagai dasar hukum
PP 20 tentang pendidikan nasional juga termasuk
DSPK merupakan dasar hukum kode etik profesi
DSPK sebagai dasar hukum

16. Pernyataan nomer 38 “Dasar Standarisasi Profesi Konseling (DSPK) tahun 2007/2008 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
DSPK salah satu dasar hukum kode etik profesi BK
DSPK salah satu dasar hukum
DSPK sebagai dasar hukum
DSPK sebagai dasar hukum

17. Pernyataan nomer 42 “Panduan Pengembangan diri yang diberlakukan tahun 2005 bukan merupakan dasar hukum kode etik profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
Justru pengembangan diri merupakan dasar pokok profesi BK
Dasar hukum kode etik adalah PP 20 tentang pendidikan nasional
Harus mengembangkan kemampuan

18. Pernyataan nomer 44 “Kualifikasi akademik guru bimbingan dan konseling yaitu minimal lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK)”

Alasan
Lulusan S-1 BK
S-1 BK
Sarjan bidang BK (S-1 sarjana BK)
Minimal lulusan S-1 BK
Prodi BK S-1 dan PPK
Minimal lulusan S-1 BK
Minimal lulusan pendidikan S-1 jurusan BK
S-1 dan PPK
S1 BK
S1 Bimbingan Konseling
S1 BK
S1 BK
harusnya S1 jurusan BK
S-1 pendidikan bimbingan dan konseling
Lulusan BK
Minumal S-1 BK
S1 jurusan BK
S-1 BK
S-1 saja cukup
S-1 BK
S1 BK juga dapat
S1 BK

19. Pernyataan nomer 47 “Program studi psikologi menyiapkan tenaga pendidik profesional menjadi guru bimbingan dan konseling”

Alasan
Untuk kualifikasi guru BK harus dari BK/psikologi pendidikan
Program Profesi Konseling
Prodi BK
Menjadi psikolog
Menjadi Psikolog
Menjadi psikolog
Program studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan
Menjadi Psikolog
Menjadi psikolog
Harusnya S-1 program BK atau program pendidikan konselor/pendidikan profesi konselor
Permendikbud No 111 Tahun 2014 mengatur Guru BK adalah lulusan S1 BK
Guru BK adalah S-1 BK
Program Studi Pendidikan dan Bimbingan
Sebagai pendukung/ penunjang tugas sebagai Guru BK
Prodi BK
Prodi BK
Studi PPK
Prodi BK menyiapkan tenaga pendidik profesional menjadi guru BK
Yang disiapkan Prodi Psikologi Pendidikan

20. Pernyataan nomer 50 “Guru bimbingan dan konseling tidak perlu memahami permasalahan konseli secara mendalam dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling”

Alasan
Guru BK harus mendalami permasalahan konseli dalam menyelenggarakan BK
Kewajiban guru BK memahami konseli secara mendalam sebelum pemberian bantuan tetapi tidak larut
Harus memahami secara mendalam sehingga dalam memberikan bantuan dapat tepat dan tuntas
Perlu memahami untuk suksesnya konseling
Guru BK wajib memahami permasalahan konseli dalam menyelenggarakan layanan BK
Perlu
Perlu memahami permasalahan konseli secara mendalam

Perlu memahami untuk keberhasilan proses konseling
Harus mendalami/ memahami secara mendalam masalah konseli
Perlu memahami
Perlu memahami
Guru BK harus memahami masalah
Perlu mendalami dan memahami permasalahan konseli
Harus memahami secara mendalam
Sangat perlu memahami permasalahan konseli secara mendalam
Guru BK harus mendalami/ memahami masalah konseli
Perlu memahami permasalahan konseli
Harus memahami sehingga dapat menentukan langkah
Perlu memahami permasalahan konseli
Guru BK perlu memahami permasalahan konseli secara mendalam dalam menyelenggarakan layanan BK
Dalam menyelenggarakan layanan BK perlu memahami konseli secara mendalam

21. Pernyataan nomer 54 “Guru bimbingan dan konseling menguasai landasan teori dan praksis hanya pada ruang lingkup ilmu pendidikan”

Alasan
Tidak hanya pada ruang lingkup ilmu pendidikan
Menguasai teori dan praktis pendidikan dan bimbingan
Disegala bidang
Tidak hanya pada bidang pendidikan tetapi juga bidang BK
Ditambah ilmu/teori yang mendukung bagi pemberian layanan
Semua ruang lingkup
Tidak cukup hanya lingkup pendidikan tetapi juga ilmu-ilmu yang lain: misalnya pekerjaan industri, sosial, dan pengembangan ilmu pengetahuan umum
Ditambah ilmu yang mendukung pelaksanaan layanan BK
Semua ruang lingkup
Guru BK harus menguasai landasan teori bukan hanya ilmu pendidikan
Berbagai disiplin ilmu
Harus lebih luas karena lebih dari ruang lingkup pendidikan
Bisa dalam pengetahuan lain yang lebih luas
Lingkup ilmu pendidikan, bimbingan, psikologi, globalisasi
Psikologi, agama juga
Pendukung guru BK diharap mampu berwawasan luas

Ilmu pendidikan dan ilmu BK
Harus wawasan luas
Ilmu BK juga
Boleh juga dari sumber lain tetapi dasarnya pada ilmu pendidikan

22. Pernyataan nomer 57 “Guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling menggunakan pendekatan dan teknik konseling secara direktif-komprehensif”

Alasan
Metode yang digunakan elektik/campuran
Penggunaan pendekatan dan teknik konseling menyesuaikan permasalahan siswa
Pendekatan disesuaikan dengan masalahnya
Boleh memilih jenis pendekatan sesuai dengan masalahnya
Boleh memiliki pendekatan disesuaikan dengan masalahnya
Pendekatan sesuai sikon dan masalah
Secara campuran tekniknya

23. Pernyataan nomer 58 “Guru bimbingan dan konseling tidak mempunyai peran dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
Mempunyai peran dalam organisasi dan kegiatan profesi BK
Guru BK sangat berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK
Berdiri dan berjalannya organisasi profesi bimbingan tergantung pada guru BK yang berperan didalamnya
Mempunyai peran dalam kegiatan profesi BK dalam mengembangkan profesinya
Guru BK punya peran besar dalam organisasi profesi BK
Punya peran dalam organisasi dan kegiatan profesi BK
Guru BK berperan sebagai anggota organisasi dan kegiatan profesi BK
Berperan
Berperan
Punya peran dalam organisasi dan kegiatan profesi BK
Guru BK sangat berperan

Berperan
Berperan
Sangat berperan dalam organisasi
Guru BK memiliki peran dalam ABKIN dan kegiatan profesi BK
Punya peran yang sangat penting
Perlu peran penuh
Punya peran dalam organisasi profesi
Sangat berperan dalam kegiatan layanan BK
Sangat berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi
Guru BK sangat berperan
Sebagai anggota sekecil apapun ada perannya
Mempunyai peran
Perlu mempunyai peran

24. Pernyataan nomer 61 “Guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kemampuan profesionalitas diri dapat dilakukan melalui diskusi antar seprofesi”

Alasan
Melalui seminar dan MGBK
Pengembangan kemampuan profesionalitas tidak hanya dengan diskusi, tapi bisa dengan berbagai media lain
Melalui diklat, seminar, MGBK, dll
Melalui seminar, diklat, dll

25. Pernyataan nomer 64 “Guru bimbingan dan konseling tidak perlu membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan bimbingan dan konseling”

Alasan
Perlu membuat catatan ringkas tentang layanan BK
Guru pembimbing harus membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan BK
harus memiliki catatan sebagai data
Harus selalu membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan sebagai bukti dokumentasi, evaluasi, analisis dan tindak lanjut
Catatan-catatan sangat diperlukan untuk memberikan layanan lebih lanjut
Perlu membuat catatan ringkas

Catatan tentang kegiatan konseling/ bimbingan perlu sekali sebagai bahan mengadakan kerjasama dengan pihak lain maupun kemajuan pelayanan bimbingan
Ringkasan catatan sangat penting untuk kelanjutan layanan
Perlu
Perlu membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan BK
Perlu catatan ringkas
Perlu sebagai dokumen, sewaktu-waktu dibutuhkan
Perlu
Untuk menghindari lupa hasil BK harus dicatat dan disimpan sebagai bukti atau dokumen
Perlu
Perlu untuk dokumentasi
Guru BK harus memiliki catatan kegiatan layanan BK yang komplit sampai dengan evaluasi dan tindak lanjutnya
Perlu membuat catatan
setiap kegiatan perlu ditulis, lengkap sebab untuk laporan dsb
Harus buat catatan kegiatan dan ringkasan
Perlu membuat catatan dalam kegiatan layanan
Harus membuat catatan ringkas
Perlu sebagai dokumen, sewaktu-waktu diperlukan
Perlu membuat
Sebagai evaluasi dan tindak lanjut harus berpedoman pada hasil catatan ringkas kejadian sebelumnya
Perlu membuat catatan ringkas
Perlu untuk langkah berikutnya
Perlu buat membuat catatan
Harus membuat catatan
Harus membuat
Harus buat

26. Pernyataan nomer 66 “Hubungan guru bimbingan dan konseling dengan konseli secara umum yaitu guru bimbingan dan konseling tidak diwajibkan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling hingga tuntas kepada konseli”

Alasan
Diwajibkan memberikan pelayanan BK kepada konseli
Dalam pelayanan BK harus tuntas

Pelayanan wajib diberikan secara tuntas
Guru BK dalam memberikan layanan kepad konseli harus dilaksanakan secara terus menerus dan tuntas terhadap masalah yang dihadapi konseli
Pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli harus sampai tuntas
Sampai tuntas, sesuai kebutuhan konseli
Guru BK wajib memberikan layanan BK hingga tuntas kepada konseli
Wajib memberikan layanan secara/ hingga tuntas
Sampai tuntas sesuai kebutuhan
Sampai tuntas
Sampau tuntas, kecuali konseli minta dialihkan/kepada pihak lain dan konselor tidak merasa tidak mampu (referral)
Wajib sampai tuntas
Guru BK harus secara tuntas memberikan layanan BK sepanjang dikehendaki konseli
Harus tuntas sehingga hasilnya harus optimal
Sebaiknya sampai tuntas
Secara tuntas
Harus tuntas, hanya waktu yang tidak ditentukan
Layanan harus sampai tuntas
Sedapat mungkin pelayanan harus tuntas
Tergantung kasus yang dibahas, jika di luar rumah di referral
Diberikan sampai tuntas
Guru BK diwajibkan melakukan penilaian BK hingga tuntas

27. Pernyataan nomer 68 “Pelayanan guru bimbingan dan konseling pada unit kelembagaan yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli yang bermasalah saja”

Alasan
Semua peserta didik mendapat layanan BK
Tergantung berat ringannya pelanggaran
BK diberikan pada seluruh siswa yang menjadi tanggung jawabnya
Semua siswa/sasaran layanan mendapat kesempatan layanan BK yang sama
Konseli tidak bermasalahpun bisa sebagai tindakan preventif
Guru BK memberikan layanan BK kepada semua siswa untuk mencapai kemandirian dan keberhasilan dan kehidupannya
BK melayani semua siswa

Kepada semua konseli baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah
Konseli bermasalah juga bermasalah juga bisa sebagai tindakan preventif
Semua konseli tidak pandang bermasalah atau tidak
BK melayani semua siswa
Laporan diberikan pada semua konseli
Semua siswa (BK melayani semua siswa)
Tidak hanya yang bermasalah
BK for all/semua siswa baik bermasalah atau tidak
Seluruh siswa/ warga lembaga
Baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah
Pada semua konseli baik yang bermasalah maupun tidak bermasalah
Memberi layanan pada semua yang menjadi tanggungjawabnya
Bimbingan konseling untuk semua, semua umur, tidak pandang bermasalah/ tidak
Semua diberi layanan
Semua siswa baik yang punya/ tidak masalah yang dihadapi
Semua konseli baik yang bermasalah atau tidak
Semua siswa harus dapat BK
Semua konseli berhak
Guru BK memberikan layanan BK kepada semua siswa, tidak hanya yang bermasalah
Layanan BK diberikan semua siswa yang ada di lembaga pendidikan

28. Pernyataan nomer 73 “Pelayanan guru bimbingan dan konseling pada unit keluarga yaitu menghormati kondisi kehidupan keluarga tempat yang bersangkutan bekerja”

Alasan
Keluarga konseli
Terlalu jauh harus dengan keluarga

29. Pernyataan nomer 74 “Guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara mandiri tidak perlu memperoleh izin praktik terlebih dahulu dari organisasi profesi”

Alasan
Perlu memperoleh izin praktik dulu dari organisasi profesi
Seharusnya memiliki izin asosiasi profesi
Harus mendapatkan ijin dari ABKIN sebagai organisasi profesi
Harus ada ijin dari organisasi profesi
Perlu memperoleh izin praktik
Ijin dahulu
Harus punya izin dan lisensi konselor
Perlu peroleh izin praktik terlebih dahulu dari organisasi profesi
Ada ijin praktik
harus minta izi
Harus punya lisensi konselor dan izin
Perlu memperoleh izin
Karena untuk membuka pada tes mandiri perlu legalitas dengan ambil pendidikan profesi tersebut
Harus ada izin
Perlu memperoleh izin praktik
Perlu memperoleh izin praktik
Harus ada izin
Mendapat izin yang wajib dan berwenang
Harus ada izin

30. Pernyataan nomer 78 “Guru bimbingan dan konseling tidak boleh menyampaikan data konseli kepada keluarganya merupakan kegiatan profesional layanan bimbingan dan konseling”

Alasan
Harus menyampaikan, kalau perlu kerjasama
Boleh menyampaikan sejauh membantu pemecahan masalah siswa
Guru BK harus menyempurnakan data konseli kepada keluarganya
Data pendukung dikeluarga penting untuk membantu penyelesaian permasalahan konseli
Keluarga konseli harus tahu
Apabila diperlukan boleh
Keluarga harus tahu
Keluarga (orang tua) harus tahu

Keluarga harus tahu
Boleh bila diperlukan untuk kepentingan konseli
Boleh menyampaikan data konseli kepada keluarga
Sebagai subyek
Boleh menyampaikan kepada keluarganya
Harus bisa simpan rahasia

31. Pernyataan nomer 82 “Guru bimbingan dan konseling dalam penggunaan instrumen tidak diwajibkan mengikuti pedoman yang berlaku bagi instrumen tes atau non-tes tersebut”

Alasan
Wajib sesuai pedoman instrumen
Penggunaan instrumen harus sesuai pedoman
Pedoman merupakan hal penting
Dalam penggunaan instrumen harus mengikuti pedoman yang berlaku
Penggunaan instrumen wajib mengikuti pedoman yang berlaku
Instrumen BK tetap berpedoman pada instrumen tes maupun non tes
Wajib mengikuti pedoman instrumen
Penggunaan instrumen sebagai awal dalam pemberian layanan harus didasarkan pada pedoman yang berlaku supaya tepat dalam penggunaan hasilnya
Instrumen tes/non tes merupakan pedoman instrumen BK
Berpedoman pada pedoman yang berlaku
Wajib mengikuti yang berlaku
Harus mengikuti pedoman
Harus sesuai dengan pedoman
Penggunaan instrumen harus mengikuti pedoman yang berlaku untuk mendapatkan hasil yang valid
Harus sesuai prosedur instrumen
Perlu karena harus melihat progres konseli
Sesuai dengan instrumen tes/ non-tes
Wajib mengetahui pedoman yang berlaku dengan instrumen tes atau non-tes
Harus mengikuti pedoman instrumen
Harus sesuai dengan pedoman
Tidak akan tergalai masalah yang dialami konseli
Wajib mengikuti pedoman

Wajib mengikuti pedoman
Harus memakai pedoman yang tepat sesuai teori keilmuan
Guru BK dalam menggunakan instrumen wajib mengikuti pedoman

32. Pernyataan nomer 84 “Guru bimbingan dan konseling dalam melaporkan hasil riset diperbolehkan memberitahu identitas subjek penelitian”

Alasan
Identitas konseli tetap menjadi kerahasiaan
Kerahasiaan subyek harus tetap dijaga
Tidak boleh memberi tahu identitas konseli
Subyek penelitian dirahasiakan
Subyek penelitian tidak perlu dipublikasikan
Identitas dirahasiakan
Dirahasiakan
Tidak baik
Dengan kode
Masalah yang menyangkut praktik klien tetap dirahasiakan
Harus dirahasiakan dengan asas kerahasiaan
Tetap menjaga kerahasiaan
Identitas harus dirahasiakan kecuali seizin subyek
Tidak boleh diberitahukan
Tidak boleh memberitahukan identitas subyeknya
Tidak boleh diberitahukan

33. Pernyataan nomer 86 “Guru bimbingan dan konseling dalam memahami sasaran layanan perlu menghargai konseli sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya”

Alasan
Sesuai masalah konseli

34. Pernyataan nomer 89 “Guru bimbingan dan konseling dalam menangani permasalahan konseli yaitu bertindak secara subyektif”

Alasan
Tidak subyektif
Bertindak secara obyektif
Seharusnya masalah ditangani secara obyektif
Harus bertindak secara obyektif
Penangan konseli harus obyektif
Secara obyektif
Bertindak secara obyektif
Secara obyektif
Obyektif
Obyektif
Harus bertindak secara obyektif. Tidak memihak
Obyektif
Bertindak secara obyektif
Secara obyektif
Harusnya lebih obyektif
Secara obyektif
Bertindak obyektif
Obyektif
Secara obyektif
Secara obyektif
Secara obyektif
Secara obyektif
Secara obyektif
Bertindak secara obyektif

35. Pernyataan nomer 90 “Guru bimbingan dan konseling dalam menangani permasalahan konseli yaitu bertindak secara subyektif”

Alasan
Secara obyektif
Bertindak secara obyektif
Bertindak secara obyektif
Obyektifitas konseli harus dijunjung tinggi
Secara obyektif
Guru BK harus bersifat obyektif

Obyektif
Secara obyektif
Bertindak secara obyektif
Obyektif
Harusnya secara obyektif
Obyektif
Secara obyektif
Harus obyektif
Secara obyektif
Bertindak obyektif
Guru Bk harus obyektif
Secara subyektif
Secara obyektif
Secara obyektif
Harus obyektif
Secara obyektif
Klien sebagai subyek, guru BK beri alternatif pemecahan/solusi
Guru BK dalam membahas permasalahan konseli yaitu bertindak secara obyektif

36. Pernyataan nomer 93 “Guru bimbingan dan konseling dalam berbagi informasi konseli perlu izin dari yang bersangkutan sesuai dengan asas keterbukaan bimbingan dan konseling”

Alasan
Azas keterbukaan bukan izin konseli
Bukan azas keterbukaan tetapi azas kerahasiaan
Asas Kerahasiaan
Tidak usah izin
Asas kerahasiaan
Kerahasiaan
Nama konseli diganti dengan kode/dengan memakai kode
Data konseli harus dirahasiakan, boleh hanya untuk pendidikan, identitas dirahasiakan
Asas rahasia bukan keterbukaan

36. Pernyataan nomer 96 “Guru bimbingan dan konseling dalam perekaman data diperbolehkan langsung merekam proses konseling tanpa meminta izin dari konseli”

Alasan
Meminta izin dulu dari konseli
Dalam perekaman data harus minta izin konseli
Segala sesuatu yang berhubungan dengan konseli harus mendapat izin dari konseli
Harus meminta ijin dari konseli
Ijin konseli dulu
Pelaksanaan kegiatan layanan BK yang didokumentasikan perlu minta ijin dan kesepakatan dari pihak terlebih dulu
Izin terlebih dahulu kepada konseli
Ijin dulu konseli
Wajib minta izin terlebih dahulu
Perekaman data harus seijin konseli
Harus seijin konseli
Izin dulu dari konseli
Seizin konseli
Seizin konseli
harus izin dulu pada konseli

37. Pernyataan nomer 98 “Guru bimbingan dan konseling tidak dapat menggunakan informasi konseli untuk keperluan penelitiannya.”

Alasan
Informasi konseli dapat digunakan bila untuk pengembangan ilmu
Untuk kepentingan riset diperbolehkan sepanjang identitas konseli dirahasiakan
Dapat menggunakan informasi konseli untuk keperluan penelitian
Informasi konseli penting dalam penelitian BK
Dapat kalau dapat izin dari konseli
Boleh asal sesuai dengan judul penelitian
Sesuai dengan kebutuhan penelitian
Dapat untuk keperluan penelitian tapi harus seijin konselinya
Bisa untuk penelitian
Diperbolehkan untuk menggunakan data tentang penelitian dengan mempertimbangkan asas kerahasiaan

Dapat menggunakan informasi
Informasi konseli bisa digunakan bila untuk pengembangan ilmu
Dapat digunakan untuk penelitian
Diperbolehkan demi peningkatan
Boleh, dengan memberikan identitas
Dapat menggunakan informasi
Informasi konseli dapat digunakan untuk pengembangan diri
Diperlukan sesuai dengan kebutuhan
Bisa menggunakan informasi

38. Pernyataan nomer 101 “Guru bimbingan dan konseling tidak perlu memastikan kerahasiaan data konseli dalam memberikan informasi kepada pihak lain”

Alasan
Kerahasiaan konseli perlu, hanya boleh di ketahui pihak lain yang kompeten data kerahasiaan konseli
Guru BK harus menjaga rahasia masalah konseli
Pihak yang boleh mengetahui data konseli hanya yang berkepentingan dalam bantuan pada konseli
Karena kerahasiaan konseli harus tetap terjaga
Guru BK harus memastikan kerahasiaan konseli kepada pihak lain
Kerahasiaan merupakan salah satu asa BK, kerahasiaan hanya boleh dipergunakan untuk keperluan konseli
Kerahasiaan konseli tetap dijaga
Justru pada konselilah akhir penyelesaian permasalahan, kesepakatan tergantung pada kemampuan konteks dalam mengambil keputusan
Kerahasiaan konseli dalam layanan konseling perlu dijaga kerahasiaannya demi kepentingan perkembangan diri konseli
Kerahasiaan merupakan asa BK jadi harus betul-betul dilaksanakan
Perlu memastikan kerahasiaan data konseli
Tentang diri dan seluk beluk klien tetap dirahasiakan
Data harus dirahasiakan dari pihak yang tidak punya kewenangan
Tidak sesuai azas BK
Konselor harus memastikan kerahasiaan informasi data konseli
Kerahasiaan dijaga, diberikan pada yang berkepentingan dalam rangka membantu konseli

Sesuai kode etik guru BK salah satunya adalah merahasiakan kliennya
Guru BK dalam melaksanakan layanan BK memihak konseli
Guru BK perlu memastikan kerahasiaan data konseli
Kerahasiaan data tetap harus dijaga
Data konseli harus dirahasiakan sesuai kode etik
Rahasia konseli dijaga
Guru BK harus selalu menjaga kerahasiaan identitas konseli/ data sebagai informasi
Perlu memastikan dulu informasinya
Perlu memastikan kerahasiaan data konseli
Rahasia konseli harus dijaga
Harusnya menjelaskan kepada konseli jika bisa merahasiakan
Prinsip Kerahasiaan
Kerahasiaan harus dijaga

39. Pernyataan nomer 103 “Guru bimbingan dan konseling boleh menyampaikan nama konseli pada saat konferensi kasus dilaksanakan”

Alasan
Tidak boleh menyampaikan nama, tetapi dengan simbol/kode, agar hasilnya obyektif
Nama tidak boleh disampaikan, tetapi hanya permasalahannya yang disampaikan
Nama konseli harus disamarkan, sesuai unsur/asas kerahasiaan
Kerahasiaan nama konseli
Kerahasiaan perlu dijaga agar konseli tidak merasa diadili
Nama konseli harus disembunyikan
Memakai kode
Nama konseli disembunyikan biar obyektif menanganinya
Memakai kode
Nama dirahasiakan, diganti dengan kode/ nama samaran
Memakai kode
Tidak boleh menyampaikan
Menyebut nama termasuk melanggar kode etik
Nama konseli harus disembunyikan dengan kode
Dengan inisial
Nama konseli diganti dengan kode atau nama samaran
Tidak boleh, hanya dengan kode

40. Pernyataan nomer 105 “Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diselenggarakan di dalam ruangan”

Alasan
Kemajuan teknologi bisa digunakan misal di mobil
Layanan BK dapat dilaksanakan dimana saja asal nyaman dan aman
Bisa dimanapun yang dianggap nyaman
Bisa dilaksanakan diluar ruangan
Bisa diluar ruangan melihat situasi kondisi dan permasalahan
Diluar ruangan juga bisa sesuai perjanjian dengan konseli
Pelayanan BK bisa juga dilakukan diluar ruangan; misalnya ditaman, perpustakaan, tempat ibadah, industri
Pelaksanaan layanan bisa dilakukan dimana saja yang penting kedua belah pihak merasa nyaman
Boleh diluar ruangan
Bisa ditempat terbuka kecuali konseling harus ditempat tertutup
Diluar yang bisa sesuai kesepakatan
Tidak harus di dalam ruangan
Boleh diluar ruangan
Bimbingan dan konseling bisa dilakukan di luar ruangan
Boleh diluar ruangan
Dimana saja sesuai kesepakatan
Penyelenggaraan layanan bisa dimana saja, di kelas, ruang BK
Bisa diluar ruang
Bisa diluar ruang/out-bond
Di tempat yang aman nyaman tidak di ketahui orang lain/tidak dengan orang lain
Bisa diluar ruangan
Tidak harus di ruangan
Layanan dapat juga dikelas
Dimanapun asal bisa terlaksana dengan aman dan nyaman
Bila dilakukan di taman yang penting tidak ada orang lain
lihat situasi kondisi
Dimana saja asal kerahasiaan perlu terjaga
Dimana saja bisa yang penting aman, nyaman konseli
Dimana saja yang penting aman
Fleksible, yang penting terjaga kerahasiaannya
Layanan BK dapat dilaksanakan di luar ruangan

41. Pernyataan nomer 108 “Pelayanan konseling dilaksanakan di tempat “terbuka”, artinya proses layanan konseling dapat dilihat oleh orang lain”

Alasan
Pelayanan konseling dilaksanakan di luar ruangan
Proses layanan BK dilaksanakan ditempat tertutup artinya nyaman, aman (tidak didengar orang lain)
Terbuka dalam artian pelaksanaannya tidak ditutupi tetapi isinya/ kerahasiaan diutamakan
Bisa terbuka bisa tertutup melihat permasalahan yang ditangani
Diruang yang tidak tertutup dapat dengan suasana yang berbeda, bisa menyaksikan lingkungan yang berbeda
Tetap dijaga kerahasiaannya
Proses konseling tidak boleh dilihat orang lain
Terbuka, maksudnya ruang terbuka tapi tidak terlihat orang
Tetap dijaga kerahasiaannya
Harus diruang khusus, karena untuk menjamin kerahasiannya
Tetap dijaga kerahasiaannya
Melanggar azas kerahasiaan
Layanan konseling harus ditempat yang tertutup, aman, nyaman
Diluar ruang
Harusnya diruang tertutup sehingga tidak dilihat teman
Sesuai dengan layanan yang dilaksanakan
Pelayanan konseling dilaksanakan ditempat tertutup, aman, nyaman, rahasia tidak diketahui orang lain
Terbuka artinya diperuntukkan pada semua dapat dilayani
Ditempat mana saja asal tetap dijaga kerahasiaan masalahnya
Ditempat tertutup, aman, nyaman
Tergantung sifatnya
Rahasia mestinya

42. Pernyataan nomer 111 “Guru bimbingan dan konseling dalam memilih teknik konseling tidak harus sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan kondisi konseli”

Alasan
Harus sesuai agar kita profesional

Teknik konseling harus sesuai dengan kebutuhan
Setiap individu unik dan masalah beragam
Karena dalam memilih teknik konseling harus sesuai dengan permasalahan, kebutuhan dan kondisi siswa
Teknik konseling harus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kondisi konseli
Kesesuaian teknik dalam konseling sangat berpengaruh dalam proses bimbingan dan konseling
Memilih teknik konseling berdasar pada permasalahan, kebutuhan dan kondisi konseli
Teknik konseling dipakai dengan karakteristik permasalahan konseli
Keberhasilan layanan dapat dicapai karena adanya kesesuaian teknik dan permasalahan
Teknik harus disesuaikan dengan permasalahan, jika tidak pelayanan terhadap konseli tidak tepat dan maksimal
Sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan konseli
Harus sesuai dengan permasalahan dan kondisi konseli
Pelaksanaan konseling berdasar pada permasalahan kebutuhan dan kondisi konseli
Harus disesuaikan kondisi klien
Harus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa
Harus sesuai dengan kebutuhan agar pas
Sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan konseli
Harus sesuai agar pelayanannya tepat
Guru BK harus menyesuaikan dengan masalah, kebutuhan, dan kondisi konseli dalam memilih teknik konseling
Harus sesuai
Pemilihan teknik konseling harus sesuai masalah, kebutuhan sehingga dapat tercapai
Disesuaikan dengan keadaan konseli
Guru BK dalam memilih teknik konseling sesuai dengan permasalahan kebutuhan konseli
Harus sesuai permasalahan
Harus disesuaikan kondisi klien
Harus sesuai agar hasil maksimal
Jika tidak disesuaikan tidak akan cepat dalam penanganan masalah
Harus sesuai masalah
Teknik konseling harus sesuai dengan permasalahan, kebutuhan
Harus sesuai dengan persoalan
Harus sesuai dengan kebutuhan dan berbagi
Harus sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan kondisi konseli
Dalam memberikan bimbingan yang sesuai dengan masalah
Alangkah baiknya menyesuaikan
Harus sesuai
Teknik konseling harus mengacu pada masalah konseli

43. Pernyataan nomer 115 “Guru bimbingan dan konseling tidak perlu melakukan penilaian jangka segera setiap kali menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling”

Alasan
Penilaian segera harus dilakukan, untuk mengetahui hasil layanan
Diperlukan untuk menilai proses bimbingan
Perlu melakukan penilaian jangka segera
Perlu melakukan penilaian segera untuk mengetahui perkembangan sesegera mungkin
Penilaian segera perlu karena mengetahui keberhasilan layanan sehingga dapat melakukan tindak lanjut, disesuaikan dengan tujuan layanannya
Perlu
Perlu melakukan laiseg setiap layanan BK
Perlu untuk mengetahui perkembangan sesegera mungkin
Harus memiliki jangka segera
Perlu
Perlu penilaian jangka pendek
Perlu
Perlu penilaian segera sesuai dengan kebutuhan layanan
Guru BK perlu melakukan penilaian segera untuk menentukan tindak lanjut selanjutnya
Perlu melakukan penilaian
Perlu karena harus melihat progres konseli
Perlu dan harus sesuai kebutuhan
Guru BK perlu melakukan penilaian segera dalam menyelenggarakan layanan
Perlu melakukan penilaian
Perlu, untuk mengetahui langkah selanjutnya
Melihat sikon
Setiap kegiatan selalu dilaksanakan penilaian untuk menentukan penanganan berikutnya
Menurut kebutuhan
Perlu melakukan penilaian jangka segera
Harus melakukan penilaian
Peran pendidikan pada jangka pendek, laiseg
Baiknya melakukan penilaian

44. Pernyataan nomer 117 “Guru bimbingan dan konseling tidak perlu melakukan penilaian hasil layanan setiap menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling perorangan”

Alasan
Perlu melakukan penilaian hasil layanan
Untuk mendapatkan umpan balik harus ada penilaian hasil
Penilaian harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan proses dan dampak/ hasil layanan
Perlu melakukan penilaian untuk mengetahui berhasil tidaknya layanan yang sudah diberikan
Sangat perlu melakukan penilaian
Perlu untuk mengetahui kerahasiaannya
Perlu melakukan penilaian
Sangat perlu penilaian
Perlu menilai setiap penyelenggaraan layanan
Perlu untuk mengetahui keberhasilan
Setiap usai layanan harus ada penilaian
Perlu untuk mengetahui keberhasilan
Perlu melakukan penilaian untuk mengetahui keberhasilan layanan
Harus melakukan penilaian hasil untuk menentukan tindak lanjutnya
Melakukan penilaian
Perlu melakukan penilaian sehingga akan terlihat hasilnya
Perlu melakukan penilaian
Perlu melakukan penilaian hasil layanan
Melakukan penilaian merupakan bentuk tindakan profesional
Perlu menilai setiap penyelenggaraan layanan
Penilaian pada untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan
Harus dilaksanakan untuk menentukan tindakan
Perlu melakukan penilaian
Perlu melakukan penilaian hasil layanan
Perlu adanya penilaian pencapaian
Perlu karena untuk mengetahui nilai perorangan
Perlu melakukan penilaian layanan BK

45. Pernyataan nomer 122 “Aspek penilaian konselor terhadap konseli dalam bimbingan dan konseling kelompok yaitu kondisi kognitif atau berpikir”

Alasan
Dinamika kelompok
Dinamika Kelompok
Dinamika kelompok
Kondisi ini tidak termasuk asas dalam kode etik
Mencakup 3 aspek (kognitif, afektif, dan psikomotor)
Semua aspek yang terkait
Ada kerja sama
Penilaian lengkap
Tri kotomi: jiwa, perilaku, semangat
Penilaian lengkap

46. Pernyataan nomer 123 “Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling terhadap konseli yaitu hanya membantu konseli dalam memenuhi kebutuhan bidang pribadi dan kariernya”

Alasan
Yang dibantu bidang pribadi, sosial, belajar dan karier
Juga bidang sosial dan belajar
Bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier
Bidang layanan BK pribadi, sosial, belajar, dan karier
Belajar dan sosial
Bidang bimbingan dan konseling yang perlu dipahami kepada anak berkaitan dengan bidang; pribadi, sosial, belajar dan karir
Layanan BK tidak hanya terbatas pada pribadi dan karier
Bidang pribadi, belajar, sosial, dan karier
Pribadi, Sosial, Belajar, karir dan Akhlak
Pribadi, karir, sosial, belajar
Belajar dan sosial
4 bidang yang menjadi sasaran yaitu pribadi, sosial, belajar, karir
Pribadi, Sosial, Belajar, Karir
Harusnya meliputi bidang sosial, belajar, karier, dan pribadi

Pribadi, sosial, belajar, karir
Tanggungjawab BK membantu konseli dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir
Harusnya pribadi, sosial, belajar, karir
Pribadi, sosial, belajar, dan karir
Kebutuhan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir
Bertanggungjawab pada kebutuhan bidang pribadi, sosial, belajar dan karir
Mencakup 4 bidang (pribadi, sosial, belajar, dan karir)
Yang lain boleh
Membantu memecahkan masalah pribadi, sosial, belajar, karir
Bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir
Bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir
Pribadi, sosial, belajar, dan karir
Harusnya sosial dan belajar juga

47. Pernyataan nomer 126 “Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada atasan yaitu tidak perlu memberikan informasi kepada pimpinan lembaga tentang perannya terhadap konseli”

Alasan
Perlu memberikan informasi kepada pimpinan
Guru BK harus bertanggung jawab melaporkan hasil proses layanan
Perlu dengan melaporkan kegiatan dan diketahui atasan
Perlu memberikan informasi sejauh tidak merugikan konseli
Harus selalu memberikan laporan kepada pimpinan lembaga, laporan bulanan, semester
Perlu memberi laporan
Wujud pertanggungjawaban kepada atasan melaporkan hasil kegiatan konseling atau layanan BK
Memberikan informasi tentang perannya kepada konseli
Perlu memberi laporan
Harus melaporkan
Perlu menyampaikan informasi ke pimpinan lembaga
Wajib menyampaikan informasi sebagai laporan
Bertanggungjawab membuat laporan
Perlu serasi untuk menyampaikan kepada atasannya
Membuat laporan
Guru BK tanggung jawabnya layanan kepada pimpinan lembaga

Harus membuat laporan
Informasi sebagai laporan
Perlu memberikan informasi

48. Pernyataan nomer 129 “Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada ilmu yaitu menggunakan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan di luar tujuan profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
Penggunaan ilmu harus sesuai tujuan profesi BK
Selain itu yang terpenting justru memanfaatkan ilmu untuk kepentingan profesi
Tanggung jawab untuk kepentingan tujuan profesi BK
Dalam pengembangan profesi
Ilmu digunakan untuk kepentingan tujuan profesi BK
Sepenuhnya untuk kepentingan kemajuan pendidikan dalam upaya membentuk dan mencapai hasil pendidikan cerdas dan berkarakter
Untuk kepentingan BK
Untuk kepentingan di dalam tujuan profesi BK
Dalam pengembangan profesi
Menggunakan ilmu untuk kepentingan profesi BK
Untuk kepentingan BK
Ilmu dimanfaatkan secara proposional dalam proses BK pada khususnya di masyarakat
Untuk kepentingan BK
Penggunaan ilmu harus sesuai kepentingan dan tujuan profesi BK
Ilmu BK digunakan dalam melaksanakan tugas ke Bkan
Ilmu harus digunakan sesuai dengan apa yang harus diperlukan
Hanya untuk kegiatan BK
Didalam tugas profesi BK
Untuk kepentingan profesi BK
Penggunaan ilmu haru sesuai tujuan
Sesuai dengan profesi
Melengkapi wawasan

49. Pernyataan nomer 136 “Tanggung jawab guru bimbingan dan konseling kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu menyadari bahwa pelayanan bimbingan dan konseling bukan untuk kebaikan konseli”

Alasan
Demi kebaikan konseli
Salah satunya juga untuk kebaikan konseli
Bahwa layanan yang diberikan semata-mata untuk kebaikan konseli
Pelayanan untuk kebaikan konseli sesuai dengan agamanya
Untuk kebaikan konseli
Pemberian layanan BK didasari dengan meningkatkan kemandirian konseli yang bertuju pada tanggung jawab sebagai makhluk tuhan
Untuk kebaikan konseli
Untuk kebaikan konseli
Untuk kebaikan konseli
Untuk kebahagiaan Allah
Layanan untuk kebaikan konseli
Mohon agar dilancarkan
Untuk kebaikan konseli
Pelayanan BK semata-mata untuk kebaikan konseli dan mencapai perkembangan yang optimal
Kebaikan konseli
Harusnya untuk kebaikan konseli
Semua untuk kebaikan konseli
Tanggung jawab memohon doa agar kebaikan ada pada konseli
Sebagai tugas dan tanggung jawab BK
Tujuan BK konseli bahagia
Sesuai tujuan guru BK yaitu membantu konseli untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri
Merupakan kebaikan bagi konseli
Untuk kebaikan konseli
Memperbaiki konseli sesuai dengan kebutuhan
Merupakan kebaikan konseli
Pelayanan BK untuk kebaikan konseli
Untuk konseli
Tanggung jawab kepada Tuhan layanan BK untuk kebaikan konseli dan kebaikan semua

50. Pernyataan nomer 139 “Guru bimbingan dan konseling melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik organisasi profesi bukan merupakan pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling secara umum”

Alasan
Tidak pakai bukan, tapi merupakan pelanggaran kode etik profesi
Guru BK yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik profesi merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi BK
Pencemaran nama baik profesi merupakan tindakan pelanggaran kode etik
Mencemarkan nama baik merupakan pelanggaran kode etik
Merupakan pelanggaran kode etik BK secara umum
Mencemarkan nama baik merupakan pelanggaran
Salah satu pelanggaran kode etik profesi BK adalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik
Pelanggaran tindak pidana merupakan pelanggaran hukum jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional
Pelanggaran
Merupakan pelanggaran kode etik
Mencemarkan nama baik adalah pelanggaran
Pelanggaran
Termasuk pelanggaran kode etik dan kejahatan
Pelanggaran
Mencemarkan nama baik organisasi profesi dan pelanggaran kode etik BK
Pelanggaran, berkewajiban menjaga nama baik
Ini termasuk pelanggaran kode etik profesi
Mencemarkan nama baik merupakan pelanggaran
Mencemarkan nama baik merupakan pelanggaran
Mencemarkan nama baik merupakan pelanggaran
Pelanggaran kedua terhadap organisasi profesi
Mencemarkan nama baik merupakan pelanggaran
Merupakan pelanggaran kode etik profesi bimbingan
Mencemarkan nama baik adalah pelanggaran
Tindak pidana kepada organisasi merupakan pelanggaran kode etik

51. Pernyataan nomer 141 “Guru bimbingan dan konseling yang menyebarkan rahasia konseli kepada pihak lain bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli”

Alasan
Bentuk pelanggaran profesi yang benar pada pihak yang kompeten membantu
Guru BK harus menjaga rahasia konseli
Guru BK menghargai hak konseli, sehingga harus menjaga kerahasiaan
Menyebarkan rahasia merupakan bentuk pelanggaran
Menyebarkan rahasia merupakan pelanggaran
Guru BK wajib menjaga kerahasiaan konseli dalam menyelesaikan permasalahan
Kerahasiaan konseli harus tetap dijaga, sebab tidak semua pihak boleh tahu masalah konseli. Orang tertentu saja yang diperbolehkan mengetahui
Guru BK dituntut mematuhi asas rahasia dalam pelayanan BK
Menyebarkan rahasia konseli merupakan pelanggaran kode etik
Menyebarkan rahasia melanggar kode etik
Itu pelanggaran kode etik BK
Guru BK harus bisa mematuhi kode etik dan asas kerahasiaan dalam pelayanan BK
Harusnya rahasia hanya untuk pihak-pihak yang punya kewenangan
Guru BK dituntut mematuhi asas rahasia dalam pelayanan BK
Merupakan pelanggaran karena tidak menjaga kerahasiaan
Guru BK harusnya bisa menjaga rahasia klien pada pihak lain dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bimbingan
Menyebarkan rahasia merupakan pelanggaran
Guru BK wajib menyimpan rahasia konseli. Hal ini salah satu kode etik profesi Guru BK
Guru BK yang menyebarkan rahasia konseli kepada pihak lain merupakan perilaku pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli
Menyebarkan rahasia merupakan pelanggaran
Melanggar kode etik BK
Rahasia klien harus
Salah satu kode etik guru BK adalah menjaga kerahasiaan konseli
Menyebarkan rahasia merupakan pelanggaran
Tidak boleh menyebarkan rahasia konseli pada pihak lain
Harus simpan rahasia
Menjaga kerahasiaan
Asas kerahasiaan harus kita jaga
Pelanggaran

Tidak memahami kode etik
Menyebarkan rahasia konseli melanggar asas kode etik

52. Pernyataan nomer 142 “Guru bimbingan dan konseling melakukan perbuatan asusila (seperti pelecehan seksual) kepada konseli merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap konseli”

Alasan
Kode etik menjaga harga dan martabat diri

53. Pernyataan nomer 144 “Guru bimbingan dan konseling melakukan tindak kesalahan terhadap lembaga tempat bekerja bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi terhadap lembaga kerja”

Alasan
Perlu melakukan penilaian jangka pendek
Karena hubungan dengan lembaga juga diatur dalam kode etik
Merupakan bentuk pelanggaran terhadap lembaga kerja
Tindak kesalahan merupakan bentuk pelanggaran kode etik terhadap lembaganya
Melakukan kesalahan masalah pelanggaran
Kesalahan terhadap lembaga merupakan salah satu pelanggaran kode etik
Tindak kesalahan termasuk pelanggaran kode etik
Melakukan kesalahan termasuk pelanggaran kode etik
Melakukan tindak kesalahan merupakan pelanggaran
Karena merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi yaitu tak mampu menjaga nama baik
Diharapkan tidak melakukan kesalahan
Melakukan tindak kesalahan merupakan bentuk pelanggaran kode etik
Melakukan tindak kesalahan merupakan pelanggaran kode etik
Kode etik mengatur bidang serah guru BK
Tindak kesalahan merupakan pelanggaran
Tindak kesalahan merupakan pelanggaran
Tindak kesalahan merupakan pelanggaran

Kerja sama yang baik
Kerja sama yang baik

54. Pernyataan nomer 147 “Guru bimbingan dan konseling menolak bekerja sama dengan rekan seprofesi merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
Menolak karena mempunyai hak
Harusnya bekerjasama
Guru BK tidak menolak bekerja sama dengan rekan seprofesi
Menjalin kerja sama rekan seprofesi
Demi menjaga persatuan persatuan

55. Pernyataan nomer 148 “Guru bimbingan dan konseling menolak bekerja sama dengan rekan seprofesi merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling”

Alasan
Tidak pakai bukan, tapi merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi
Jika merebut dalam artian mengambil alih kasus siswa, bisa diterima jika tujuannya segera/ darurat mengatasi masalah konseli dan banyak orang menghendaknya
Merebut konseli merupakan bentuk pelanggaran kode etik
Merebut konseli merupakan bentuk pelanggaran kode etik
Merebut konseli pelanggaran kode etik
Merupakan bentuk pelanggaran kode etik
Merebut konseli termasuk pelanggaran kode etik
Adalah pelanggaran kode etik
Jika ingin menangani konseli yang sama (kasus dan konseling) harus ijin sama konseli ybs
Pelanggaran kode etik
Merebut merupakan pelanggaran
Tidak boleh karena alih tangan harus disepekat bersama

Bentuk kerjasama
Merebut konseli merupakan pelanggaran
Melanggar kode etik
Kewenangan yang bersangkutan
Merebut konseli merupakan pelanggaran
Sudah ada tugas masing-masing
Kerja sama yang baik
Karena itu termasuk bentuk pelanggaran kode etik profesi
Merebut konseli teman profesi merupakan pelanggaran kode etik

56. Pernyataan nomer 154 “Pemberian sanksi bagi guru bimbingan dan konseling yang melanggar kode etik profesi yaitu dicabut keanggotaan dari ABKIN dan tetap diberi izin praktik mandiri”

Alasan
Dicabut keanggotaan dari ABKIN dan dicabut izin prakteknya
Tergantung berat ringannya pelanggaran
Tidak diberi izin praktik mandiri
Tidak diberi izin praktik
Apabila kesalahan berlanjut tidak diberi ijin untuk praktik mandiri
Tidak diberi izin praktik mandiri
Tidak diberi izin praktik
Tidak diberi izin praktik mandiri
Dilihat dulu bobot pelanggarannya (ringan, sedang, berat)
Tidak diberi izin praktik mandiri dan dicabut keanggotaannya
Tidak diberi ijin praktik mandiri
Saksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggarannya
Tidak diberi izin
Tidak diberi izin praktik mandiri
Dibangun kerja sama dan diluruskan/kekurangannya
Dibangun kerja sama dan di luruskan kekurangannya

57. Pernyataan nomer 158 “Tahapan kedua penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi yaitu konseli melaporkan adanya pelanggaran kode etik profesi kepada dewan kode etik profesi”

Alasan
Tahap kedua penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi memverifikasi informasi
Tahap satu
Klarifikasi atas laporan konseli
Tahap kedua merupakan tahap verifikasi
Seharusnya klarifikasi atas laporan konseli
Konseli tidak punya hak
Tahap ke dua penanganan verifikasi
Membina, menyadarkan, mengarahkan agar lebih profesional

58. Pernyataan nomer 159 “Tahapan ketiga penanganan sanksi pelanggaran kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu guru bimbingan dan konseling yang melakukan pelanggaran tidak diberi kesempatan untuk membela diri”

Alasan
Pada tahap ketiga masuk pada sanksi. Pencabutan dari keanggotaan ABKIN
Diberi kesempatan/dipanggil untuk verifikasi
Guru BK dapat melakukan pembelaan terhadap pelanggaran kode etik profesi
Setiap individu yang melakukan pelanggaran memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri tentang apa yang dilakukannya
Tiap individu yang melakukan kesalahan/pelanggaran hukum/harus diberi kesempatan membela diri/bantuan hukum
Obyektif
Guru BK diberi kesempatan membela diri dan bila masih ringan penyelesaian oleh dewan
Haknya untuk membela diri dan diberi kesempatan
Harus obyektif
Diberi kesempatan membela diri
Diberikan untuk melakukan pembelaan
Secara obyektif

Diberi kesempatan membela diri
Diberi kesempatan membel diri
Diberi kesempatan untuk membela diri

59. Pernyataan nomer 160 “ABKIN membentuk dewan kode etik profesi dalam dua tingkatan yaitu tingkat daerah dan tingkat nasional”

Alasan
Ada tiga tingkat
Ada satu tingkat yaitu nasional
Dan tingkat kabupaten

60. Pernyataan nomer 161 “ABKIN membentuk dewan kode etik profesi dalam tiga tingkatan yaitu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional”

Alasan
Tingkat nasional dan daerah
Tidak hanya tingkat nasional, tingkat daerah juga ada.
Dimulai dari tingkat kabupaten, propinsi dan nasional
Nasional, propinsi, kabupaten
Tingka daerah juga ada
Ada sampai tingkat kabupaten
Tidak cuma satu tingkat
Dewan kode etik ada ditingkat nasional dan propinsi
Harus mendalami daerah, wilayah, nasional
Ada sampai tingkat provinsi
Sampai tingkat kabupaten
Propinsi pusat
Ada tiga tingkat
Mempunyai dua tingkatan
Tingkat propinsi dan kabupaten
Kabupaten dan propinsi
Tingkat propinsi dan kabupaten
Di propinsi juga ada dua kode etik

61. Pernyataan nomer 162 “Dewan kode etik profesi dalam struktural organisasi profesi ABKIN hanya ada satu tingkatan yaitu tingkat nasional”

Alasan
Tingkat nasional dan daerah
Tidak hanya tingkat nasional, tingkat daerah juga ada.
Dimulai dari tingkat kabupaten, propinsi dan nasional
Nasional, propinsi, kabupaten
Tingkat daerah juga ada
Ada sampai tingkat kabupaten
Tidak cuma satu tingkat
Dewan kode etik ada ditingkat nasional dan propinsi
Harus mendalami daerah, wilayah, nasional
Ada sampai tingkat provinsi
Sampai tingkat kabupaten
Propinsi pusat
Ada tiga tingkat
Mempunyai dua tingkatan
Tingkat propinsi dan kabupaten
Kabupaten dan propinsi
Tingkat propinsi dan kabupaten
Di propinsi juga ada dua kode etik

62. Pernyataan nomer 165 “Dewan kode etik profesi mempunyai tugas dalam menjaga dan mengawasi tegaknya kode etik profesi”

Alasan
Ada tingkatan, dari teguran lisan sampai tulisan dan pencabutan
Dewan kode etik profesi bk ikut berfungsi

63. Pernyataan nomer 168 “Fungsi dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu memeriksa dan memverifikasi tentang adanya pelanggaran kode etik profesi oleh guru bimbingan dan konseling”

Alasan
Mempunyai fungsi dalam memeriksa adanya pelanggaran kode etik
Dewan kode etik profesi bimbingan bertanggungjawab memverifikasi pelanggaran kode etik
Dewan kode etik memverifikasi data dari konseli atau masyarakat sebelum penerapan sanksi
Dewan kode etik profesi mempunyai fungsi memeriksa adanya pelanggaran terhadap kode etik oleh guru BK
Punya fungsi dalam memeriksa adanya pelanggaran kode etik
Kode etik mengendalikan supaya dalam tugas keprofesional guru BK tidak melakukan pelanggaran
Mempunyai fungsi
Punya fungsi
Mempunyai fungsi memelihara
Dewan kode etik mempunyai fungsi memverifikasi pelanggaran kode etik oleh guru BK
Mempunyai fungsi dalam memeriksa pelanggaran
Harus punya fungsi
Ada fungsinya
Bertanggungjawab memverifikasi pelanggaran kode etik
Salah satu fungsi sebagai sanksi di pengadilan maka harus tahu pelanggaran yang dilakukan
Bertanggungjawab memverifikasi pelanggaran

64. Pernyataan nomer 169 “Dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak mempunyai tugas menerima pembelaan dari guru bimbingan dan konseling yang diadukan melanggar kode etik profesi”

Alasan
Dewan kode etik memiliki tugas menerima pembelaan dari guru BK yang diadukan
Mempunyai tugas pembelaan
Dewan kode etik dapat menerima pembelaan guru BK

Penentuan tentang salah/benar ada dalam keputusan sidang dewan kode etik
Dewan harus memberi perlindungan pada setiap anggotanya
Tugasnya pembelaan
Untuk dijadikan pertimbangan
Dewan kode etik menerima pembelaan yang diajukan
Mempunyai tugas menerima pembelaan
Dewan kode etik profesi BK menerima pembelaan
Punya tugas menerima pembelaan
Menerima pembelaan

65. Pernyataan nomer 173 “Tugas dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling yaitu mempertimbangkan sanksi kepada guru bimbingan dan konseling yang terbukti melanggar kode etik profesi”

Alasan
Tidak cukup mempertimbangkan sanksi tetapi lebih kearah meninggalkan tugas profesional guru bk dalam menjalankan tugas pemberian layanan
Bukan haknya

65. Pernyataan nomer 176 “Dewan kode etik profesi bimbingan dan konseling tidak memiliki fungsi sebagai saksi di pengadilan berkenaan dengan perkara hukum”

Alasan
Dewan kode etik profesi memiliki fungsi sebagai saksi dalam pelanggaran yang berkaitan dengan profesi
Tugas pokok dewan salah satunya adalah sebagai sanksi yang berkaitan dengan profesi konselor
Memiliki fungsi saksi di pengadilan
Punya fungsi sebagai saksi
Dewan kode etik sebagai penegak dalam penyelenggaraan profesi pelaksanaan layanan bk
Punya fungsi sebagai sanksi
Dapat sebagai saksi
Sebagai saksi dipengadilan berkenaan dengan pelanggaran hukum

Memiliki fungsi sebagai saksi
Harus punya fungsi sebagai sanksi di pengadilan
Berkaitan dengan guru BK
Sebagai saksi adalah salah satu tugas disamping melakukan pembelaan
Memiliki fungsi sebagai saksi
Bisa menjadi saksi

Lampiran 5.

Surat-surat Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 540611 pesawat 405, Fax (0274) 5406611
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas fip@uny.ac.id

Nomor : 3009 /UN34.11/PL/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

18 Mei 2016

Yth. Kepala Bappeda Bantul
Jl.R.W.Monginsidi No.1
Kecamatan Bantul,
Yogyakarta 55711

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Fajar Ilham
NIM : 12104244015
Prodi/Jurusan : BK/PPB
Alamat : Jl. Gresik 5 No. 1 RT 33 RW 12 Mlandangan, Minomartani, Ngaglik, Sleman, DIY

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : SMP Negeri Se-Kabupaten Bantul
Subyek : Guru Bimbingan dan Konseling
Obyek : Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling
Waktu : Mei-Juni 2016
Judul : Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling Di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kabupaten Bantul

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan PPB FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

Varyanto, M. Pd.

NIP196009021987021001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2389 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Fakultas Ilmu Pendidikan, Nomor : 3009/UN34.11/PL/2016
Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY)
Tanggal : 18 Mei 2016 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **FAJAR ILHAM**
P. T / Alamat : **Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Karangmalang, Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP : **12104244015**
Nomor Telp./HP : **085223700840**
Tema/Judul Kegiatan : **TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU BK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KABUPATEN BANTUL**
Lokasi : **SMP Negeri 1 Srandakan, SMP Negeri 1 Sewon, SMP Negeri 1 Sedayu, SMP Negeri 1 Sanden, SMP Negeri 1 Pundong, SMP Negeri 1 Pleret, SMP Negeri 1 Piyungan, SMP Negeri 1 Pandak, SMP Negeri 1 Pajangan, SMP Negeri 1 Kretek, SMP Negeri 1 Kasihan, SMP Negeri 1 Jetis, SMP Negeri 1 Imogiri, SMP Negeri 1 Dlingo, SMP Negeri 1 Bantul, SMP Negeri 1 Bambanglipuro, SMP Negeri 1 Banguntapan**
Waktu : **19 Mei 2016 s/d 19 Agustus 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 19 Mei 2016

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan
Pengembangan, u.p. Kasubbid.
Litbang

Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP. 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

Lampiran Nomor Izin : 070 / Reg / 2389 / S1 / 2016

6. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Jetis
7. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Dlingo
8. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Piyungan
9. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Kretek
10. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Banguntapan
11. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Sewon
12. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Sedayu
13. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Pajangan
14. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Sanden
15. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Srandakan
16. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Pundong
17. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Imogiri
18. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Pleret
19. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Kasihan
20. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Bantul
21. Ka. SMP Negeri 1 Srandakan
22. Ka. SMP Negeri 1 Sewon
23. Ka. SMP Negeri 1 Sedayu
24. Ka. SMPN 1 Sanden
25. Ka. SMP Negeri 1 Pundong
26. Ka. SMP Negeri 1 Pleret
27. Ka. SMP Negeri 1 Piyungan
28. Ka. SMP Negeri 1 Pandak
29. Ka. SMP N 1 Pajangan
30. Ka. SMP Negeri 1 Kretek
31. Ka. SMP Negeri 1 Kasihan
32. Ka. SMP Negeri 1 Jetis
33. Ka. SMP Negeri 1 Imogiri
34. Ka. SMP Negeri 1 Dlingo
35. Ka. SMP Negeri 1 Bantul
36. Ka. SMP Negeri 1 Bambanglipuro
37. Ka. SMP Negeri 1 Banguntapan
38. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
39. Yang Bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SMP 1 SANDEN

Murtigading, Sanden, Bantul - Yogyakarta Kode Pos 55763 Telp. 08112634745
Fax. (0274)6464342, E-mail : smp1sanden@yahoo.co.id

Nomor : 421.3 / 077 / 2016
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Sanden, 21 Mei 2016

Kepada :
Yth. : FAJAR ILHAM
Di Fakultas Ilmu Pendidikan, UNY
Karangmalang, Yogyakarta

Dengan hormat, menanggapi Surat Nomor : 070 / Reg / 2389 / S1 / 2016
tertanggal 18 Mei 2016 hal Permohonan Izin Penelitian, maka yang bertandatangan di bawah
ini :

Nama : Dra. Hj. SAYUTI, MM
NIP : 196102271984032004
Jabatan : Kepala Sekolah

Memberikan izin Penelitian kepada :

Nama : FAJAR ILHAM
P.T / Alamat : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta
(UNY) Karangmalang, Yogyakarta
NIP/NIM/No. KTP : 12104244015
Nomor Telp. / HP : 085223700840
Tema/Judul : TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN
DAN KONSELING PADA GURU BK DI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI SE-KABUPATEN BANTUL
Hari / Tanggal : 19 Mei 2016 s/d 19 Agustus 2016
Tempat : SMP N 1 SANDEN

Demikian untuk menjadi periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah,

Dra. Hj. SAYUTI, MM
NIP 196102271984032004



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SMPN 1 SRANDAKAN**

Alamat : Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul, Yogyakarta ✉ 55762 ☎ (0274)6464726
web : www.smpn1srandakan.wordpress.com, Email : sransan@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423 / 197 / SRA.P.01

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SAJAK, S.Pd**
NIP : 19610329 198302 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina, IV a
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **FAJAR ILHAM**
NPM : 12104244015
Program Studi : Bimbingan Konseling
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

Mahasiswa tersebut di atas telah **melaksanakan tes** pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Mei 2016
Tempat : SMP Negeri 1 Srandakan
Subjek : Guru Bimbingan Konseling

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Srandakan, 26 Mei 2016

Kepala Sekolah,



H. SAJAK, S.Pd

NIP. 19610329 198302 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SMP NEGERI 1 PUNDONG**

Alamat : Panjangrejo, Pundong, Bantul Telp. 085100483816 Kode Pos 55771

SURAT KETERANGAN

No : 105 / 420 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. WIDAYA**
2. NIP : 19581101 197803 1003
3. Pangkat / Gol : Guru Madya / IV a
4. Jabatan : Kepala Sekolah
5. Unit Kerja : SMP Negeri 1 Pundong

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : **FAJAR ILHAM**
2. N I M : 12104244015
3. Instansi : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
(UNY) Karangmalang, Yogyakarta.

Telah melaksanakan Penelitian pada tanggal 25 Mei 2016 s.d 26 Mei 2016 di SMP Negeri 1 Pundong.

Dengan Judul :

**"TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING
PADA GURU BK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KABUPATEN
BANTUL"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pundong, 26 Mei 2016
Kepala Sekolah

Drs. H. WIDAYA
NIP 19581101 197803 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR

SMP NEGERI 1 PANDAK

Jalan Srandakan km.1, Gilangharjo, Pandak, Bantul 55761 Telp. 367375

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO: 424/137/PP.P.01

Berdasarkan surat izin penelitian 070/Reg/2389/S1/2016 Yogyakarta,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rr. ANI PRIHATI HANDAYANI, M.Pd.
NIP : 19640222 198412 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 1 Pandak

Menyatakan bahwa,

Nama : Fajar Ilham
NIM : 12104244015
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan

Telah melakukan pengambilan data untuk penelitian dengan judul: "**TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KOSELING PADA GURU BK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KABUPATEN BANTUL**" pada tanggal 19 Mei s/d 19 Agustus 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pandak, 27 Mei 2016
Kepala Sekolah,

Rr. ANI PRIHATI HANDAYANI, M.Pd.
NIP. 19640222 1984122002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR

SMP NEGERI 1 SEWON

Alamat: Jl. Parangtritis Km.7 Sewon Yogyakarta Telp. 0274383733 Kode Pos 55186

SURAT KETERANGAN

Nomor :0197 /018/005/2016

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SARJIYEM, M.Pd., M.A
NIP : 19621109 198412 2 003
Pangkat/ Gol. Ruang : Guru Madya/ IV a
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 1 Sewon, Bantul

Menerangkan bahwa :

Nama : FAJAR ILHAM
NIM : 12104244015
Pekerjaan : Mahasiswa S-1 UNY, Fak.Ilm. Pendidikan

Telah melaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Sewon, Bantul pada tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016. Tema/Judul : TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU BK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KABUPATEN BANTUL.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 27 Mei 2016
Kepala Sekolah,

SARJIYEM, M.Pd., MA
NIP. 19621109 198412 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 KRETEK
SEKOLAH STANDAR NASIONAL
Alamat : Donotirto Kretek Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tlp 731 042 Kp. 55772

SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN PENELITIAN
No. 421.7/ 105

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs, ISBANDANA.MM
NIP : 19630729198403 1 005
Pangkat/ Gol : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FAJAR IIHAM
N I M : 12104244015
Fakultas / Program Study : PPB / BK
Jenjang : S 1
Lokasi Penelitian : SMP NEGERI 1 KRETEK
Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Benar benar telah melaksanakan : PENELITIAN
Tanggal Penelitian :
Tempat/ Obyek : SMP Negeri 1 Kretek, Donotirto, Kretek, Bantul.
Judul Penelitian / Wawan Cara : " KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING "

Demikian surat keterangan ini , dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kretek, 28 Mei 2016
Kepala Sekolah

Drs, ISBANDANA, MM
19630729198403 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SMP 1 PAJANGAN**

Alamat : Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Telp. (0274) 6461785
Kode Pos 55751
E-mail : smp1_pajangan@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 90 /421. 3/PP/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MURJITO, S.Pd
N I P : 19580716 198103 1 014
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP 1 Pajangan

Menerangkan bahwa :

N a m a : FAJAR ILHAM
N I M : 12104244015
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta (U N Y)
Program Studi : Bimbingan dan Konseling (B K)

Benar-benar telah melakukan Penelitian di SMP 1 Pajangan dengan judul/tema :

“ KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING “

Pada Tanggal 30 Mei 2016

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pajangan, 01 Juni 2016
Kepala Sekolah



MURJITO, S.Pd
NIP. 195807161981031014



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SMP NEGERI 1 SEDAYU**

Alamat: Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul Pos Kemusuk Telp. 0274 798256 Yogyakarta 55753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800/17/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Supriyanta, M.Pd.
NIP : 19621128 198412 1 001
Jabatan : Kepala Sekolah
Pangkat/ golongan : Pembina/ IV A

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fajar Ilham
NIM : 12104244015
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Program Studi : Psikologi Pendidikan dan Bimbingan/ Bimbingan dan Konseling
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

telah melaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Sedayu terhitung mulai tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 2 Juni 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU BK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KABUPATEN BANTUL"***.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sedayu, 2 Juni 2016

Kepala Sekolah



Agus Supriyanta, M.Pd.

NIP. 19621128 198412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SMP 1 IMOIRI**

Alamat : Jln. Imogiri Km 12 Imogiri Bantul Yk 55782 Telp. (0274) 6460668

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423 / 467 .

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala SMP 1 Imogiri:

Nama : Drs. BAMBANG EDY SULISTİYANA, M.Pd
NIP : 19611219 198403 1 004
Pangkat /Gol : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP 1 Imogiri

Menerangkan bahwa :

Nama : FAJAR ILHAM
NIM : 12104244015
Prodi : Pendidikan Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di SMP N 1 Imogiri dari tanggal 27 Mei 2016 s.d 3 Juni 2016 untuk penyusunan Skripsi dengan judul "*TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU BK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KABUPATEN BANTUL*" dengan pembimbing :

Nama : Dra. C. RETNO SUSETYORINI
NIP : 19600306 199512 2 001
Jabatan : Guru Pembina
Instansi : SMP N 1 Imogiri

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Imogiri, 8 Juni 2016

Kepala

Drs. BAMBANG EDY SULISTİYANA, M.Pd
NIP. 19611219 198403 1 004



DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL
SMP NEGERI 1 DLINGO
Alamat : Temuwuh, Dlingo, Bantul, Kode Pos 55783, Yogyakarta.
Telepon (0274) 7488596, Email : smp1dlingo_btl@yahoo.com
Web Site : <http://www.smpn1dlingo-bantul.sch.id>

SURAT KETERANGAN

NO : 423.4/079 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SARIMIN, M. Pd.**
NIP : 19600803 199512 1 001
Pangkat/Gol : Pembina/IV a
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 1 Dlingo Bantul

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **FAJAR ILHAM**
NIM : 12104244015
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Program Studi : Bimbingan dan Konseling
Jurusan : Psikologi Pendidikan dan Bimbingan
Perguruan Tinggi : Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta

Terhitung mulai tanggal 25 Mei 2016 s.d 10 Juni 2016 telah melaksanakan penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir Skripsi dengan judul **"TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU BK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KABUPATEN BANTUL"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dlingo, 10 Juni 2016



Drs. SARIMIN, M. Pd.
NIP 19600803 199512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SMP NEGERI 1 KASIHAN

Jalan Wates No.62, Ngestihardjo, Kasihan Bantul Telp: (0274) 618847 Kode Pos. 55182

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 421.3/180/VI/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kasihan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

Nama : Drs.SRI INDRA DWIYATNO, M.Pd
NIP : 19590915 197903 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina/IV a
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SMP Negeri 1 Kasihan

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : FAJAR ILHAM
NIM : 12104244015
Program Studi/ Jenjang : Bimbingan dan Konseling/ S1
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melakukan kegiatan penelitian di SMP Negeri 1 Kasihan Bantul pada tanggal 11-13 Juni 2016, dengan judul penelitian **“TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMP NEGERI SE-KABUPATEN BANTUL “**

Demikian surat keterangan ini diberikan, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bantul, 13 Juni 2016
Kepala Sekolah
Drs. SRI INDRA DWIYATNO, M.Pd
NIP. 19590915 197903 1 001



DINAS PENDIDIKAN DASAR KAB. BANTUL
SMP NEGERI 1 PIYUNGAN
Jl. Yogya -Wonosari km 14 Srimulyo, Piyungan, Bantul
Kode Pos 55792 Telp. (0274) 4353240

SURAT KETERANGAN
Nomor : 422 / 162 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : W A R S I T O, S.Pd.
NIP : 19600603 198303 1 025
Pangkat / Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah
Satuan Organisasi : SMP Negeri 1 Piyungan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : FAJAR ILHAM
NIM/No. KTP : 12104244015
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Prodi : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Piyungan pada tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016 dengan Judul :

**" TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN
KONSELING PADA GURU BK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SE-KABUPATEN BANTUL"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Piyungan, 18 Juni 2016
Kepala Sekolah

WARSITO, S.Pd.
NIP. 19600603 198303 1 025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SMP 1 PLERET

Alamat : Jejeran Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta Telp 4415220

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No : 422 / 281

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPARMAN, M.Pd
NIP : 196207191984031004
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah
Satuan Organisasi : SMP 1 Pleret

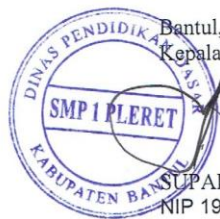
Menerangkan bahwa

Nama : FAJAR ILHAM
NIM : 12104244015
Pekerjaan : Mahasiswa UNY, Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan
Bimbingan dan Konseling

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Pleret Bantul pada tanggal 17 s/d 21 Juni 2016 dengan judul :

Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling pada Guru BK di Sekolah Menengah Pertama Negeri se Kabupaten Bantul.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bantul, 21 Juni 2016
Kepala Sekolah

SUPARMAN, M.Pd
NIP 196207191984031004



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SMP 1 BAMBANGLIPURO

Alamat : Nglarang, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, Yk Telp. 0274 2613351

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 422/136 /VI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Tri Yatmiyati
NIP : 19581006 198103 2 005
Pangkat/Gol : IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah
Satuan Organisasi : SMP 1 Bambanglipuro

Menerangkan bahwa :

Nama : FAJAR ILHAM
NIM : 12104244015
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Program Studi : Bimbingan dan Konseling

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Bambanglipuro Bantul pada tanggal 21 s/d 22 Juni 2016 dengan judul **"TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU BK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KABUPATEN BANTUL"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 22 Juni 2016
Kepala Sekolah



Dra. Tri Yatmiyati
NIP. 19581006 198103 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SMP NEGERI 1 JETIS BANTUL
Alamat : Jl. Imogiri Barat Km 11 Jetis Bantul Kode Pos 55781
Telepon 08112645196 e-mail : smp1jetisbantul@yahoo.co.id.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 134 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINI FAIFFINIATI, M.Pd.
N I P : 19590627 198103 2 005
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IV A
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : FAJAR ILHAM
N I M : 12104244015
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Jurusan : Bimbingan Konseling

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di SMP N 1 Jetis Bantul pada bulan : 14 s.d 23 Juni 2016 , dengan judul penelitian :
"TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN & KONSELING PADA GURU BK DI SMP NEGERI SE-KABUPATEN BANTUL"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jetis, 23 Juni 2016
Kepala Sekolah

RINI FAIFFINIATI, M.Pd.
NIP. 19590627 198103 2 005



DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL
SMP 1 BANGUNTAPAN
SEKOLAH STANDAR NASIONAL TERAKREDITASI "A"
Jl. Karangturi Baturetno, Banguntapan, Bantul 55197 Telp / Fax 0274-377822
Website : www.smp1banguntapan-bantul.sch.id Email : info@smp1banguntapan-bantul.sch.id



SURAT KETERANGAN

No. 422/21 /2016

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Dra.SAMBIYANTI,M.Pd
NIP : 1950118198103007
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP 1 Banguntapan
Jl. Karangturi Baturetno Banguntapan Bantul

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : FAJAR ILHAM
NIM : 12104244015
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Jurusan : Bimbingan Konseling

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di SMP N 1 Jetis Bantul pada bulan :20 s.d 24 Juni 2016 dengan Judul Penelitian : " TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN & KONSELING PADA GURU BK DI SMP NEGERI SE- KABUPATEN BANTUL "

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banguntapan, 24 Juni 2016

Kepala Sekolah

Dra.SAMBIYANTI,M.Pd
NIP. 19580118198103007



DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL

SMP NEGERI 1 BANTUL

Jalan R.A. Kartini 44 Bantul, 55714 Telp/Fax (0274) 367 319 Yogyakarta

Website: www.smpn1bantul.sch.id e_mail : humas@smp1bantul.sch.id

SURAT KETERANGAN

NO : 070/530/BAH.P/01

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 1 Bantul menerangkan bahwa:

Nama : FAJAR ILHAM

Pekerjaan : Mahasiswa UNY

Prodi : Bimbingan dan Konseling

No.Mhs/NIM : 12104244015

Benar-benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 25 Juni 2016 di SMP Negeri 1 Bantul dengan judul "Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Pada Guru BK Di SMP Negeri Se-Kabupaten Bantul".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 25 Juni 2016
Kepala Sekolah,

Yasmuni, S.Pd, M.Pd.I
NIP. 19700715 1984031 006

